



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

WIRA
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



PERAN PUSAT KELAIKAN KEMHAN RI DALAM PERTAHANAN NEGARA



ISSN 1693-0231



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



kemhanri



Kemhan RI

INDONESIA
EDISI II 2021



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
beserta seluruh keluarga besar
Kementerian Pertahanan, menyampaikan rasa duka yang
sedalam-dalamnya atas gugarnya para prajurit terbaik saat melaksanakan tugas

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan tempat yang mulia disisi-Nya
serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan keikhlasan,
kesabaran, dan ketabahan



DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Sekjen Kemhan, Marsdyo TNI Donny Ermawan T., M.D.S.

Pemimpin Umum:

Karo Humas Setjen Kemhan,
Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc

Pemimpin Redaksi/Koordinator Redaksi:

Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi Naskah/Redaksi Visual:

M. Adi Wibowo, S.Sos, M.Si.,
Mayor Laut (KH) Bondy Mulyatmo, S.Sos, M.M

Reporter:

Budiono, S.Si

Desain Grafis:

Imam Rosyadi

Fotografer:

Acep Sutawijaya/Sasi Indah P

Distribusi dan Sirkulasi:

Kapten Cku Lindu Baliano
Mandiri Triadi, S.Sos, M.M

Diterbitkan oleh:

Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat
No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax.
3452457



Para pembaca WIRA yang budiman,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya-lah di Tahun 2021 ini Majalah Wira Kemhan kembali menyapa para pembaca WIRA di edisi ke-2 tahun 2021. Pada edisi ini redaksi akan menyajikan beberapa informasi dan artikel yang layak untuk disimak oleh pembaca WIRA.



Informasi yang kami berikan terkait dengan kegiatan pimpinan Kementerian Pertahanan yang terangkum dalam rubrik Fokus.

Adapun beberapa artikel yang redaksi sajikan yakni, Peran Pusat Kelaikan Kemhan dalam Pertahanan Negara; KRI Nanggala-402, Kami Titipkan Kedaulatan Laut Indonesia Kepada Kalian, Selamat Jalan, Selamat Berlayar Menuju Keabadian; Pertahanan Negara dalam Otonomi Khusus di Papua Barat; dan Peran TNI Angkatan Laut dalam Perbantuan Kecelakaan di laut sebagai bagian dari OMSP.

Sedangkan pada rubrik Fokus Lensa, redaksi menampilkan foto-foto kegiatan pimpinan dan foto kegiatan satker kemhan.

Dengan kerendahan hati, semoga informasi dan artikel yang kami sajikan dalam Majalah WIRA edisi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca setia WIRA dimanapun berada dan bertugas.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Selamat membaca...!!!

Kepala Biro Humas,

Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.

Daftar Isi

Fokus Utama>>

6-11

Kemhan RI Siap Membangun Hubungan Kerjasama Pertahanan yang Lebih Kuat dengan Republic of Korea



Menhan RI berharap hubungan bilateral Indonesia-RoK di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya untuk kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan. Menhan Prabowo juga melihat masih banyak peluang kerjasama pertahanan yang perlu dijajaki bersama, terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama industri pertahanan.

Menhan RI Temui Presiden dan Perdana Menteri Republik Korea



Menhan Prabowo Hadiri Roll-Out Ceremony Pesawat Tempur KF-X

Fokus Pimpinan>>

12-27

Menhan Prabowo Serahkan Pesawat Karya Anak Bangsa CN235-220 Kepada AU Senegal

Karo Humas Setjen Kemhan ajak awak media lihat capaian produk Alpalhankam PT Pindad

Menhan Prabowo Pimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021

Biro Humas Setjen Kemhan luncurkan Podcast Kemhan "Defence's Advocate"

RI-Jepang Tandatangani Perjanjian tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan

Kapal Selam buatan dalam negeri KRI Alugoro-405 perkuat alutsista TNI AL

Wamenhan harapkan Indhan Indonesia capai target 50 perusahaan teratas dunia



Indonesia mengajak negara-negara ASEAN dan negara partner ASEAN untuk bekerjasama tangani dampak pandemi

Irjen Kemhan Pimpin Sertijab Sekretaris dan Inspektur I Itjen Kemhan

Artikel>>

28-36

Peran Pusat Kelaikan Kemhan dalam Pertahanan Negara

(Penulis : Kolonel Tek. Suparman S.T)



Bericara kelaikan negara/ pertahanan/militer, umumnya masyarakat Indonesia, masih terbatas mengenal akan eksistensi Puslaik Kemhan dalam sertifikasi kelaikan produk non-sipil terutama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) termasuk militer, tidak seperti halnya peran Kementerian Perhubungan yang merupakan *single worthiness authority* kelaikan dalam mensertifikasi moda transportasi sipil dan pendukungnya di tanah air.

37-47

KRI Nanggala-402, Kami Titipkan Kedaulatan Laut Indonesia Kepada Kalian, Selamat Jalan, Selamat Berlayar Menuju Keabadian

(Penulis : Muhammad Adi Wibowo, M.Si)

48-53

Pertahanan Negara Dalam Program 1000 Bintara TNI AD Otonomi Khusus di Papua Barat

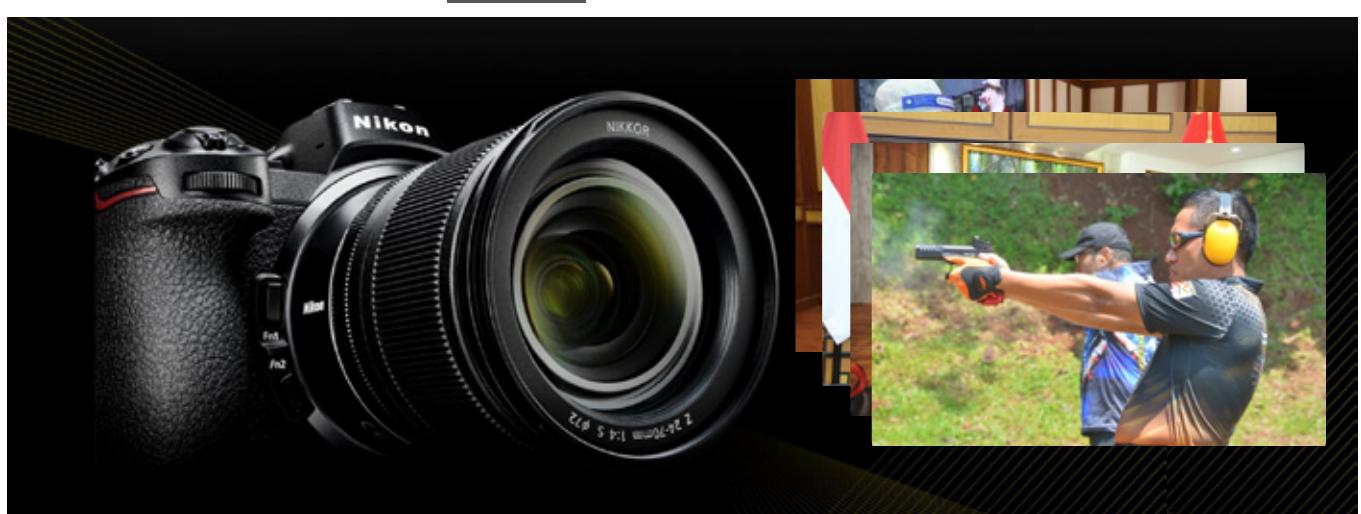
(Penulis : Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH)

54-60

Peran TNI Angkatan Laut dalam Perbaikan Kecelakaan di laut sebagai bagian dari OMSP (Penulis: Letkol Laut (KH/W) Elyah Musarovah)

Fokus Lensa>>

61-63



KEMHAN RI SIAP MEMBANGUN KERJASAMA PERTAHANAN KUAT DENGAN REPUBLIC OF



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Kamis (8/4), melaksanakan kunjungan kerja ke Korea Selatan untuk melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Y.M. Suh Wook dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral pertahanan. Kunjungan kehormatan (*Courtesy Call*) Menhan RI kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook, disambut dengan upacara militer. Dalam acara yang berlangsung sangat hangat ini kedua negara sepakat mempererat kerjasama militer yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan bilateral pertahanan tersebut kedua belah pihak delegasi berdiskusi dan bertukar pandangan tentang beberapa hal strategis di bidang pertahanan dan keamanan, diantaranya; pertukaran pandangan keamanan regional dan kerja

sama bilateral. Diskusi tentang topik tersebut telah membuat sejumlah pembaruan informasi dan referensi. Kementerian Pertahanan Indonesia siap membangun hubungan kerja sama Pertahanan yang lebih kuat dengan pihak *Republic of Korea* (RoK).

Menhan RI berharap hubungan bilateral Indonesia-RoK di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya untuk kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan. Menhan Prabowo juga melihat masih banyak peluang kerjasama pertahanan yang perlu dijajaki bersama, terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama industri pertahanan.

HUBUNGAN YANG LEBIH KOREA

Atas nama Pemerintah RI Menhan RI juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi dari pemerintah dan masyarakat Korea dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 27 April 2020, Pemerintah Korsel telah memberikan bantuan 10.000 PCR (*Polymerase Chain Reaction*) *Diagnocis Test* kepada Kemhan RI melalui Industri Pertahanan Republik Korsel.

Alat ini sangat membantu dan bermanfaat bagi Indonesia dalam menangani Covid-19. Dijelaskan oleh Menhan RI, Korea Selatan merupakan salah satu negara paling sukses di dunia dalam mengatasi masalah ini, dengan kebijakan yang cepat, akurat dan efisien, serta dukungan dari masyarakat Korea.***



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto foto bersama saat melaksanakan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Y.M. Suh Wook Kamis (8/4) di Korea Selatan.



Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat (9/4), melaksanakan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Perdana Menteri Republik Korea Chung Sye-Kyun, di Kantor Perdana Menteri RoK, Seoul, Korea Selatan.

8

MENHAN RI TEMUI PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI REPUBLIK KOREA

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat (9/4), melaksanakan kunjungan kehormatan (*courtesy call*) kepada Perdana Menteri Republik Korea Chung Sye-Kyun, di Kantor Perdana Menteri RoK, Seoul, Korea Selatan. Menhan RI menjelaskan bahwa tujuan kunjungan kerjanya ke Korea Selatan adalah dalam rangkaian acara *The Roll-Out Ceremony of the prototype KF-X / IF-X*. Sebelumnya, pada Kamis (8/4) Menhan RI juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republic of Korea Moon Jae-In

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Chung ini Menhan RI menyampaikan apresiasi atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan Korsel di bawah Kemitraan Strategis Khusus dan menyadari pentingnya Korsel sebagai mitra Indonesia di dalam kontribusinya untuk perdamaian dan kesejahteraan pada level nasional, regional dan Internasional. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan RI dan instansi terkait di bidang pertahanan berupaya membangun kemitraan dengan industri pertahanan luar negeri yang dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan industri pertahanan Indonesia, termasuk diantaranya Korea Selatan.

Menhan RI juga memberi selamat kepada pemerintah Korsel yang telah mencapai kemampuan memproduksi prototipe jet tempur generasi selanjutnya, dan mengharapkan dukungan PM Chung dalam upaya penguatan hubungan dan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Saat ini, hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah berjalan dengan baik di bawah payung kerja sama pertahanan dalam bentuk *“Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense”* yang telah ditandatangani di Jakarta pada 12 Oktober 2013 oleh kedua Menteri Pertahanan. Beberapa kerja sama pertahanan / militer yang sedang berlangsung antara kedua negara termasuk edukasi, kunjungan pejabat, forum dialog dan industri pertahanan.***

MENHAN PRABOWO HADIRI ROLL-OUT CEREMONY PESAWAT TEMPUR KF-X



Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat (9/4), menghadiri Roll-Out Ceremony dari prototipe jet tempur generasi selanjutnya KF-X / IF-X di Korea Selatan

Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat (9/4), menghadiri Roll-Out Ceremony dari prototipe jet tempur generasi selanjutnya KF-X / IF-X di Korea Selatan. Acara tersebut diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Korea Moon Jae-In, didampingi Menteri Pertahanan Republik Korea Suh Wook dan Menteri Defense Acquisition Program Administration

(DAPA) Kang Eun-Ho. Menhan Prabowo hadir pada acara ini atas undangan Pemerintah Republik Korea atas nama Pemerintah RI.

Dalam Roll-Out Ceremony KF-X / IF-X ini, Presiden RI Joko Widodo turut memberikan sambutannya secara virtual di mana ia menyampaikan ucapan selamat atas peluncuran pertama prototipe pesawat tempur KFX. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi

"Roll-Out Ceremony dari prototipe jet tempur generasi selanjutnya KF-X / IF-X di Korea Selatan.



menjelaskan bahwa sejak 2010 Indonesia dan Republik Korea telah menandatangani MoU tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX dan IFX untuk memenuhi kebutuhan alutsista berupa pesawat tempur kedua negara dalam waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

Karena itu, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada seluruh entitas di Republik Korea atas peluncuran pertama prototipe pesawat tempur KFX. Presiden Jokowi

berharap prototipe pertama ini dapat menjadi "landmark moment" bagi negara Korea secara umum dan secara khusus bagi industri penerbangan Korea.

Presiden Jokowi juga mengharapkan kesuksesan peluncuran pertama prototipe KFX ini agar dapat terus memberikan manfaat positif untuk kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea.***



MENHAN PRABOWO SERAHKAN PESAWAT KARYA ANAK BANGSA CN 235-220 KEPADA AU SENEGAL

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersama Chief of Air Force of Senegal BG Papa Souleymane SARR, didalam kabin pesawat CN235-220 MPA, saat penyerahan Pesawat karya anak bangsa CN235-220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal, dari Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Kamis (18/3).

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyerahkan Pesawat karya anak bangsa CN235-220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal, dari Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) di Bandung, Kamis (18/3). Turut hadir dalam acara tersebut Chief of Air Force of Senegal BG Papa Souleymane SARR, Direktur Utama (Dirut) PT. DI Elfien Goentoro, dan Dirut PT NTP Tarmizi Kemal Fasya Lubis.

Menhan Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan Pesawat CN235-220 MPA kepada AU Republik Senegal ini patut dibanggakan karena pesawat kali ini adalah pesawat ketiga yang dibeli oleh negara tersebut. "PT. DI adalah kebanggaan bagi Indonesia. PT. DI adalah harapan bangsa Indonesia,

Kita sangat membutuhkan teknologi kedirgantaraan, aerospace industry. Ini adalah industri masa depan, Industri yang paling sulit dan yang paling canggih," tegas Menhan RI.

Menhan Prabowo melanjutkan dalam sambutannya, PT. DI sebenarnya pernah jadi pelopor dalam kebangkitan industri Indonesia pada tahun 90an tetapi akibat dinamika politik dunia, arah pengembangan PT. DI mengalami rintangan-rintangan. Namun patut disyukuri, di tengah tantangan selama 20 tahun terakhir ini, PT.DI berhasil bertahan dan masih berhasil untuk menjual produk pesawat dan helikopternya. Kementerian Pertahanan bertekad agar PT.DI dapat bangkit kembali ke tempat semula.



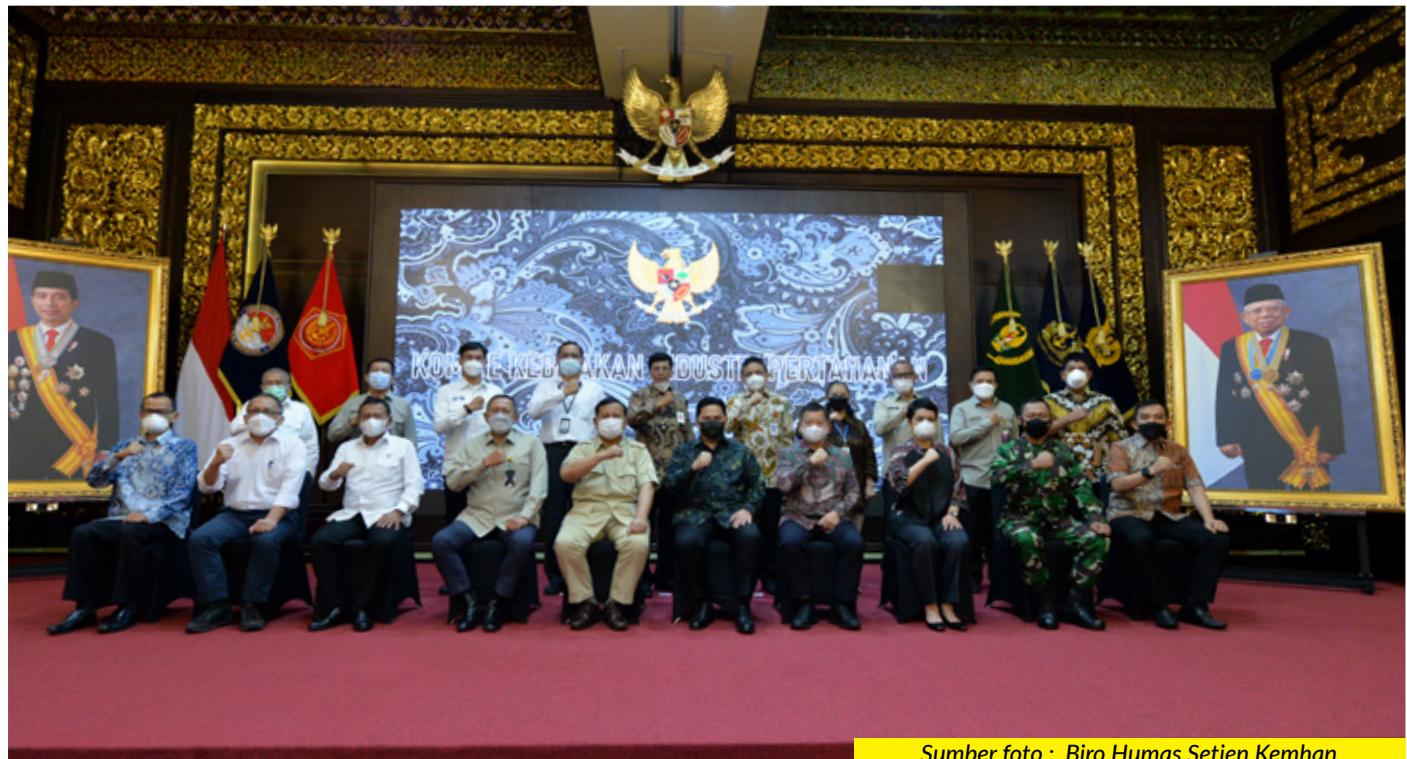
Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

"Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk mendorong PT.DI dan industri pertahanan lainnya. Untuk bersungguh-sungguh mendukung agar PTDI bisa mengambil tempat sebagai pelopor kembali di Asia Tenggara bahkan Asia", ujar Menhan Prabowo.

Sementara itu *Chief of Air Force of Senegal* Papa Souleymane SARR menyatakan dalam kesempatan tersebut bahwa Republik Senegal telah menggunakan pesawat produksi PT. DI selama 10 tahun dan pesawat kali ini adalah yang ketiga. Pesawat CN235-220 MPA ini menurutnya adalah salah satu yang spesial karena digunakan sebagai patrol airplane, berbeda dengan dua pesawat sebelumnya. "Kami berharap mendapatkan kepuasan yang sama dengan yang dua pesawat sebelumnya" jelas Kasau Senegal.

Chief of Air Force of Senegal melanjutkan, kerjasama Senegal dan Indonesia selama ini telah terjalin sangat baik karena terdapat kesamaan kultur antara kedua negara. Senegal terus berupaya mencari peluang terbaik untuk bertukar pengalaman dan kerjasama ke depannya dengan Indonesia.***

MENHAN PRABOWO PIMPIN RAPAT PLENO KKIP TAHUN 2021



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Foto Bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa, Wamenhan RI M. Herindra, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo dan beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, Kamis (20/5) di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021, Kamis (20/5) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Agenda pada rapat tersebut di antaranya adalah pembahasan tindak lanjut arahan dari Presiden RI selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor, tanggal 13 April 2021.

Hadir pada Rapat Pleno KKIP tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan RI M. Herindra selaku Sekretaris KKIP, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.

Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yang mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.

Untuk menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri, Menhan Prabowo dalam sambutannya menyampaikan beberapa arahan dari Presiden RI yang disampaikan pada Sidang KKIP April lalu, di antaranya adalah perlunya kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021, Kamis (20/5) di Kementerian Pertahanan, Jakarta Rapat Pleno KKIP.

"Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli – ahli di bidang elektronika", jelas Menhan Prabowo.

Selanjutnya adalah arahan Presiden bahwa paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, *transfer of technology*, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alat-alat militer dari luar negeri," kata Menhan.

Untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, Menhan menambahkan perlunya suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yakni dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang. "Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun," ujar Menhan.

Adapun Menhan Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.***

RI-JEPANG TANDATANGANI PERJANJIAN TENTANG PENGALIHAN ALAT DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Selasa (30/3), melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang YM Yoshihide Suga, di Tokyo, Jepang. Kunjungan kehormatan kepada PM Jepang ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Menhan RI ke Jepang. Dalam lawatan ini, Menhan RI juga melaksanakan pertemuan 2 + 2 yaitu pertemuan bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI - Jepang.

Perdana Menteri Suga menyambut baik kunjungan Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Pertahanan

Prabowo ke Jepang serta menyampaikan harapan bahwa Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan yang ditandatangani pada hari yang sama, Selasa (30/3), akan menjadi landasan kerja sama keamanan yang lebih dalam antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan.

Selain itu, dibahas pula mengenai pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang Bantuan Kemanusiaan dan Kerja Sama Bantuan Bencana (*Humanitarian Assistance and*



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi dan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi/Ist.



Foto : Dokumen Pribadi Menhan RI

Disaster Relief-HADR). Topik ini sangat penting mengingat kedua negara sering menghadapi berbagai bencana alam sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani bencana.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Jepang 2 + 2 tahun ini, telah dibahas beberapa topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional. Untuk mendukung misi tersebut, perlu membangun jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional dengan negara sahabat seperti Jepang. Dalam kegiatan 2+2 ini, Menhan RI juga menandatangani Perjanjian kerjasama Alih Alutsista dan Teknologi yang menandai dimulainya kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang.

Selain melaksanakan pembicaraan mengenai industri pertahanan, pertemuan 2+2 juga membahas kerjasama militer diantaranya; bidang pendidikan, kunjungan pejabat, serta forum dialog sesuai dengan ruang lingkup Nota Kerja Sama dan Pertukaran Bidang Pertahanan 2015. Selain itu, Menhan RI juga mendorong terwujudnya latihan bersama antar kedua angkatan bersenjata.***



WAMENHAN HARAPKAN INDHAN INDONESIA CAPI TARGET 50 PERUSAHAAN TERATAS DUNIA

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengikuti *Focus Group Discussion (FGD)* Klaster BUMN Industri Pertahanan (Indhan) Indonesia secara virtual, di Kemhan, Jakarta, Rabu (24/3). Penyelenggaraan FGD ini merupakan satu rangkaian proses penggabungan Industri Pertahanan (Indhan) dalam negeri dalam satu wadah dengan nama *Indonesia Defence Club (IDC)*.

Dalam sambutannya secara virtual, Wamenhan menyatakan menyambut baik penyelenggaraan FGD, yang bertujuan menginventarisir aspirasi para pelaku industri pertahanan, dengan harapan dapat mencapai target menjadi 50 perusahaan teratas dunia di bidang pertahanan pada tahun 2024.

Sedangkan untuk mendukung target tersebut lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan payung hukum sebagai landasan, yang mencakup Industri Pertahanan, Imbal Dagang Industri Pertahanan, Pembinaan Industri Pertahanan, Pengadaan Alat Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kemhan dan TNI serta UU Cipta Kerja.

“Semuanya harus saling besinergi antar stakeholders pertahanan dan BUMN Indhan, sehingga melalui moment ini diharapkan menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan,” tegas Wamenhan M. Herindra.

Selain Kemhan, FGD *Indonesian Defence Club (IDC)* yang mengangkat Tema “Kapabilitas dan Kapasitas BUMN Industri Pertahanan dalam Mendukung Pemenuhan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Nasional”, juga diikuti klaster Industri Pertahanan dari Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta Mabes Polri.

Sedangkan materi yang dibahas pada FGD, berkisar pada Kebijakan dan Perencanaan Alpalhankam, Teknologi dan Riset & Inovasi, serta Komitmen Industri Pertahanan dan Peningkatan Komponen Dalam Negeri (TKDN). ***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Peserta Focus Group Discussion (FGD) Klaster BUMN Industri Pertahanan (Indhan) Indonesia secara virtual, di Kemhan, Jakarta, Rabu (24/3).

INDONESIA MENGAJAK NEGARA-NEGARA ASEAN DAN NEGARA PARTNER ASEAN UNTUK BEKERJASAMA TANGANI DAMPAK PANDEMI



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Kamis (8/4) mengikuti Pertemuan ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus secara virtual di Kemhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Kamis (8/4) mengikuti Pertemuan ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus secara virtual yang dipimpin oleh tuan rumah Brunei Darussalam Brigadier General (Rtd) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah, Permanent Secretary Ministry of Defence, di Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini diikuti oleh masing-masing Ketua ADSOM beserta delegasi serta Deputy Secretary-General of the ASEAN Political-Security Community for 2021-2024 H.E. Robert Matheus Michael Tene yang baru menjabat. ADSOM-Plus melanjutkan momentum kerja sama pertahanan dan mendukung lebih lanjut pekerjaan tersebut, yang dimulai dengan ADSOM-Plus WG pada 4 Februari 2021.

ADSOM-Plus merupakan pertemuan persiapan terakhir untuk ASEAN Defence Ministers 'Meeting Plus (ADMM-Plus) yang akan dipimpin oleh Brunei Darussalam untuk iterasi ke-8 yang akan dilaksanakan secara online pada 16 Juni 2021. Dalam pertemuan ini, Sekjen Kemhan Marsdyo TNI Donny Ermawan

Taufanto, M.D.S., memaparkan pandangan Indonesia terhadap isu terkini kawasan seperti penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan upaya Indonesia dalam menangani tantangan non tradisional terorisme. Sekjen Kemhan RI mengajak seluruh negara-negara ASEAN dan negara partner ASEAN untuk bekerjasama bergandengan tangan mengatasi dampak Pandemi Covid-19.

Dalam menghadapi tantangan keamanan global non tradisional seperti terorisme, Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam mempromosikan kerjasama Internasional dalam konter-terorisme. Indonesia bertujuan untuk mempromosikan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Di bawah ADMM ASEAN Our Eyes sebagai program pertukaran informasi strategis dalam konter-terorisme yang merupakan inisiatif Indonesia, memberikan penekanan upaya Indonesia dalam komitmen kolektif ASEAN untuk menghadapi ancaman terorisme di kawasan.

Pertemuan tersebut mencatat laporan dari ADSOM-Plus WG, di mana co-chair dari 7 Kelompok Kerja Ahli ADMM-Plus (ADMM-Plus EWGs) berbagi kemajuan masing-masing EWG; dan perpanjangan siklus saat ini hingga kuartal pertama tahun 2024. Selain itu, pertemuan tersebut juga memberikan kesempatan bagi Pimpinan ADSOM-Plus untuk bertukar pandangan tentang lingkungan keamanan regional dan internasional. ADSOM Plus kali ini diikuti oleh delegasi negara-negara ASEAN serta negara-negara partner ASEAN diantaranya Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, RRT, India, Jepang, New Zealand, Rusia. ***

IRJEN KEMHAN PIMPIN SERTIJAB SEKRETARIS DAN INSPEKTUR I ITJEN KEMHAN



Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Jumat (7/5), memimpin Pengangkatan Sumpah, Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Sekretaris Itjen Kemhan dan Inspektur I Itjen Kemhan, di Kemhan, Jakarta.

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Jumat (7/5), memimpin Pengangkatan Sumpah, Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Sekretaris Itjen Kemhan dan Inspektur I Itjen Kemhan, di Kemhan, Jakarta. Jabatan Ses Itjen Kemhan diserahterimakan dari Brigjen TNI Dwi Mastono, S.E., M.M., kepada Brigjen TNI Rahmat Triyono, S.E., dan Inspektur I Itjen Kemhan dari Brigjen TNI Rahmat Triyono, S.E., kepada Kol. Cba Gatot Murdiyantoro, S.E. Selanjutnya, Brigjen TNI Dwi Mastono, S.E., M.M., akan menjalankan tugas barunya di Universitas Pertahanan.

Irjen Kemhan dalam sambutannya menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan merupakan unsur pelaksana tugas menteri pertahanan dalam bidang pengawasan internal di lingkungan Kemhan. Tugas tersebut dapat terwujud apabila diawaki oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas, integritas, loyalitas dan wawasan yang luas serta mampu memahami dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

"Karena itulah, jabatan Ses dan Inspektur I Itjen Kemhan harus dipercayakan kepada personel yang memiliki

kompetensi dan kualitas terbaik untuk mengemban tugas-tugas tersebut", kata Irjen.

Dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung secara sederhana ini, Irjen Kemhan juga menjelaskan bahwarotasipenugasan merupakan hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi dan merupakan salah satu upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan pengangkatan suatu jabatan di lingkungan Itjen Kemhan merupakan implementasi pembinaan personel untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berpikir dihadapkan pada pelaksanaan

tugas pokok dan organisasi agar tetap berjalan secara dinamis.

Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana menilai tugas yang diemban oleh Brigjen TNI Dwi Mastono dan Brigjen TNI Rahmat Triyono telah berjalan dengan baik dilihat dari hasil kinerja selama ini dan mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerja keras yang sudah diberikan selama ini sehingga mampu meningkatkan kinerja Itjen Kemhan. Kepada Kol. Cba Gatot Murdiyantoro yang menerima promosi selaku pejabat baru Inspektur I Itjen Kemhan, Irjen Kemhan berharap tugas dan jabatan yang telah diemban selama ini dapat dijadikan modal awal dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur I, sehingga dapat menciptakan kondisi Itjen Kemhan ke depan lebih berkembang dan lebih maju serta dapat mendinganisasikan situasi perkembangan yang sedang berjalan untuk dapat menciptakan atmosfir kerja yang lebih kondusif, namun tetap dalam suasana kekeluargaan untuk kemajuan Itjen Kemhan. ***

Karo Humas Setjen Kemhan Ajak Awak Media Lihat Capaian Produk Alpalhankam PT Pindad

Dalam rangkaian kegiatan Defence Tour 2021, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Marsma TNI Penny Radjendra ST., M.Sc., M.Sc. dan Asisten Khusus Menhan Bidang Media dan Hubungan Lembaga Ghina Ghaliya Quddus, bersama beberapa Wartawan Media Massa Nasional berkesempatan mengunjungi PT Pindad (Persero), Selasa (30/3) di Bandung.

Kegiatan Defence Tour 2021 diselenggarakan oleh Biro Humas Setjen Kemhan dan dilaksanakan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Melalui kunjungan ini, Karo Humas Setjen Kemhan mengajak para awak media melihat secara langsung berbagai capaian kemajuan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Kemanan (Alpalhankam) yang telah mampu diproduksi

oleh PT Pindad.

Kedatangan rombongan Defence Tour 2021 diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose dan jajarannya. Diawali dengan paparan singkat oleh Dirut PT Pindad, kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke fasilitas produksi PT Pindad dan diakhiri dengan kegiatan menembak.

Karo Humas Setjen Kemhan mengatakan, melalui kegiatan Defence Tour 2021 ini, diharapkan produk - produk yang selama ini sudah berhasil dicapai oleh PT Pindad, dapat dinarasikan dan dipublikasikan oleh para wartawan secara lebih luas ke publik baik secara nasional maupun internasional.

Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Menhan, Karo Humas Setjen Kemhan menyampaikan bahwa pada



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Dalam rangkaian kegiatan Defence Tour 2021, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Marsma TNI Penny Radjendra ST., M.Sc., M.Sc. dan Asisten Khusus Menhan Bidang Media dan Hubungan Lembaga Ghina Ghaliya Quddus, bersama beberapa Wartawan Media Massa Nasional berkesempatan mengunjungi PT Pindad (Persero), Selasa (30/3) di Bandung.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Karohumas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra S.T, MSc., M.Sc. menerima cendramata dari direktur utama PT. Pindad (persero) Abraham Mosse.

dasarnya pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi segenap komponen bangsa. Dan industri pertahanan adalah salah satu komponen pendukung utama dalam majunya sebuah pertahanan negara.

"Disisi lain untuk para jurnalis juga nantinya diharapkan dapat mampu menjadi kepanjangan tangan dari upaya – upaya kita secara mandiri sehingga negara ini semakin lebih kuat di bidang pertahanan negara", tambah Karo Humas Setjen Kemhan.

Sementara itu, Dirut PT Pindad menyampaikan, menyambut baik dan merasa bangga dapat menerima kunjungan rombongan Defence Tour 2021 dari Biro Humas Setjen Kemhan, yang diharapkan akan dapat turut membantu mensosialisasikan bagaimana kemajuan dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri khususnya dalam hal ini PT Pindad.

Lebih lanjut Dirut PT Pindad menjelaskan berbagai produk-produk Alpalhankam yang diproduksi oleh PT Pindad, mulai dari berbagai varian senjata, munisi, kendaraan fungsi khusus, kendaraan tempur, kendaraan taktis hingga medium tank. "Selain itu, Pindad juga memproduksi produk – produk industrial diantaranya

memproduksi alat berat excavator, dikenal dengan Excava 200 yang sudah lumayan banyak dijual", tambah Dirut PT Pindad.

PT Pindad juga memproduksi tabung gas untuk Pertamina, generator dan mesin listrik, alat – alat mesin pertanian hingga infrastruktur perhubungan untuk kereta api dan peralatan kapal laut serta jasa pertambangan umum.

Dirut PT Pindad mengungkapkan bahwa target arah transformasi PT Pindad kedepan adalah bagaimana menjadi salah satu dari 100 perusahaan industri pertahanan terbaik global di tahun 2024.

Turut serta mendampingi Karo Humas Setjen Kemhan pada kegiatan Defence Tour 2021 tersebut antara lain Kabag Opini Rohumas Setjen Kemhan Kol. Inf. Drs. Silvester A T, M.A., Kabag Infopublikata Rohumas Setjen Kemhan Kol. Laut (P) Hadi Prayitno, Kabag Pemberitaan Biro Humas Setjen Kemhan Kol. Arm. Joko Riyanto, dan Kasubbag Hubmedmas Bag Pemberitaan Rohumas Setjen Kemhan.***

BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN LUNCURKAN PODCAST KEMHAN “DEFENCE’S ADVOCATE”



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN

“Pertahankan ketenangkausana
sebalas-balasnya. Sejengkal tunjuk
pun tidak akan kita serahkan kepada
lawan, tetapi akan kita pertahankan
habis-habisan. Meskipun kita tidak
gentar akan gentukan lawan itu, tetapi
kita pun harus selalu siap-saji.”
Jenderal Sudirman



perekaman podcast edisi pertama, Selasa (13/4) di studio Podcast Biro Humas Setjen Kemhan yang menghadirkan pengamat Politik dan Hubungan Internasional, Dr. Dinna Prapto Raharja, , serta Karo Humas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc., mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Selasa (13/4), meresmikan *Podcast* Kemhan di Aula Biro Humas Gedung A.H. Nasution Lt 9 Kemhan, Jakarta. Peresmian *Podcast* Kemhan ini ditandai dengan pelaksanaan perekaman *Podcast* edisi pertama di studio *Podcast* Biro Humas Setjen Kemhan yang menghadirkan Dr. Dinna Prapto Raharja, pengamat Politik dan Hubungan Internasional, serta Karo Humas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.

Dalam amanat Sekjen Kemhan yang dibacakan oleh Karo Humas Setjen Kemhan dijelaskan bahwa kegiatan kehumasan di tengah perkembangan Teknologi Informasi perlu dikemas secara kreatif dan inovatif, karena kegiatan tersebut merupakan ujung tombak dalam membangun citra positif serta meningkatkan kepercayaan publik. Dalam bidang pemerintahan, *Podcast* dapat dikategorikan sebagai inovasi atau ide kreatif dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah dan cerminan reformasi birokrasi. Inilah salah satu keunggulan dari *podcast*.

Sekjen Kemhan melanjutkan, karena hal itulah, tepat bila Kemhan mengambil langkah inovatif dalam penerapan kegiatan kehumasan dengan menambah jalur penyampaian informasi digital berupa *podcast*. *Podcast* ini akan menjadi sarana desiminasi informasi dan literasi terhadap pertahanan negara, terutama kaum milenial. Sekjen Kemhan berharap, dengan peresmian *podcast* ini program Kerja Kemhan seperti komponen cadangan, bela negara dapat tersampaikan dengan baik dan tepat kepada publik.

Kepada seluruh Kasatker/Subsatker, Sekjen Kemhan menekankan untuk pergunakan fasilitas penyampaian informasi ini secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap pertahanan negara yang nantinya akan berdampak pada partisipasi publik dalam menyukseskan program-program Kemhan. Hal tersebut akan berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hadir dalam acara peresmian *Podcast* Kemhan, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan Brigjen TNI Aufit Chaniago, S.I.P., Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung N., S.H., M.H., dan Kepala Biro Ortala Setjen Kemhan Brigjen TNI Antonius Bambang Budi Wibowo.***

KAPAL SELAM BUATAN DALAM NEGERI KRI ALUGORO-405 PERKUAT ALUTSISTA TNI AL



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah merampungkan pembangunan Kapal selam pertama buatan industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan.

Kapal Selam yang diberi nama Alugoro-405 diserahterimakan oleh DSME kepada Kemhan, selanjutnya diserahkan kepada Mabes TNI dan berturut turut kepada Mabes TNI AL dan Pangkoarmada II selaku pengguna, Rabu (17/3) di PT PAL Indonesia, Surabaya.

Dalam prosesi penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kapal Selam tersebut, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengapresiasi hal ini sebagai tonggak historis di mana untuk pertama kalinya galangan kapal milik perusahaan nasional, PT PAL berhasil ikut serta dalam produksi kapal selam.

"Kita sadari bersama betapa pentingnya pertahanan kita. Kita sedang membangun

kemampuan pertahanan kita. Bukan karena kita ingin gagah-gagahan. Bukan karena kita ingin mengancam siapapun. Tidak. Berkali-kali, turun termurun dari pendiri bangsa kita, kita tegaskan bahwa bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan," tegas Menhan Prabowo.

Di hadapan seluruh tamu undangan, Menhan mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan, melindungi segenap tumpah darah, kesatuan dan keutuhan wilayah dari ancaman tentara negara asing. "Hari ini merupakan selangkah ke depan bagi kita semua untuk membangun tentara kita ke arah yang lebih kuat lagi," tambahnya.

Melalui perencanaan strategis mengenai modernisasi alutsista, Menhan Prabowo sesuai amanah Presiden Jokowi telah memerintahkan bahwa seluruh industri pertahanan dalam negeri wajib diikutsertakan dalam proses peremajaan seluruh alat pertahanan negara.

Menhan Prabowo memaparkan bahwa alat pertahanan banyak yang sudah sangat tua dan sudah

Serah terima Kapal Selam Alugoro-405 oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea, kepada Kemhan dan selanjutnya diserahkan kepada Mabes TNI AL dan berturut-turut kepada Mabes TNIAL dan Pangkoarmada II selaku pengguna, Rabu (17/3) di PT. PAL Indonesia Surabaya.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

saatnya diremajakan. Untuk itu, peran dari industri pertahanan akan sangat menonjol. "Kita harap peran serta, inisiatif, kerja keras teknolog-teknolog kita, sarjana-sarjana kita, cendekiawan kita, dari ahli-ahli kita. Kita harap semua bersatu untuk kerja keras," tegasnya.

Pengadaan Kapal Selam Alugoro-405 merupakan salah satu program pembangunan kekuatan pertahanan khususnya Matra Laut. Sebelum Alugoro-405, Kemhan telah serahterimakan kapal selam pertama KRI Nagapasa-403 dan kapal selam kedua KRI Ardadedali -404 yang dibangun di Korea kepada TNI AL. Dengan telah diserahterimakannya Kapal Selam Alugoro-405 ini, Menhan Prabowo yakin bahwa kapal selam ketiga pesanan Kemhan tersebut dapat memperkuat Alutsista TNI khususnya di jajaran TNI AL.

Hal ini juga turut menjadi capaian membanggakan sekaligus meningkatkan *deterrent effect* bagi pertahanan negara Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Pembangunan kapal selam ini mengikutsertakan

proses Transfer of Technology kepada PT PAL Indonesia (Persero).

Hadir menyaksikan penandatangan Berita Acara Serah Terima Kapal Selam KRI Alugoro-405, Menteri Pertahanan, Minister for the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel Gang Eun-Ho, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Menteri BUMN yang diwakili, Dubes Korsel untuk Indonesia Park Tae-sung, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Kabaranahan Kemhan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari serta sejumlah pejabat Kemhan, serta beberapa pejabat perwakilan dari instansi terkait lainnya.***



28

PERAN PUSAT KELAIKAN KEMHAN DALAM PERTAHANAN NEGARA

Oleh: Kolonel. Tek Suparman S.T
Inspektor Kelaikan Madya Moda Udara Puslaik Kemhan

Pendahuluan

Pusat Kelaikan Kemhan atau sering disingkat Puslaik Kemhan adalah eselon pelaksana Menteri Pertahanan (Eselon II) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekjen Kemhan. Kepala Pusat Kelaikan (Kapuslaik) Kemhan saat ini Laksamana Pertama TNI Teguh Sugiono, S.E., M.M., alumni Akabri Laut Tahun 1990 sudah memimpin Puslaik sejak pertengahan tahun 2019.

Berbicara kelaikan negara/ pertahanan/militer, umumnya masyarakat Indonesia, masih terbatas mengenal akan eksistensi Puslaik Kemhan dalam sertifikasi kelaikan produk non-sipil terutama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) termasuk militer, tidak seperti halnya peran Kementerian Perhubungan yang merupakan single worthiness authority kelaikan dalam mensertifikasi moda transportasi sipil dan pendukungnya di tanah air.

Puslaik Kemhan merupakan otoritas kelaikan yang mewakili pemerintah dan negara, dan bukanlah otoritas tunggal untuk sertifikasi kelaikan semua Alpalhankam di tanah air, terdapat otoritas lainnya di lingkungan TNI yaitu Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Dislaikad) untuk TNI AD, Dinas Kelaikan Materil Angkatan Laut (Dislaikmatal) untuk TNI AL dan Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja Angkatan Udara (Puslaiklambangjaau) untuk TNI AU.

Meskipun sudah berkiprah cukup lama, saat ini Peran Strategis Puslaik Kemhan sebagai otoritas negara belum terpublikasi cukup baik, dan masih terdapat permasalahan utama antara lain permasalahan regulasi/standar, permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan sinergitas antara stakeholder, serta perlunya mempertimbangkan validasi organisasi untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Puslaik Kemhan kedepan.

Sejarah Puslaik Kemhan

Di hampir semua negara, kelaikan negara atau kelaikan militer (selain kelaikan sipil), selalu menginduk kepada Kementerian atau Departemen Pertahanan,

yang di Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikenal dengan nama Departemen Pertahanan yang merupakan salah satu dari 12 Departemen yang dibentuk sebagai bagian dari Kabinet Presidensial saat itu.

Tidak terdapat informasi pasti sejak tahun berapa tugas dan fungsi kelaikan ada di bawah Kementerian Pertahanan, tetapi diperkirakan eksistensi kelaikan militer dimulai pada awal tahun 1980-an sejak mulai bergeliatnya industri pertahanan di tanah air seperti IPTN, PAL dan Pindad.

Permenhan No. 1 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, bahwa Direktorat Jendral Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan yang disebut Dirjen Ranahan Dephan, memiliki Direktorat Standardisasi dan Kelaikan (Dirstandlaik). Validasi organisasi Kemhan, berdasarkan Permenhan Nomor. 16 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, terdapat perubahan nomenklatur dari Dirjen Ranahan menjadi Badan Sarana Pertahanan (Baranahan), dan Dirstandlaik juga berubah menjadi Pusat Kelaikan (Puslaik) Baranahan Kemhan. Tahun 2019, berdasarkan Permenhan Nomor. 14 Tahun 2019, terjadi perubahan struktur organisasi Puslaik yang awalnya berada di bawah Baranahan, pindah menjadi Pusat Kelaikan yang langsung di bawah Menteri Pertahanan.

Organisasi Puslaik Kemhan

Berdasarkan Permenhan 14 tahun 2019, Puslaik Kemhan adalah salah satu Pusat dari 4 Pusat pendukung Menteri Pertahanan yang berkedudukan langsung di bawah Menteri Pertahanan. Puslaik bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO di Lingkungan Kemhan/TNI di bidang sertifikasi rancangan bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan konstruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat, laut dan matra udara serta sertifikasi personel penyelenggara kelaikan militer.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puslaik Kemhan memiliki 3 Bidang sebagai otoritas pelaksana

sertifikasi kelaikan, yang bekerja sesuai dengan jenis wahana/moda obyek yang akan disertifikasi, bukan sesuai dengan Matra yang ada di TNI.

Pertama, Bidang Kelaikan Darat (Bidlaikrat), bertugas melaksanakan sertifikasi kelaikan Alpalhankam dan fasilitas Alpalhankam moda/wahana darat yang digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Bidlaikrat merupakan otoritas kelaikan darat yang merepresentasikan pemerintah dan negara, yang secara internasional dikenal dengan *Indonesia Military Landworthiness Authority (IMLA)*.

Kedua, Bidang Kelaikan Laut (Bidlaikla), bertugas melaksanakan sertifikasi kelaikan Alpalhankam dan fasilitas Alpalhankam moda/wahana laut yang digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Bidlaikla merupakan otoritas kelaikan laut yang

merepresentasikan pemerintah dan negara, yang secara internasional dikenal dengan *Indonesia Military Seaworthiness Authority (IMSA)*.

Ketiga, Bidang Kelaikan Udara (Bidlaikud), bertugas melaksanakan sertifikasi kelaikan Alpalhankam dan fasilitas Alpalhankam moda/wahana udara yang digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Bidlaikud merupakan otoritas kelaikan udara yang merepresentasikan pemerintah dan negara, yang secara internasional dikenal dengan *Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA)*.

Objek & Mekanisme Kelaikan Pertahanan

Obyek kelaikan akan mempengaruhi cara atau mekanisme sertifikasi yang akan dilakukan. Secara umum obyek kelaikan dibagi dalam dua kelompok



Sumber foto : Puslaik Kemhan

Sertifikasi kelaikan MLRS Avibras

besar yaitu Alpalhankam atau produk itu sendiri dan kedua adalah berbagai fasilitas yang akan mendukung Alpalhankam tersebut.

Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan termasuk materil pendukung untuk mendukung pertahanan negara, merupakan obyek utama sertifikasi kelaikan. Alpalhankam diklasifikasikan menjadi Alpalhankam baru hasil modifikasi/rancang bangun, Alpalhankam hasil produksi, dan Alpalhankam hasil pemeliharaan.

Sedangkan obyek sertifikasi berupa fasilitas adalah segala fasilitas dari suatu organisasi/institusi/instansi yang memiliki *Quality Management System* (QMS) yang baik, yang dapat mendukung siklus hidup dari Alpalhankam. Fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas desain Alpalhankam, fasilitas produksi Alpalhankam, fasilitas pemeliharaan Alpalhankam, dan fasilitas operasional Alpalhankam yang semuanya harus memenuhi standar tertentu agar mempunyai kemampuan dalam mempertahankan Alpalhankam dalam kondisi laik.

Mekanisme pelaksanaan kelaikan sangat tergantung dari obyek yang akan disertifikasi, tetapi secara umum kegiatan yang dilakukan dimulai dari pemeriksaan atau *review* dokumen, *conformity inspection* atau pemeriksaan kesesuaian serta pengujian. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara berurutan agar proses sertifikasi dapat akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Inspektor Kelaikan

Puslaik Kemhan dalam melaksanakan tugas sertifikasi didukung oleh para Inspektur Kelaikan yang di bentuk dan di bina oleh Puslaik Kemhan. Saat ini Puslaik telah membentuk sekitar sekitar 1747 inspektur kelaikan militer Kemhan, terdiri dari 670 Inspektur Kelaikan Darat, 544 Inspektur Kelaikan Laut, dan 533 Inspektur Kelaikan Udara. Para inspektur ini sebagian besar tersebar di TNI/Angkatan, dan dapat digunakan sebagai Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan Militer Kemhan melalui mekanisme BKO (bawah komando operasi) sesuai dengan bidang kualifikasinya.

Secara jumlah, inspektor memang terlihat banyak, tetapi yang efektif mungkin hanya sekitar 40%, hal ini sebabkan antara lain karena pensiun, sudah menjadi Pati/Kolonel, menduduki jabatan strategis, sudah tidak bekerja pada bidang kualifikasinya, tidak mendapat ijin, dan lain-lain. Jumlah ini juga akan berkurang lagi bila dihadapkan dengan banyaknya jumlah kegiatan dan banyaknya jenis kualifikasi yang dibutuhkan untuk mensertifikasi suatu obyek kelaikan.

Sejak tahun 2016, pola pembinaan inspektur kelaikan militer Kemhan menerapkan tingkatan inspektur, dimana Inspektur Tingkat I dapat mensertifikasi produk seris, Inspektur Tingkat II dapat mensertifikasi produk seris dan produk rancang bangun atau modifikasi, dan Inspektur Tingkat III akan mensertifikasi produk seris, produk rancang bangun atau modifikasi, dan *Quality Management System* (QMS) suatu Instansi.

Kondisi saat ini, karena prioritas anggaran, Puslaik Kemhan masih terbatas untuk membentuk Inspektur Tk II, dan bahkan belum memiliki Inspektur Tingkat III, sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tingkat I, tetapi dengan pemilihan kualifikasi yang sesuai dan pertimbangan pengalaman kerja.

Peran Puslaik Kemhan dalam Pertahanan Negara

Membahas peran Puslaik atau Kelaikan itu sendiri dalam pertahanan negara sangat terkait dengan peraturan diatasnya terutama UU Pertahanan dan UU Industri Pertahanan, termasuk beberapa UU terkait lainnya seperti UU Penerbangan dan UU Pelayaran.

Pertahanan Negara

Sesuai UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002, Pertahanan Negara (Hanneg) adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem Hanneg juga bersifat semesta, artinya dapat melibatkan seluruh warga, wilayah, dan sumber

daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut. Pertahanan negara terdiri atas 3 komponen utama yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan (sumber daya yang telah disiapkan) dan komponen pendukung (sumber daya nasional lainnya).

Dalam UU pertahanan, lebih spesifik disebutkan bahwa salah satu bentuk pembinaan kemampuan pertahanan adalah melalui penelitian dan pengembangan industri pertahanan dan teknologi pertahanan, dan hal ini diperkuat oleh UU Industri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012, di mana kebijakan pengelolaan Indhan mengharuskan adanya sertifikasi fasilitas Indhan dan kelaikan produk hasil Indhan.

Bila dicermati pengertian-pengertian di atas, terdapat dua kesimpulan umum. Pertama bahwa lingkup pertahanan negara cukup luas tidak hanya di lingkungan Kemhan dan TNI, terutama dengan adanya komponen pendukung dan komponen cadangan. Kedua, bahwa Indhan dan teknologi hasil Indhan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan, sehingga memiliki kualitas dan kemampuan, serta keamanan dalam beroperasi seperti yang dipersyaratkan.

Sertifikasi Kelaikan.

Cukup banyak referensi mengenai arti Kelaikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelaikan berasal dari kata dasar laik yang artinya memenuhi persyaratan yang ditentukan, atau yang harus ada; patut, pantas, layak. Dari beberapa referensi, kelaikan pada intinya adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan, sesuai dengan desain dan fungsi asasnya, serta aman untuk dioperasionalkan.

Sedangkan sertifikasi, menurut KBBI adalah penyertifikatan, dan sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Dalam dunia kelaikan sesuai Permenhan 33 Tahun 2014 tentang Kelaikan Militer, sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (aplikan)

Pelaksanaan sertifikasi Kelaikan fasilitas galangan PT. Batamec di Tanjung Uncang Batam Kep. Riau.



Sumber foto : Puslaik Kemhan

mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan diterbitkan atau dikeluarkan suatu tanda bukti lulus (sertifikat kelaikan).

Kelaikan Sipil vs Kelaikan Negara (Militer)

Setelah membahas Pertahanan Negara dan Sertifikasi Kelaikan, maka perlu diperjelas posisi

Kegiatan Engine Loading pemeriksaan terhadap pondasi kapal dalam rangka pemasangan main engine kapal pada dudukannya.



Sumber foto : Puslaik Kemhan

kelaikan Kementerian Pertahanan di negara Republik Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam suatu negara, secara umum hanya terdapat dua otoritas kelaikan, yaitu otoritas kelaikan sipil dan otoritas kelaikan negara yang di dalamnya termasuk otoritas kelaikan militer.

Di Indonesia, otoritas kelaikan sipil untuk moda transportasi dan pendukungnya, secara umum berada dibawah Direktorat Jenderal -Direktorat Jendral yang ada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan kelaikan non-sipil terutama kelaikan militer di bawah Kementerian Pertahanan melalui Pusat Kelaikan Kemhan dan dibawah TNI melalui

Tim IMAA melaksanakan verifikasi di AIROD Techno Power Malaysia dalam rangka peningkatan kapabiliti PT. Nusantara Turbin dan Proporsi (NTP).



Sumber foto : Puslaik Kemhan

instansi-instansi kelaikan yang ada di TNI/Angkatan yaitu Dislaikad (TNI AD), Dislaimatal (TNI AL) dan Puslaiklambangjaau (TNI AU).

Secara harfiah, kelaikan sipil dan militer pada akhirnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu keselamatan (*safety*), perbedaan mendasar diantara keduanya adalah, kelaikan militer terkadang lebih mengedepankan fungsi dan *performance* dan menurunkan level keselamatan agar fungsi azasi suatu Alpalhankam dapat tercapai, sebagai contoh pesawat tempur terkadang dengan manuver membahayakan harus dilakukan karena fungsinya untuk menghindari pesawat musuh, sementara dalam kelaikan sipil hal tersebut tidak akan pernah dilakukan bila terdapat potensi bahaya terkait keselamatan.

Kewenangan Institusi Kelaikan Kemhan dan TNI

Institusi kelaikan Kemhan dan institusi kelaikan TNI/Angkatan keduanya dapat menyelenggara-kan sertifikasi kelaikan militer dan menerbitkan sertifikat kelaikan, tetapi memiliki tingkat kewenangan yang berbeda.

Puslaik Kemhan, berwenang melaksanakan sertifikasi kelaikan awal (*initial airworthiness*) Alpalhankam berupa sertifikasi/ validasi desain *approval*, dan sertifikasi Alpalhankam produksi seri pengadaan Kemhan sebelum diserahkan kepada TNI/Angkatan atau pengguna lainnya.

Sementara Institusi kelaikan TNI/Angkatan, berwenang melaksanakan sertifikasi kelaikan lanjutan (*continuing airworthiness*) yaitu segala usaha untuk mempertahankan kondisi Alpalhankam selama masa hidupnya tetap sesuai dengan *requirement*, sehingga aman untuk digunakan, artinya bahwa justru peran *continuing airworthiness* akan terus melekat selama masa hidup sebuah Alpalhankam.

Institusi Kelaikan Kemhan merupakan representasi negara atau pemerintah, sehingga sewajarnya berwenang membuat kebijakan strategis yang akan diturunkan oleh Institusi Kelaikan TNI/Angkatan dalam bentuk kebijakan teknis. Institusi Kelaikan Kemhan dapat mewakili negara dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional seperti kerjasama kelaikan antar negara termasuk kegiatan validasi kelaikan negara (militer) ke negara lain, serta dapat mengikutsertakan institusi kelaikan TNI/Angkatan dalam kegiatan tersebut.

Sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh Puslaik Kemhan bersifat lebih universal dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Institusi Kelaikan TNI/Angkatan, hal ini karena Puslaik Kemhan mewakili negara/pemerintah sehingga sebenarnya *approval* Kemhan dapat digunakan oleh institusi kelaikan di TNI/Angkatan bahkan institusi kelaikan negara lain saat melakukan verifikasi kelaikan. Sedangkan sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh institusi

kelaikan TNI/Angkatan lebih berlaku secara internal karena hanya mewakili salah satu Angkatan.

Stakeholder Kelaikan

Berbicara sertifikasi kelaikan, pastinya hanya akan membicarakan 3 (tiga) bagian besar pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu regulator, *manufacturer*, dan operator.

Regulator, dalam hal ini pemerintah atau instansi lainnya yang ditunjuk, bertugas membuat regulasi, peraturan, standar yang akan menjadi acuan dalam proses sertifikasi kelaikan, termasuk akan menjadi pelaksana (Institusi/Otoritas Kelaikan) yang akan menerapkan dan mengawasi pelaksanaannya.

Manufacturer, atau bisa disebut juga produsen adalah pihak-pihak yang melakukan desain, produksi, maupun pemeliharaan dari Alpalhankam, yang nantinya akan menggunakan regulasi/spesifikasi / standar yang telah dibuat oleh regulator, sehingga sesuai dengan *requirement* saat pelaksanaan sertifikasi kelaikan.

Stakeholder terakhir adalah Operator atau User, adalah pihak pemilik, pengguna atau yang mengoperasikan Alpalhankam, sehingga harus menjaga kondisi Alpalhankam tersebut selalu dalam kondisi laik sehingga aman untuk dioperasikan.

Permasalahan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar *stakeholder* maupun di dalam satu *stakeholder*, masih menjadi permasalahan yang terus menerus dicari solusinya. Sinergi yang baik membuat regulasi/ standar yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik dan selalu diperbaharui sesuai kebutuhan, peran Pusat Kelaikan sebagai salah satu Regulator dan Institusi Kelaikan akan sangat menentukan bagaimana sinergitas ini dapat dibangun.

Kelaikan Industri Pertahanan (Indhan)

Menurut UU Indhan No. 16 tahun 2012, Indhan adalah industri nasional yang terdiri dari BUMN dan BUMS, mandiri atau berkelompok, yang ditetapkan pemerintah sebagian atau seluruhnya untuk menghasilkan Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis Hankam yang berlokasi di wilayah NKRI.



Sertifikasi Meriam Kal.155 mm Caesar

Sumber foto : Puslaik Kemhan

Perkembangan Indhan sangat terkait dengan institusi kelaikan suatu negara, keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan harus saling mendukung. Kemajuan Indhan juga akan mempengaruhi kemajuan institusi kelaikan, demikian pula sebaliknya.

Pusat kelaikan berperan sebagai penjamin kualitas Indhan dan produk hasil Indhan melalui proses sertifikasi kelaikan, sehingga memberikan *level confidence* yang tinggi kepada pengguna/pembeli produk Indhan baik di dalam negeri dan terutama pengguna/pembeli negara lain. Inilah harus dilakukan secara terus menerus oleh Indhan untuk terus memberikan *improvement* kepada produk hasil Indhan sehingga secara bertahap akan menjadikan produk tersebut menjadi lebih baik dan “*battle proven*” di mata pengguna.

Regulasi Kelaikan

Kelaikan sangat terkait dengan regulasi, standar, atau referensi dalam bekerja. Pelaksanaan sertifikasi kelaikan mengharuskan adanya regulasi/ standar/ spesifikasi yang menjadi acuan/basis dalam prosesnya. Regulasi Puslaik Kemhan saat ini masih terbilang minim, hanya terdapat satu Peraturan Menteri (Permenhan) dan setiap Bidang (Darat, Laut dan Udara) hanya memiliki 9 -10 Petunjuk Pelaksanaan, hal ini masih tidak sebanding dengan pembagian obyek kelaikan yang begitu kompleks, hal ini tentunya dapat menimbulkan area “abu-abu” dalam proses sertifikasi.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Puslaik Kemhan lebih banyak mengatur bagaimana proses kelaikan itu dilakukan, sementara standar/spesifikasi militer/Alpalhankam yang dapat digunakan oleh para *stakeholder* termasuk otoritas kelaikan belum tersedia, sehingga pelaksanaan saat ini lebih banyak menggunakan standar standar nasional (*sipil*) yang ada atau standar di negara lain yang berlaku secara internasional terutama dari Amerika (*Mil Std*) dan Eropa/NATO (*Stanag*).

Peran Puslaik sebagai regulator/otoritas kelaikan, Puslaik harus banyak mengeluarkan regulasi mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus, sehingga dapat meng-cover semua

obyek kelaikan, dan yang paling penting mempunyai mekanisme yang cepat dalam meng-update regulasi tersebut, karena permasalahan utama saat ini adalah minimnya anggaran untuk dalam pembuatan regulasi di samping dalam organisasi Puslaik saat ini tidak ada bagian yang khusus mengurus pengembangan regulasi kelaikan.

Puslaik dan institusi kelaikan di TNI harus menjadi *leading sector* dalam mensosialisasikan regulasi yang ada, karena pemahaman yang baik akan mekanisme kelaikan secara tidak langsung akan mempengaruhi proses, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas, dan aman untuk dioperasikan sehingga meningkatkan *level of confidence* dari pengguna.***

Daftar Pustaka

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kelaikan Militer Untuk Mendukung Pertahanan Negara
- Filippo De Florio. 2016. “*Airworthiness - An Introduction to Aircraft Certification and Operations*”, Third Edition.
- Chappy Hakim. 2016. “*Menjaga Ibu Pertiwi & Bapak Angkasa - Membangun Pertahanan Keamanan Negara*”.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi Ketiga.

Website

- Sejarah Singkat Kementerian Pertahanan RI, 2020, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/SEJARAH-SINGKAT-KEMHAN.pdf>

Oleh: Muhammad Adi Wibowo, M.Si

Kasubbag Bitprom Bag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan



**KRI NANGGALA-402,
KAMI TITIPKAN KEDAULATAN LAUT INDONESIA
KEPADAKALIAN,
SELAMAT JALAN, SELAMAT BERLAYAR
MENUJU KEABADIAN**

Sejumlah Prajurit TNI AL awak kapal Selam KRI Nanggala 402 berada di atas lambung kapal.



Seluruh bangsa Indonesia belum lama ini tengah di selimuti kesedihan dan duka yang mendalam atas kehilangannya putera terbaik bangsa yang tergabung di dalam TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain merasa kehilangan, negara pun

38 juga berutang budi kepada prajurit awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang diawaki 53 personel dengan Komandan Letkol Laut (P) Heri Oktavian, tanggal 24 April 2021 dinyatakan tenggelam dikedalaman 838 meter di Perairan Bali saat melaksanakan latihan penembakan torpedo.



Photo : Antara / M Risyal Hidayat

Rangkaian ucapan bela sungkawa dari berbagai kalangan pun berdatangan, mulai dari masyarakat biasa hingga penjabat negara hingga masyarakat internasional atas tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 ini.

Termasuk salah satunya datang dari seorang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Melalui akun Instagram resminya @prabowo, Minggu, 25 April 2021, Menhan RI mengucapkan rasa belasungkawa kepada 53 prajurit terbaik KRI Nanggala-402 dan keluarga yang telah di tinggalkan.

"Saya yakin, seluruh pengabdian mereka tidak akan sia-sia. Dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kekuatan. Negara ini berhutang budi terhadap rasa kehilangan yang kalian rasakan ini," demikian ungkap Menhan Prabowo Subianto dalam ucapan dukanya.

Di penghujung ucapan dukanya, Menhan Prabowo Subianto juga memberikan salam penghormatan terakhir kepada para prajurit Satuan Hiu Kencana tersebut. "KRI Nanggala-402, kami titipkan kedaulatan laut Indonesia kepada kalian. Selamat jalan. Selamat berlayar menuju keabadian," tulis Menhan Prabowo.

Selain itu dalam akun Instagram resminya Menhan, juga tertulis seluruh prajurit yang telah gugur adalah putra putra terbaik bangsa :

1. Kolonel Laut (P) Harry Setyawan,
2. Letkol Laut (P) Heri Oktavian,
3. Letkol Laut (E) Irfan Suri
4. Mayor Laut (P) Eko Firmanto,
5. Mayor Laut (T) Wisnu Subiyantoro,
6. Mayor Laut (E) Whilly,
7. Kapten Laut (E) Yohanes Heri,
8. Kapten Laut (P) I Gede Kartika,
9. Lettu Laut (P) Muhamdi,
10. Lettu Laut (P) Ady Sonata,
11. Lettu Laut (P) Imam Adi,
12. Lettu Laut (T) Anang Sutriatno,

13. Letda Laut (E) Adhi Laksmono,
14. Letda Laut (P) Munawir,
15. Letda Laut (T) Rhesa Tri Sigar,
16. Letda Laut (T) Rintoni,
17. Letda Laut (P) M. Susanto,
18. Serka Ruswanto,
19. Serka Yoto Eki Setiawan,
20. Sertu Ardi Ardiansyah,
21. Sertu Achmad Faisal,
22. Sertu Willy Ridwan Santoso,
23. Sertu M. Rusdiyansyah,
24. Sertu Ryan Yogie Pratama,
25. Sertu Dedi Hari Susilo,
29. Serda Harmanto,
30. Serda Lutfi Anang,
31. Serda Dwi Nugroho,
32. Serda Pandu Yudha Kusuma,
33. Serda Misnari,
34. Serda Setyo Wawan,
35. Serda Hendro Purwoto,
36. Serda Guntur Ari Prasetyo,
37. Serda Diyut Subandriyo,
38. Serda Wawan Hermanto,
39. Serda Syahwi Mapala,
40. Serda Wahyu Adiyas,

41. Serda Edi Wibowo,
42. Kopda Kharisma,
43. Kopda Nugroho Putranto,
44. Kopda Khoirul Faizin,
45. Kopda Maryono,
46. Klk Roni Effendi,
47. Klk Distriyan Andi,
48. Kls Raditaka Margiansyah,
49. Kls Gunadi Fajar,
50. Kls Denny Richi Sambudi,
51. Kls Muh Faqihudin Munir,
52. Kls Edi Siswanto,
53. PNS Suheri

Beberapa hari kemudian setelah tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402, Menhan Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo untuk mengadakan silaturahmi dengan keluarga besar prajurit KRI Nanggala-402 yang dilaksanakan Kamis (29/4) di Hanggar 2 Bandara Juanda, Surabaya.

Pada kesempatan silaturahmi tersebut Menhan Prabowo Subianto mengatakan, keluarga yang ditinggalkan harus bangga serta menjaga nama harum para prajurit awak kapal KRI Nanggala-402 atas pengorbanan dalam menjaga kedaulatan negara yang gugur dalam mengemban tugas tanah air Indonesia.

"Saya berharap, agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, tegar dalam menghadapi musibah ini. Pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat kita serta banyak korporasi telah mengambil keputusan untuk menjaga masa depan seluruh keluarga awak kapal nanggala". Ungkap Menhan Prabowo Subianto seraya memberikan semangat moral kepada keluarga para prajurit KRI Nanggala-402. (kemhan.go.id, 29 April 2021)

Pada kesempatan acara silaturahmi tersebut Menhan Prabowo Subianto memimpin upacara penganugerahan Tanda Kehormatan RI dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa untuk prajurit KRI Nanggala-402. Penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Keppres RI No 26/TK/Tahun 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Negara, Keppres RI No 39/TNI/Tahun 2021 tentang kenaikan pangkat luar biasa operasi selain perang anumerta, Keppres RI No 466/IV/2021 tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta dan Keppres RI Nomor Kep 341/IV/2021 tentang penetapan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta. Usai upacara, dilanjutkan pemberian tanda kehormatan dan skep kenaikan pangkat kepada keluarga awak KRI Nanggala-402 serta pemberian tali asih dari Kasal, Asabri dan mitra, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Sido Muncul dan PLN.

Pada kesempatan sebelumnya, (Senin, 26 April 2021) Menhan juga telah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan, yaitu SMA Taruna Nusantara Magelang dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia untuk mengalokasikan tempat dan beasiswa penuh bagi putra-putri dari 53 awak kapal selam KRI Nanggala-402 dan personel TNI AL yang telah gugur dalam tugas menjaga negeri sebagai Pahlawan Bangsa. Lebih lanjut Menhan menyampaikan, bagi putra-putri yang mengenyam pendidikan tingkat SMA, akan diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan beasiswa penuh. (kemhan.go.id, 26 April 2021).

Seperti diketahui SMA Taruna Nusantara merupakan sekolah menengah atas berasrama yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekolah ini juga berbasis semi-militer, sangat dikenal



Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat bersilaturahmi dengan keluarga prajurit TNI AL ABK KRI Nanggala-402 di Hanggar 2 Bandara Juanda, Surabaya (Kamis, 29/04).

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

memiliki sistem seleksi ketat dan menghasilkan banyak lulusan yang berprestasi di berbagai bidang.

Sementara itu untuk putra-putri awak KRI Nanggala-402 yang saat ini akan masuk jenjang perguruan tinggi, Menhan Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Universitas Pertahanan (UNHAN) mengalokasikan tempat untuk mereka.

Kemudian bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan tingkat menengah pertama (SMP), Menhan mengatakan pihaknya masih menyiapkan cabang pendidikan dari Taruna Nusantara untuk level SMP. Sedangkan bagi yang masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar (SD) dan SMP, pemerintah akan memberikan beasiswa penuh melalui Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP). YPPSDP merupakan yayasan di bawah Kementerian Pertahanan yang melaksanakan kegiatan mendukung kesejahteraan perumahan, pendidikan Prajurit dan juga melaksanakan penelitian pengembangan potensi sumber daya pertahanan.

Dengan tidak menunggu waktu yang lama, Kementerian Pertahanan melalui Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PT Priamanaya Energi tentang Pemberian Santunan dan Bantuan Biaya Pendidikan Putra Putri Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani antara Ketua YPPSDP Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dengan Direktur Utama PT Priamanaya Energi Raditya Priamanaya Djan, Senin (3/5) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wamenhan M Herindra, Presiden Komisaris PT Priamanaya Energi Djan Faridz, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemhan turut hadir menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama tersebut.

Menhan Prabowo Subianto menyampaikan penghargaannya kepada seluruh jajaran PT Priamanaya Energi atas perhatiannya yang besar menyalurkan santunan dan bantuan untuk putra-putri awak kapal selam KRI Nanggala-402, melalui yayasan yang dibina oleh Kemhan. Lebih lanjut Menhan mengatakan, Pemerintah dalam hal ini

Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada seluruh keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402, mulai dari pemberian rumah dan juga bantuan beasiswa pendidikan.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan juga berupaya memberikan perhatian kesejahteraan untuk seluruh keluarga yang ditinggal oleh prajurit awak kapal selam KRI nanggala-402, yang telah berkorban di medan tugas. "Baru saja kita mengalami musibah besar hilangnya Kapal Selam KRI Nanggala-402. Tentunya musibah ini merupakan sebuah resiko sebagai prajurit. Tetapi bagaimanapun merupakan panggilan bagi pemimpin untuk memikirkan kesejahteraan dan kebaikan bagi keluarga yang ditinggal oleh prajurit kita, manakala prajurit kita harus berkorban di medan tugas", ungkap Menhan Prabowo Subianto dikutip dari Kemhan.go.id, 3 Mei 2021. Untuk itu Kemhan sudah mengambil langkah-langkah melalui YPPSDP dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, untuk membantu dan mengurus keperluan pendidikan anak-anak dari awak kapal KRI Nanggala-402.

Kilas Balik Tenggelamnya KRI Nanggala-402

KRI Nanggala-402 merupakan Kapal Selam yang dibuat di Kiel, Jerman Barat pada tahun 1977 oleh Howaldtswerke-Deutsche Werft, sebuah perusahaan pembuat kapal jerman. Kapal ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli 1981 dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Mohammad Jusuf pada tanggal 21 Oktober 1981 di Dermaga Ujung Surabaya. (detik flash/detik.com, Minggu 25 April 2021).

Detik-detik tenggelamnya KRI Nanggala - 402 saat diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 kilometer dari Utara Pulau Bali saat tengah melakukan latihan penembakan torpedo kepala perang.

Menurut penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono saat jumpa pers bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bali, Rabu (21/4/2021), pada dasarnya sebelum memulai latihan penembakan torpedo, disebutkan



Bagian kapal KRI Nanggala-402 yang ditemukan yakni kemudi horizontal dan kemudi vertikal dari hasil Citra Remotely Operated Vehicle (ROV) MV Swift Rescue ditunjukkan saat konfrensi pers di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (25/4/2021).

Foto : Antara / FIKRI YUSUF

bahwa semua prosedur telah dilaksanakan. Pada pukul 02.30 sebelum kejadian, dilaksanakan isyarat terbit untuk memulai latihan. Sekitar setengah jam kemudian, pukul 03.00, KRI Nanggala-402 meminta izin menyelam untuk melakukan *periscope depth* pada kedalaman 13 meter dan melakukan persiapan penembakan torpedo. (kompas.com, 22 April 2021).

Kasal mengatakan sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut, kapal selam akan didampingi oleh *sea rider* penjejak yang di dalamnya ada pasukan Kopaska maupun dari kapal selam itu sendiri, untuk nantinya apabila torpedo meluncur, mereka akan mengikuti.

Pada pukul 03.00-03.30, geladak haluan dan conning tower KRI Nanggala-402 masih terlihat oleh tim penjejak *sea rider* dalam jarak 50 meter. Setelah itu, pukul 03.30, KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning.

Kemudian Laksamana TNI Yudo Margono mengutarakan pada pukul 03.46, *sea rider* memonitor

periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala-402 yang perlahan mulai menyelam dan tak terlihat. Sesuai dengan prosedurnya di dalam pelaksanaan penembakan torpedo, kapal harus menyelam.

Sementara itu, pada pukul 03.46-04.46, titik penembakan terus menerus memanggil KRI Nanggala 402, namun tak ada respons. "Jadi harusnya pada saat tenggelam tadi, masih ada periskop, masih kelihatan, namun ini langsung tenggelam tidak ada periskopnya dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin," ujar Kasal.

Seharusnya, saat melaksanakan penembakan torpedo, KRI Nanggala meminta otorisasi. Namun, begitu akan diberikan otorisasi, kapal selam bermotto "Tabah Sampai Akhir" ini sudah dipanggil berulang kali, namun tetap tidak memberikan respons. Melihat kondisi demikian maka akhirnya diputuskan sebuah helikopter diterbangkan dari salah satu KRI untuk melakukan pendekatan Visual, namun hasilnya pun nihil.

Lebih lanjut Kasal mengatakan, KRI Nanggala-402 diestimasikan seharusnya timbul pukul 05.15, namun tidak muncul dan tidak terlihat di permukaan. Selanjutnya dilakukan tahapan prosedur kapal selam hilang kontak. Oleh karena itu Pukul 05.15 diadakanlah prosedur sublook, yang mana aksi ini dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan.

Kemudian pada pukul 06.46, TNI AL melakukan prosedur *Submiss*, hal ini diterapkan saat 3 jam setelah hilang kontak, dan seluruh unsur pengamanan diluar untuk melaksanakan pencarian dan latihannya pun di tunda. Nantinya isyarat terakhir yang akan dilaksanakan yakni *Subsunk*. Isyarat ini dilakukan apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan adanya bukti-bukti otentik.

Sehubungan untuk memperoleh bukti-bukti otentik tersebut, proses pencarian terus dilakukan melalui pemantauan udara, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu (24 April 2021), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, mengungkapkan bahwa Kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak pada Rabu (21/4/2021) di perairan utara Bali, telah dinyatakan *Subsunk* (tenggelam).

Panglima TNI mengatakan TNI Angkatan Laut telah menemukan adanya tumpahan minyak di sekitar area hilangnya KRI Nanggala-402 dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala-402. "Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala," ungkap Panglima TNI.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga mengatakan bukti-bukti berupa temuan benda-benda tersebut tidak dimiliki oleh Kapal umum dan tidak ada kapal lain yang melintas sekitar radius 10 mile, sehingga benda tersebut diyakini merupakan bagian dari KRI Nanggala-402. Temuan-temuan tersebut yakni berupa alat shalat, busa penahan panas, komponen pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, oli untuk melumasi periskop, dan solar. (kompas.com, 25 April 2021).

Proses pencarian dan Evakuasi

Meskipun bukti-bukti otentik telah ditemukan dan menandakan KRI Naggala-402 dinyatakan *Subsunk*, akan tetapi TNI belum bisa memastikan bagaimana kondisi terkini dari 53 yang mengawaki Kapal Selam tersebut. Oleh karena itu untuk menindaklanjutinya, maka seluruh pihak yang tergabung di dalam Tim SAR mengerahkan Kapal dan peralatan guna mendukung proses pencarian KRI Nanggala-402. Didalam proses pencarian ini, pihak TNI telah mengerahkan 21 kapal perang, termasuk kapal selam KRI Alugoro-405. Sedangkan pihak kepolisian mengirimkan bantuan empat kapal, seperti Kapal Polisi (KP) Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004, dan KP Balan-4017.

Beberapa negara sahabat juga ikut mendukung proses pencarian dengan mengerahkan beberapa Kapal, seperti Singapura mengirimkan kapal selam MV *Swift Rescue*, Malaysia mengerahkan bantuan dengan kapal *Rescue Mega Bakti* yang dijadwalkan tiba pada Senin (26/4/2021). Sementara itu Australia mengerahkan dua armada kapal, HMAS Ballarat (FFH 155) dan HMAS Sirius (O 266), India mengirimkan satu kapal untuk membantu pencarian. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan bantuan dengan mengirimkan pesawat Poseidon. (kompas.com, 24 April 2021).

Setelah tiga hari dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap KRI Nanggala-402, pada ahad, 25 April 2021 pukul 01.00 WITA akhirnya melalui KRI Rigel yang menggunakan *multibeam echo sounder* di sekitar lokasi pencarian pada kedalaman 800 meter dan berhasil menemukan kontak bawah air. Hasil penemuan ini dikemukakan Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono pada konfrensi pers, minggu (25/4). Kasal mengatakan dikarenakan KRI Rigel yang memiliki *Remote Operated Vehicle (ROV)* hanya mampu dikedalaman 800 meter, maka diserahkan kepada kapal MV *Swift Rescue* milik pemerintah Singapura. (tempo.co, 26 April 2021).

Berkat bantuan kapal MV *Swift Rescue* tersebut maka berhasil mendapatkan data visual KRI Nanggala -402 yang telah terbelah. Kontak visual tersebut didapat pada posisi 07 derajat 46' 56" Selatan, dan

114 derajat 51' 20" Timur, tempat jatuhnya KRI Nanggala-402 yang berjarak kurang lebih 1.500 yard di Selatan, pada kedalaman 838 meter.

Dari sekitar lokasi ditemukan sejumlah barang yang diduga merupakan bagian dari KRI Nanggala-402, seperti kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tengah, kemudi selang timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Dengan dasar bukti-bukti otentik tersebut maka dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala-402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers yang sama.

Hingga saat tulisan ini disusun, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terus mengerahkan beberapa pasukan yang memiliki kemampuan mumpuni dalam posisi menyelam. Antara lain, Komando Pasukan Katak (Kopaska), Intai Amfibi (Taifib), Marinir, dan Dinas Penyelaman Bawah Air (Dislambair) masih terus berupaya mengevakuasi

kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali.

Menurut penjelasan dari Asisten Perencanaan dan Anggaran KASAL Laksamana Muda TNI Muhammad Ali dalam konferensi pers, Selasa (27/4/2021), mengatakan sejumlah KRI masih disiagakan di lokasi pencarian. Oleh karena itu pelaksanaan evakuasi di Laut Bali tetap dilaksanakan sampai sekarang. Asrena Kasal juga mengutarakan bahwa, kapal MV *Swift Rescue* yang didatangkan dari Singapura juga masih berada di lokasi pencarian untuk membantu evakuasi. (kompas.com, 27 april 2021).

Proses evakuasi badan dari KRI Nanggala-402 yang tenggelam tersebut tidak semudah yang dipikirkan sebelumnya. Menurut keterangan Asrena KSAL, saat konfrensi pers di Bendungan Hilir, dikutip dari Detik.com, Selasa (4/5/2021), mengatakan evakuasi badan kapal harus menggunakan pengait. Sementara itu pengait tidak bisa dipasang otomatis dari atas kapal di permukaan laut, melainkan harus dipasang



Foto : Antara/Fikri Yusuf

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto (kanan) dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) menunjukkan baju keselamatan awak kapal KRI Nanggala-402 yang ditemukan saat konfrensi pers di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (25/04/2021). KRI Nanggala-402 dipastikan tenggelam dan 53 awak kapalnya gugur di perairan utara Bali.



Sumber foto : navaltechnology.com

oleh penyelam atau robot, dan inilah merupakan kendalanya. Oleh karena itu proses evakuasi KRI Nanggala-402 saat ini baru bisa mencapai tahap pengangkatan bagian kecil-kecil saja. Ditambahkan Asrena KSAL untuk masalah batas waktu itu tidak bisa ditentukan. Karena mengingat medan dan situasi khususnya di Laut Bali diketahui juga terdapat internal wave.

Sementara itu beberapa negara menyatakan siap membantu proses evakuasi, termasuk bantuan Angkatan Laut China (*People Liberation Army Navy/PLA Navy*). Tawaran bantuan berkaitan dengan bantuan kemanusiaan pihak China dalam penanganan KRI Nanggala-402 berupa kapal salvage yang disampaikan Duta Besar China untuk Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI. "Tawaran bantuan kemanusiaan ini disambut dengan senang hati pemerintah Indonesia," bunyi keterangan pers dari Dinas Penerangan Angkatan Laut, Sabtu (1/5). Untuk kapal yang dikerahkan Angkatan Laut China tersebut sebanyak tiga buah kapal salvage untuk membantu mengangkat kapal KRI Nanggala-402 yang berada di dasar laut.

Adapun Kapal yang diperlukan ke Indonesia yakni Kapal *Ocean Salvage and Rescue*

Kapal MV Swift Rescue menurunkan peralatan Remote Operated Vehicle (ROV)

Yongxingdao-863, Ocean Tug Nantuo-185 dan Scientific Salvage Tan Suo 2. Ketiga kapal ini diperkirakan tiba di perairan Bali pada 30 April atau awal Mei 2021. (detik.com, Selasa 4 Mei 2021).

Dari rangkaian gambaran nyata tersebut sangatlah dapat dipahami bagaimana seluruh pihak saling bahu membahu bersama-sama untuk memberikan upaya yang terbaik dalam proses evakuasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang masih bersandar di dasar laut ini. Dan sudah jelas tidak akan ada batas waktu proses evakuasi tersebut hingga tujuan tercapai.

Musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali ini sangat mengejutkan kita semua. Tidak hanya bagi keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia.

Bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Rangkaian doa masyarakat Indonesiapun teriring kepada 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara, dan bagi segenap anggota keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Untuk saat ini dan selamanya, KRI

Nanggala-402 kini berada dalam *eternal patrol* atau dalam patroli abadi (tugas yang selamanya/tidak kembali lagi), Selamat jalan, Selamat berlayar menuju keabadian.***

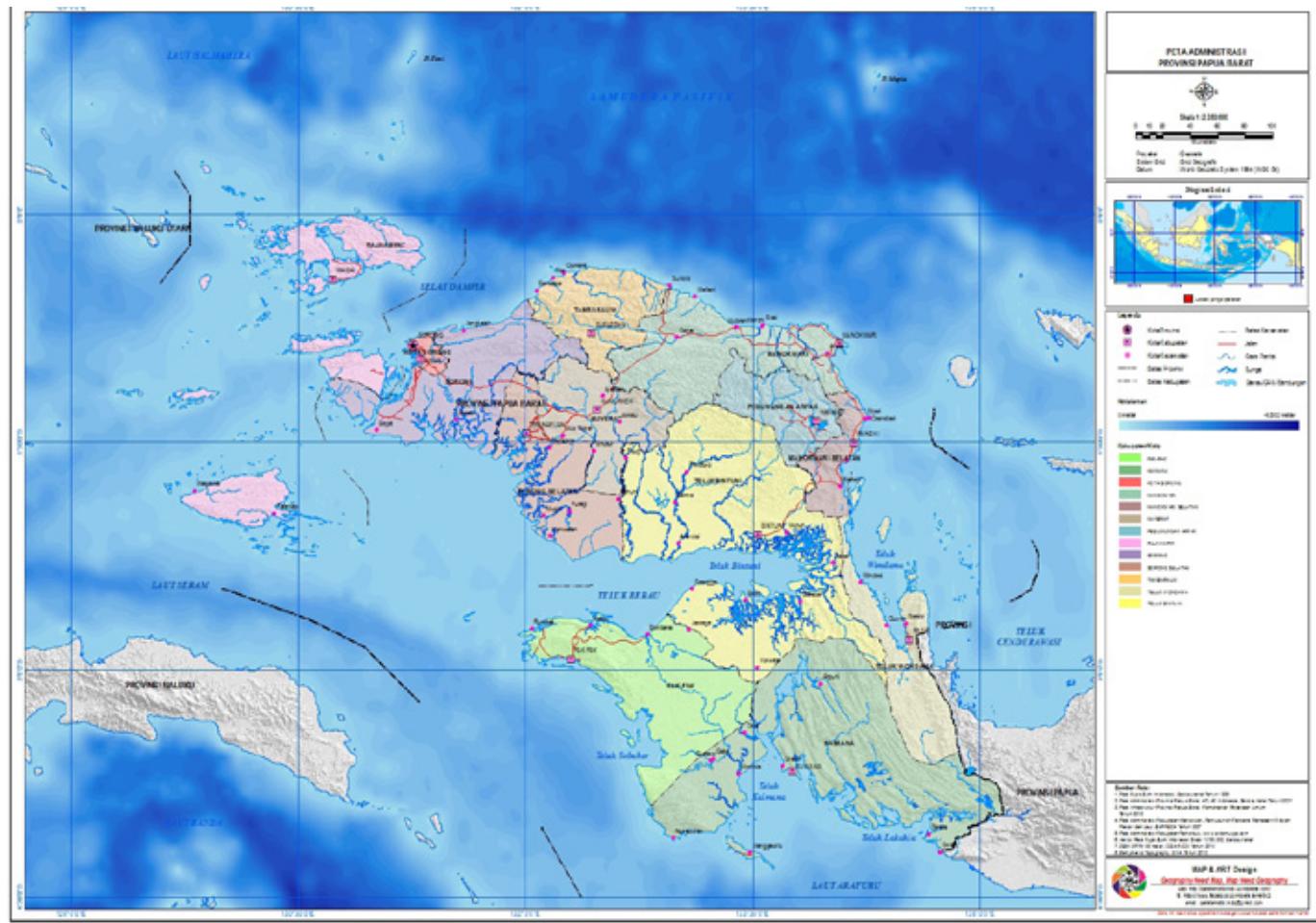
Referensi Website :

- Akun Instagram resmi Menhan Prabowo Subianto, @prabowo, 25 April 2021
- Arnania, Mela. 2021. "Kilas Balik KRI Nanggala-402 hingga Dinyatakan Tenggelam.. " <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/24/202859065/kilas-balik-kri-nanggala-402-hingga-dinyatakan-tenggelam>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.08.
- Adyatama, Egi. 2021. "Begini Kronologi KRI Nanggala-402 Ditemukan Kapal MV Swift Milik Singapura", <https://nasional.tempo.co/read/1456292/begini-kronologi-kri-nanggala-402-ditemukan-kapal-mv-swift-milik-singapura/full&view=ok> diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- Dirgantara, Adhyasta. 2021. " TNI AL Ungkap Kesulitan Angkat Badan KRI Nanggala-402", <https://news.detik.com/berita/d-5556986/tni-al-ungkap-kesulitan-angkat-badan-kri-nanggala-402>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- Maulana, Riezky. 2021. "Bantu Evakuasi KRI Nanggala-402, AL China Juga Turunkan 48 Penyelam Andalan", <https://nasional.sindonews.com/read/417634/14/bantu-evakuasi-kri-nanggala-402-al-china-juga-turunkan-48-penyelam-andalan->, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- Ramadhan, Ardit. 2021. " TNI AL Pastikan Upaya Evakuasi KRI Naggala-402 Tetap Berlanjut", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11590671/tni-al-pastikan-upaya-evakuasi-kri-nanggala-402-tetap-berlanjut>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- Sari, Puspa, Haryanti. 2021. " KSAL : Kapal Selam KRI Nanggala-402 Terbelah Menjadi 3 Bagian", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/25/18443401/ksal-kapal-selam-kri-nanggala-402-terbelah-menjadi-3->, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13.
- 2021. "KRI Nanggala-402 Dinyatakan Tenggelam, Bagaimana Kondisi Awaknya?", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/063445878/kri-nanggala-402-dinyatakan-tenggelam-bagaimana-kondisi-awaknya>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- 2021. "Detik-detik KRI Nanggala-402 Hilang Kontak Saat Latihan Menembak Torpedo", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/22/154900878/detik-detik-kri-nanggala-402-hilang-kontak-saat-latihan-menembak-torpedo>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.08
- 2021. "Mengenai Pemberian Beasiswa Bagi Putra-Putri Personel KRI Nanggala-402", <https://www.kemhan.go.id/2021/04/26/pernyataan-menteri-pertahanan-ri-prabowo-subianto-mengenai-pemberian-beasiswa-bagi-putra-putri-personel-kri-nanggala-402.html>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- 2021. "Menhan : Keluarga Harus Bangga dan Menjaga Nama Harum Prajurit KRI Nanggala-402", <https://www.kemhan.go.id/2021/04/29/menhan-keluarga-harus-bangga-dan-menjaga-nama-harum-prajurit-kri-nanggala-402.html>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13
- 2021. " Menhan Saksikan Penandatanganan Kerjasama Pemberian Santunan dan Bantuan Pendidikan Untuk Putra-Putri Awak KRI Nanggala-402", <https://www.kemhan.go.id/2021/05/03/menhan-saksikan-penandatanganan-kerjasama-pemberian-santunan-dan-bantuan-pendidikan-untuk-putra-putri-awak-kri-nanggala-402.html>, diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 15.13

Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH

Kakumdam XVIII Kasuari

PERTAHANAN NEGARA DALAM PROGRAM 1000 BINTARA TNI AD OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BARAT



Sumber foto : papuabarat.bpk.go.id

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subiyanto menyetujui program perekrutan 1.000 orang bintara TNI AD Otonomi Khusus (otsus) yang diajukan Kodam XVIII/Kasuari/Papua Barat. Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr (Han) mengatakan bahwa Tantangan tugas Kodam XVIII/Kasuari tidaklah ringan, karena Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang rawan terjadi konflik sosial dan komunal, juga masih adanya ancaman nyata separatisme, baik dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) maupun separatis politik yang senantiasa berupaya mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat, melalui aksi-aksi dari front politik, klandestine, dan front bersenjata yang mereka miliki," Sejalan dengan rencana strategis penataan organisasi Kodam XVIII/Kasuari tahun 2020-2024 maka diresmikan satuan baru setingkat Korem dan Brigade yaitu Korem 182/Jazira Onim (JO) dan Brigif 26/Gurana Piarawaimo (GP) guna melengkapi gelar kekuatan jajaran satuan teritorial dan satuan manuver Kodam XVIII/Kasuari.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Kasad nomor Kep/352/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang penataan satuan dan pembentukan satuan baru jajaran TNI AD. Peresmian operasional Korem 182/JO dan Brigif 26/GP sebagai jawaban dari kebutuhan organisasi guna mendukung kesiapan operasional Kodam XVIII/Kasuari dalam rangka pengembangan organisasi Kodam, baik sebagai Kotama Pembinaan maupun Kotama Operasi, dihadapkan dengan kondisi geografis wilayah Provinsi Papua Barat yang luas dan kompleksitas permasalahannya, sehingga membutuhkan Komando Pengendalian (Kodal) yang efektif dan efisien.

Setelah diresmikannya Korem 182/JO, maka dilakukan alih Kodal beberapa satuan dari jajaran Korem 181/Praja Vira Tama (PVT), yakni 8 Kodim (3 Kodim pembentukan baru) yang ada didalamnya, tiga diantaranya dialihkodalkan ke Korem 182/JO sehingga terbentuk komposisi satuan jajaran Korem yang baru, yaitu Korem 181/PVT membawahi 5 Kodim (Kodim 1802/Sorong, Kodim 1805/Raja Ampat, Kodim 1807/Sorong Selatan (Sorsel), Kodim

1809/Maybrat, Kodim 1810/Tambrauw). Adapun Korem 182/JO akan membawahi 4 Kodim, yakni 3 Kodim hasil Alih Kodal dari Korem 181/PVT (Kodim 1803/Fakfak, Kodim 1804/Kaimana, Kodim 1806/Teluk Bintuni) dan 1 Kodim bentukan baru yaitu Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel). Di bagian lain, dengan terbentuknya Brigif 26/GP, maka dilakukan alih Kodal ke satuan ini, yakni Yonif 764/Iamba Baua (dari Kodam XVIII/Kasuari ke Brigif 26/GP), Yonif Raider Khusus 762/Vira Yudha Sakti (dari Korem 181/Praja Vira Tama ke Brigif 26/GP), dan satuan bentukan baru Yonif 763/Sanetia Buerama Amor (SBA) ke Brigif 26/GP.

Tugas pokok dari seorang prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan, khususnya di tanah Papua, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dapat terhindar dari ancaman-ancaman dari luar yang hendak mengganggu kesatuan dan persatuan negara. Hal ini diungkapkan Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat memberikan arahan kepada Prajurit TNI Kompi Senapan D Yonif RK 762/VYS, dalam lawatannya di Teluk Bintuni. Rabu (21/10/2020). Pangdam XVIII Kasuari juga berpesan, menjadi seorang prajurit TNI sebagai tentara rakyat harus dapat mengayomi rakyatnya, tidak boleh ada bentrok baik sesama aparat keamanan, terlebih sama rakyat.

Sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Melihat konstruksi Sishanta tersebut, penambahan kekuatan satuan TNI AD di wilayah Papua Barat akan mengalami hambatan, salah satunya faktor penyediaan SDM prajurit TNI AD yang sangat besar jumlahnya. Mantan Pangdam XVIII Kasuari, Letjen TNI Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si. telah bertemu dan berdiskusi dengan seluruh Bupati di wilayah Papua Barat dan beliau mengagus penyediaan prajurit TNI AD yang berasal dari pemuda-pemuda lokal yang merupakan Orang Asli



Sumber foto : Istimewa

Papua (OAP) dan gagasan tersebut disambut baik serta disetujui oleh Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Uniknya, kebijakan ini sangat *out of the box* karena dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) salah satunya meliputi pertahanan dan keamanan; dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan diperkuat dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

50 Kebijakan yang luar biasa tersebut telah sejalan dan didukung dengan aturan dalam ayat (8) bahwa Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua. Dalam bab penjelasan ayat (8) tersebut bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan operasi militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan SDM di Papua Barat, wacana tersebut diterima dan disambut dengan sangat baik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs Domingus Mandacan, yang ditindak lanjuti rapat koordinasi awal pada hari Senin (3/8/2020) di Swisbell Hotel, Manokwari, Papua Barat. Kodam XVIII Kasuari telah selesai melaksanakan merekrut

Sidang Pemilihan Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Otonomi Khusus (Otsus) Orang Asli Papua (OAP) Pria Panitia Pusat (Panpus) Kodam XVIII Kasuari di Aula Makodam XVIII Kasuari Trikora Arfa 1 Manokwari Papua Barat, Selasa (27/10/2020).



Sumber foto : PENDAM XVIII/KASUARI

dan seleksi personel TNI AD yang berasal putra-putri asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP).

Seleksi perekrutan 1.000 bintara otsus TNI AD yang merupakan kebijakan Pertahanan Negara Dalam Otonomi Khusus Di Papua Barat ini telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Papua Barat. Rekrutmen 1000 Bintara TNI menggunakan anggaran dana Otonomi Khusus, maka yang menjadi prioritas adalah anak-anak Asli Papua Barat.

Karena ini dari Dana Otonomi Khusus maka yang di prioritaskan anak-anak asli Papua Barat. Jadi ada 13 Kabupaten Kota, yang masing-masing menyumbangkan Putra-putri terbaik yang memenuhi syarat. Bahkan menurut Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr(Han), dalam rekrutmen tersebut juga ada Kuota untuk Kowad TNI

AD (tentara Wanita), dari Anak-anak Asli Papua Barat. Mengenai Panitia Seleksi, Pangdam menyebutkan telah melibatkan Panitia seleksi Eksternal, terutama dari kalangan lembaga adat.

Hasil rekrut sebanyak 1000 Bintara Otsus akan "digembleng" di sejumlah Resimen Induk Kodam (Rindam) antara lain 330 orang di didik di Rindam III/Siliwangi, 240 orang di didik di Rindam IV/ Diponegoro, Magelang, 130 orang di didik di Rindam Jaya, Jakarta, 260 orang di didik di Rindam V/Brawijaya dan 40 orang putri asli Papua di Pusat Pendidikan (Pusdik) Korp Wanita TNI AD (Kowad) di Lembang, Bandung untuk menjalani Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) selama 20 minggu terhitung mulai 4 November 2020 hingga 23 Maret 2021, dengan materi pendidikan dasar keprajuritan.

Calon Bintara TNI dari putra-putri asal Papua disejumlah Resimen Induk Daerah Militer Rindam d Pulau Jawa menjalani Pendidikan Pertama Bintara Dikmaba) TNI yang merupakan program otonomi khusus di wilayah Kodam XVIII Kasuari 2020.



Sumber foto : Pendam Kogabwilhan III

Menurut Pangdam Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dalam tayangan Youtube TNI AD, Minggu (7/2/2021) Calon Bintara TNI Putra dan Putri asal Papua tersebut disebar di sejumlah Rindam di pulau Jawa, agar dapat memiliki wawasan nusantara dan mengenal kebudayaan daerah lain di Indonesia. (tni.mil.id, 8 Februari 2021).

Sebelum mengikuti pendidikan harus melewati tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademis, kesehatan, maupun jasmani. Dalam pendidikan lanjutan, Bintara otsus akan diarahkan sebagai Babinsa (Bintara Pembina Desa) di jajaran wilayah Papua Barat kelak.

Harapannya, kebijakan yang *out of the box* ini merupakan muara dari percepatan peningkatan kesejahteraan warga Papua Barat dengan cara meningkatkan SDM Pemuda asli dari Papua Barat

untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan Pertahanan Negara yang juga menjadi prioritas pemerintah dapat berjalan lancar dengan adanya gelar kekuatan pertahanan yang merupakan tulang punggung terciptanya kondisi aman di wilayah Papua Barat. ***



Sumber foto : Istimewa

Kodam XVIII/Kasuari menetapkan kelulusan bagi peserta penerimaan Siswa Pendidikan Bintara PK Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP) Kodam XVIII/Kasuari 2020.



Sumber foto : Istimewa

KRI dr. Soeharso-990 tiba dan sandar di Pelabuhan Soekarno Gudang 104 Kota Makassar dengan disambut oleh Tim Merplug Lantamal VI.



*Letkol Laut (KH/W) Elyah Musarovah
Pabandya Komkinjabstruk Ban VI Spersal*

Peran TNI Angkatan Laut Dalam Kecelakaan Di Laut Sebagai



Sumber foto : tni.mil.id

Perbantuan Bagian Dari OMSP

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), mengingat Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17-ribuan pulau dan berada di daerah katulistiwa, di antara dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Pasifik dan Hindia).

Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), Indonesia sebagai negara kepulauan dilegalkan dengan *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* yang disahkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena dengan perairan yurisdiksi 2/3 dari seluruh luas wilayah NKRI. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang menjadi satu kesatuan dengan batas wilayah laut Indonesia dari laut teritorial yaitu diukur 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau pada awal kemerdekaan.

Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan adanya ratifikasi UNCLOS 1982 bahwa luas wilayah yuridiksi Indonesia sampai 120 mil laut dari garis pantai pulau diukur padapasang surut. Dengan kondisi tersebut Indonesia sudah seharusnya dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan laut untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" serta menjamin keamanan laut

serta pemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Jika di lihat dari luas wilayah yang dimiliki Indonesia maka, dari aspek *Marine Geo Science*, perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia mengandung sumberdaya laut berasal dari perikanan yang sangat potensial sebagai salah satu sumberdaya alam hayati dengan jumlah yang sangat besar.

Dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan sangat luas ditambah dengan segala sumberdaya laut yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan adanya kekuatan TNI AL yang profesional sebagai komponen utama pertahanan di laut dalam rangka melindungi dan menjaga kedaulatan serta potensi kekayaan laut tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI secara jelas dirumuskan bahwa Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah TNI Angkatan Laut. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan dalam aturan ini menyatakan, bahwa TNI AL merupakan komponen utama pertahanan di laut.

Di sisi lain kesadaran terhadap konstelasi geografis Indonesia ini telah membawa kesadaran Pemerintah Indonesia untuk menekankan kebijakan pembangunan Indonesia periode 2019-2024 dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Letak Indonesia yang strategis mengakibatkan Indonesia berada pada persilangan jalur perdagangan dan pelayaran Internasional, baik dari wilayah Pasifik dan Asia Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa maupun sebaliknya, sehingga menuntut Indonesia untuk membagi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi tiga bagian dalam mendukung jalur perdagangan dan pelayaran Internasional tersebut.

Kedudukan yang strategis ini menjadi wilayah Indonesia sebagai tempat transitnya berbagai macam

kepentingan negara-negara dengan jalur pelayaran baik dari benua Eropa, Timur Tengah, Pasifik dan Asia Selatan. Frekuensi kapal asing yang melintasi wilayah laut Indonesia utamanya Selat Malaka, saat ini semakin meningkat seiring dengan bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia ke wilayah Asia, sekitar 70% angkutan barang melalui perairan Indonesia dan sebaliknya.

Dengan semakin ramainya perairan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) maka perlu adanya penjaminan pelayaran Internasional dan hak negara-negara lain untuk tetap bisa berlayar di perairan Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 yang berfungsi untuk menjamin hak lalu lintas laut damai (*innocent passage*) kendaraan air asing di perairan pedalaman (*internal waters*) yang memiliki maksud untuk :

1. Mendukung dalam menjamin pelayaran Internasional sehingga pelayaran-pelayaran dengan maksud damai dapat terpenuhi kepentingannya dengan mengindahkan segala ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Indonesia.
2. Melindungi dan memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajiban di perairan Indonesia sehingga secara jelas dan tegas di dalam pelaksanaanya tidak akan menimbulkan kebarbaran (*sic*) yang menimbulkan kesalahpahaman sehingga tidak mendukung persetujuan Internasional.
3. Menghilangkan dan mengurangi penyelewengan-penyelewengan di laut yang dilakukan oleh kendaraan asing dalam operasinya melintasi wilayah perairan Indonesia.

Dengan meningkatnya frekuensi kapal asing maupun kapal lokal yang melintas menyebabkan ramainya jalur perairan Indonesia bukan menjadi hal mustahil jika terjadi kecelakaan kapal. Tingginya kasus kecelakaan laut tersebut menjadi perhatian seluruh pihak, bukan hanya pemilik kapal, melainkan

juga pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Kecelakaan kapal laut menyebabkan ratusan nyawa rakyat melayang. Penyebab kecelakaan beragam, mulai dari gagal berfungsiya sistem navigasi transportasi, kebakaran, kelebihan muatan sampai dengan usia kapal yang dimanipulasi.

Kurun waktu 2020 tercatat beberapa kecelakaan transportasi Laut yang ada di Indonesia, diantaranya kecelakaan transportasi air selanjutnya menimpa Kapal Motor (KM) Selgebadan Kamar Jaya yang tenggelam di perairan Pulau Trangan, Kepulauan Aru, Maluku, pada 22 Mei 2020. Kapal yang mengangkut 19 penumpang yang kesemuanya merupakan pemudik ini diduga ditiup angin kencang dan dihantam gelombang tinggi. Para penumpang kapal berangkat dari daerah Dabo dan hendak menuju kampung halaman di Desa Batugoyang, Kepulauan Aru. Dalam kecelakaan itu, 10 orang berhasil selamat dengan berenang menuju pantai, 6 lainnya tewas, dan 3 lainnya sempat dinyatakan hilang.

KM Harapan Ku dan KM Camar Laut tenggelam di Perairan Nias, Sumatera Utara, pada 22 Juni 2020, diduga akibat dihantam gelombang tinggi dan mati mesin. Masing-masing kapal membawa 8 dan 6 orang Anak Buah Kapal (ABK). Dari kecelakaan tersebut, 13 orang ABK dinyatakan hilang dan ada 1 ABK yang ditemukan selamat. Data ini berdasarkan hasil pencarian tim gabungan pada 24 Juni 2020. Berdasarkan laporan awal yang diterima Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Nias, hanya ada 1 kapal yang belum kembali ke dermaga, namun ternyata ada 2 unit kapal lagi yang belum kembali dan diketahui tenggelam. Semula, kedua kapal tersebut berencana untuk melaut di perairan sekitar Pulau Simuk, Kepulauan Batu, Kabupaten Nias. (kompas.com,16 Desember 2020).

Sebagai konsekwensi logis dari luasnya wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan, maka bukan hanya jalur perairan saja yang meningkat, namun



Foto : Antara/M. Risyal Hidayat

Tim pencari menemukan puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Pulau Seribu, Jakarta.

aspek jalur penerbangan-pun semakin tahun semakin meningkat. Hal ini menandakan peningkatan kebutuhan masyarakat akan transportasi udara dari satu pulau kepulau yang lain, dengan meningginya arus penerbangan komersil ini maka juga tidak luput akan mengalami terjadinya kecelakaan udara.

Selama tahun 2000 terhitung telah terjadi delapan (8) kali kecelakaan pesawat di Indonesia, sejarah mencatat kecelakaan yang paling parah adalah pesawat Adam Air yang jatuh di Selat Makassar dengan kedalaman lebih dari 2.000 meter, seluruh 102 penumpang dan awak pesawat tewas.

Belum lagi kejadian kecelakaan yang mengenaskan lainnya, seperti Pesawat Lion Air JT-610 jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, yang menyebabkan 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru pesawat tewas.

Hingga pada awal tahun 2021, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJY182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu, 9 Januari 2021. Berdasarkan data manifes, pesawat Sriwijaya Air yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra. (cnnindonesia.com, 10 Januari 2021).

Tercatat dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah lautan tersebut, maka sudah menjadi tuntutan bagi TNI Angkatan Laut untuk dapat memberikan pertolongan secara prima dalam pencarian korban serta melaksanakan penyelamatan terhadap kapal-kapal baik kapal atas air maupun kapal selam serta pesawat terbang yang mengalami musibah sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 Pasal 7 yakni melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

Salah satu contoh, adanya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJY182 secara terkordinasi dan sistematis, TNI Angkatan Laut langsung merespon

dan bertindak untuk memberikan bantuan. Sejumlah KRI dikerahkan, diantaranya KRI Kurau-856 dan KRI Teluk Gilimanuk-531 serta menurunkan penyelam dari tim Detasemen Jalamangkara (Denjaka), Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska), dan Batalyon Intai Ambfibi (Yontaifib) Marinir serta Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmada dan perahu karet untuk mencari korban dan serpihan pesawat.

Personel gabungan dari tim penyelam Angkatan Laut ini diterjunkan ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Lokasi pencarian difokuskan pada titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Dua perahu karet dan alat selam disiapkan untuk memudahkan proses pencarian dengan pola SAR, baik melingkar maupun penyisiran area. Proses pencarian dilakukan tim penyelam di kedalaman 16 hingga 25 meter. (cnnindonesia.com, 10 Januari 2021).

Kesigapan dalam melakukan aksi pertolongan dari personel TNI Angkatan Laut ini bukan hanya dilakukan terhadap kecelakaan yang terjadi dikalangan sipil, melainkan juga melaksanakan bantuan pertolongan khususnya sesama TNI Angkatan Laut.

Belum lama ini TNI Angkatan Laut telah berduka, karena terjadi musibah kecelakaan pada Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang karam di perairan utara Bali. Kecelakaan karamnya kapal selam ini juga bukanlah suatu kejadian pertama kali di dunia.

Setelah tiga hari dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap KRI Nanggala 402, akhirnya Tim SAR Gabungan pencarian mendapatkan titik temu dari hasil data *multibeam echo sounder* di sekitar lokasi pencarian. Pada kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut, KRI Rigel berhasil mendeteksi citra bawah laut yang diduga kerangka kapal selam.

Berkat bantuan kapal MV Swift Rescue dari Singapura, juga berhasil mendapatkan data visual. Dengan menurunkan robot bawah air yang biasa disebut *ROV (Remotely Operated Vehicle)* akhirnya mendapatkan kontak visual pada posisi 07 derajat 46' 56" Selatan, dan 114 derajat 51' 20" Timur, tempat jatuhnya KRI Nanggala 402 yang berjarak

kurang lebih 1.500 yard di Selatan, pada kedalaman 838. ROV dengan kamera di setiap sisinya akan mengeluarkan sonar untuk mendeteksi keberadaan benda di bawah laut. Ketika sonar mendeteksi adanya benda padat, maka alat tersebut akan mengeluarkan bunyi. Berdasarkan dari data visual yang didapat dari ROV tersebut, tergambaran kondisi Kapal Selam Nanggala 402 terbelah menjadi tiga bagian, dan dengan kondisi tersebut akhirnya 53 seluruh ABK/ Anak Buah Kapal dinyatakan gugur.

Hingga saat tulisan ini dibuat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) masih terus berupaya mengevakuasi kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali. Menurut penjelasan dari Asisten Perencanaan dan Anggaran KASAL Laksamana Muda Muhammad Ali dalam konferensi pers, Selasa (27/4/2021), mengatakan sejumlah KRI masih disiagakan di lokasi pencarian. Oleh karena itu pelaksanaan evakuasi di Laut Bali tetap dilaksanakan sampai sekarang. Asrena Kasal juga mengutarakan bahwa, kapal MV Swift Rescue yang didatangkan dari Singapura juga

masih berada di lokasi pencarian untuk membantu evakuasi. (kompas.com, 27 april 2021).

Rangkaian tindakan responsif yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut terhadap pada beberapa kecelakaan tersebut menggambarkan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai salah satu bagian dari komponen utama kekuatan nasional Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan kompleks.

Begitu juga dalam melaksanakan pertolongan kecelakaan di laut, sesuai pasal 10 angka (3) huruf c Undang-Undang Pertahanan Negara yaitu Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk dengan melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Peran prajurit TNI Angkatan Laut yang handal serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang diterjunkan langsung dalam pertolongan semua jenis dan ragam kecelakaan yang terjadi di lautan. Mulai dari penggerahan KRI kelas Fregat dan KRI



Foto : Antara/M. Risyal Hidayat

Sejumlah prajurit Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Armada 1 berusaha mengangkat puing pesawat Sriwijaya Air SJ. 182 dari dasar perairan Kepulauan Seribu Jakarta, Senin (11/1/2021)

BHO (Bantuan Hidro-Oseanografi) dalam melacak keberadaan korban hingga melibatkan pasukan elite di tubuh TNI Angkatan Laut baik dari Denjaka, Kopaska, Taifib dan Penyelam saling bahu membahu dalam misi penyelamatan kecelakaan kapal maupun pesawat udara.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No 34 tentang TNI selain untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, TNI juga membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan, juga pertolongan kecelakaan di laut.

Dengan semakin berat dan kompleksnya peranan TNI Angkatan Laut dimasa yang akan datang maka teriring tuntutan untuk menjadikan TNI Angkatan Laut yang profesional, unggul dan handal, harus dilengkapi dengan program modernisasi Alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut baik KRI, Kapal Selam, Pesut hingga Tank Amphibi serta penguatan terhadap SSAT(Sistem Senjata Armada Terpadu), maka TNI Angkatan laut akan lebih disegani di kawasan Asia Tenggara.***

Sriwijaya SJ 182” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210110122729-20-591765/dua-krikumpulkan-serpihan-pesawat-sriwijaya-sj-182>, 10 Januari 2021.

- 2021. “*Video : Tim Penyelam TNI AL Cari SJ 182 Hingga Kedalaman 25 M*”. www.cnnindonesia.com/tv/20210110145030-407-591834/video-tim-penyelam-tni-al-cari-sj182-hingga-kedalaman-25-m, 10 Januari 2021.
- 2020. “*Kaleidoskop 2020: 5 Kecelakaan Transportasi Air di Indonesia*”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/16/140400965/kaleidoskop-2020--5-kecelakaan-transportasi-air-di-indonesia?page=all>, 16 Desember 2020.
- 2021. “*TNI AL Pastikan Upaya Evakuasi KRI Nanggala-402 Tetap Berlanjut*”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11590671/tni-al-pastikan-upaya-evakuasi-kri-nanggala-402-tetap-berlanjut>, 27 April 2021.

Referensi

- UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI;
- UU Pertahanan Negara;
- Defense Security Service (United States Department of Defense), “Special Focus Area: Marine;
- House of Commons, London. U.K. Security Journal. July 2007, Volume 20, Issue 3, pp 158–170;
- Dahuri, Rochmin. 2020. “*Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap*”, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210110122729-20-591765/dua-krikumpulkan-serpihan-pesawat-sriwijaya-sj-182](http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur. Lelap, 3 Juni 2014, diunduh pada 25 Desember 2020.• 2021. “<i>Dua KRI Kumpulkan Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ 182</i>” <a href=), 10 Januari 2021.



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdy TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Menembak Kasau Cup 2021, yang berlangsung mulai tanggal sampai 28 Maret 2021 di Lapangan Tembak (Lapbak) Wing I Paskhas, diikuti 683 atlet dari 16 Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) serta 80 Shooting Club dari seluruh Indonesia***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Mayjen TNI Dadang Hendrayudha menyelenggarakan acara kegiatan Ngopi Daring Bela Negara dengan mengambil tema "Ramadan dan Kisahnya" yang dihadiri Artis ternama Ibukota diantaranya Teuku Zacky, Sinyorita, Iqbal Khusaini, SE, Indra Bekti, Mpok Bhabay dan Habib Ja'far, Selasa (27/4) bertempat di Studio Bela Negara Pothan Kemhan Jakarta. Dirjen Pothan menyampaikan pandangan bahwa negara Indonesia dengan keanekaragaman dan kebersamaannya, bangsa Indonesia dapat mengatasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia secara bersama-sama. Karena pandemi covid-19 merupakan tanggungjawab kita bersama.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kapus Rehab Kemhan Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp.Og., M.M.R.S., Rabu (28/4), memimpin Rapat Koordinasi Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara virtual dan langsung di Pusrehab Kemhan, Bintaro Jakarta.

Rakor Pusrehab Kemhan kali ini mengambil tema "Upaya Meningkatkan Sinergitas Bidang Personel dan Bidang Kesehatan Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan". ***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Indonesia mendorong ASEAN bersama delapan negara mitra yang tergabung dalam kerangka kerjasama ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)-Plus yang memiliki teknologi canggih dalam sistem peringatan dini bencana untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, guna mencegah atau lebih siap menghadapi dalam bencana di masa mendatang serta dapat menjajaki kerja sama dalam bidang sistem peringatan dini bencana.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra Memimpin Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kementerian Pertahanan dari Mayjen TNI Sunaryo, S.E kepada Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han), CHRMP, Rabu (5/5) di Kemhan, Jakarta.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Ilmu Pertahanan bidang Perang Semesta kepada Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu oleh Universitas Pertahanan RI di Kampus Unhan, Bogor, Kamis (20/5). Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian.,S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU selaku Ketua Senat Unhan RI yang menyampaikan bahwa Jenderal TNI (Purn) Dr. (H.C) Ryamizard Ryacudu merupakan Doktor Honoris Causa pertama di Universitas Pertahanan RI yang telah menunjukkan prestasi sebagai militer profesional sekaligus prestasi akademik.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Usai Liburan Idul Fitri, Pegawai Kementerian Pertahanan Rabu (19/5), melaksanakan pemeriksaan Rapid Test Antigen di Aula Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta. Pemeriksaan Rapid Test Antigen berlangsung secara bertahap selama 5 hari kerja, mulai 19 Mei sampai dengan 25 Mei 2021 sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun pelaksanaan rapid tes antigen ini dilakukan sebagai salah satu upaya antisipasi deteksi serta memutus mata rantai penularan virus covid-19 di lingkungan kerja Kementerian Pertahanan.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., memimpin rapat evaluasi pengawasan internal bulan April dan Mei 2021, Rabu (19/5), di Kemhan, Jakarta. Dalam rapat yang diikuti oleh Ses Itjen Kemhan dan para Inspektur ini Irjen Kemhan menekankan beberapa hal yang merupakan penekanan atas tugas dan tanggung jawab Itjen Kemhan.***



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan dan TNI memiliki 110 rumah sakit di sejumlah daerah yang menangani pasien penderita Covid-19 hingga saat ini, dan telah meningkatkan kemampuan serta kapasitasnya mulai dari penambahan ICU sampai fasilitas pendukung lainnya agar pelayanannya lebih baik. Demikian dikatakan Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan) Laksamana Pertama TNI dr. Arie Zakaria, Sp.OT, Sp.KL., saat menjadi narasumber dalam wawancara Podcast Kemhan, Kamis (6/5) di Studio Podcast Biro Humas Setjen Kemhan, Jakarta.***





MINISTRY OF DEFENCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

WIRA
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



**The Role of the Ministry of Defense
FEASIBILITY CENTER
IN NATIONAL DEFENSE (PUSLAIK KEMHAN)**



ISSN 1693-0231



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



kemhanri



Kemhan RI

INDONESIA
EDITION II 2021



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
beserta seluruh keluarga besar
Kementerian Pertahanan, menyampaikan rasa duka yang
sedalam-dalamnya atas gugarnya para prajurit terbaik saat melaksanakan tugas

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan tempat yang mulia disisi-Nya
serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan keikhlasan,
kesabaran, dan ketabahan



EDITORIAL

Advisors:

Secretary of MoD
Air Marshal TNI Donny Ermawan T., M.D.S.

Editor in Chief:

Head of Public Relation Bureau of the Secretariat
Defence of MoD
Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T.,
M.Sc., M.Sc.

Managing Editors :

Colonel Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, S.Sos, M.Si.,
Major Bondy Mulyatmo, S.Sos, M.M

Reporters:

Budiono, S.Si

Ghraphic Designers:

Imam Rosyadi / Adi Setiawan

Fotografers:

Acep Sutawijaya / Sasi Indah P

Distributions & Sirkulations:

Captain Lindu Balianto
Mandiri Triadi, S.Sos, M.M

Published by:

Public Relation Bureau of the Secretariat
Defence of MoD - Merdeka Barat Street No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



Dear WIRA readers,

Praise be to the presence of Almighty God, because with His permission, Wira Kemhan Magazine greets WIRA readers again through edition two in 2021. In this edition, the editorial team will present some information and articles that are worthy of being listened to by readers. WIRA.



The information we provide is related to the activities of the Ministry of Defense leadership which are summarized in the Leadership Focus rubric. Besides that in this edition, we also present all the defense news.

There is an article that the editorial team presents regarding some The Role of the Ministry of Defense's Feasibility Center in National Defense (Puslaik Kemhan); KRI Nanggala-402, We Leave The Sovereignty of the Indonesian Sea to You, Goodbye, Happy Sailing To Eternity; National Defense in the 1000 ARMY NCO Program Special Autonomy in West Papua; and The Role of the Navy in Assisted Accidents at Sea As A Part of Military Operations Other Than War (OMSP).

Meanwhile, in the Lens Focus Column, the editorial staff provides brief information regarding the tasks given by photos with captions of the Ministry of Defense leadership .

With humility, we hope that the information and articles that we present in edition two in 2021 of WIRA Magazine can add insight and knowledge as well as benefits for loyal WIRA readers wherever they are and on duty.

To enrich this WIRA magazine article, we always expect the participation of readers to send writing, whether in the form of articles, opinions, information, feedback or criticism and suggestions, via email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA Magazine can also be accessed in the online network on the page www.kemhan.go.id.

Happy reading....!!!

Head of Public Relations Bureau,

Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.

Contents

MAIN FOCUS>>

6-11

The Indonesian Ministry of Defense is Ready to Build a Stronger Defense Cooperation Relationship with the Republic of Korea



The Indonesian Minister of Defense hopes that the Indonesia-RoK bilateral relations in the defense sector can make a positive contribution, not only for the national interests of the two countries, but also for maintaining regional security, peace and stability. Defense Minister Prabowo also sees that there are still many opportunities for defense cooperation which need to be explored together, especially in the context of building mutual trust and enhancing cooperation in the defense industry.

The Indonesian Defense Minister Meets the President and Prime Minister of the Republic of Korea

Defense Minister Prabowo Attends the KF-X Combat Aircraft Roll-Out Ceremony



LEADERSHIP FOCUS>>

12-27

Defense Minister Prabowo Handed Over the Aircraft Made by the National Industry CN235-220 to the Senegal Air Force

Defense Minister Prabowo Chaired the KKIP Plenary Meeting in 2021

Government of Indonesia and Government of Japan Sign Agreement on Transfer of Defense Equipment and Technology

The Deputy Minister of Defense Expects the Defense Industry of Indonesia to Achieve the Target of the World's Top 50 Companies

Indonesia Invites ASEAN Countries and ASEAN Partner Countries to Collaborate to Handle the Impact of the Pandemic

Inspector General of the Ministry of Defense leads the Secretariat and Inspector I of the Inspectorate General of the Ministry of Defense

The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Invites Media Crews to See PT Pindad's Alpalhankam Product Achievements

Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Launches Kemhan Podcast "Defense's Advocate"

Domestic Submarine KRI Alugoro-405 Strengthens Indonesian Navy Main Weapon System



Article>>

28-36

The Role of the Ministry of Defense's Feasibility Center in National Defense (*Puslaik Kemhan*) (writer : Colonel Tek. Suparman S.T)



Talking about the feasibility of the state/defense/military, in general the Indonesian people are still limited to knowing the existence of the Ministry of Defense Feasibility Center in certification of the feasibility of non-civilian products, especially the Defense and Security Equipment (Alpalhankam) including the military, unlike the role of the Ministry of Transportation which is the single worthiness authority of the feasibility in certifying civilian transportation modes and their supporters in the country.

37-47

KRI Nanggala-402, We Leave The Sovereignty of the Indonesian Sea to You, Goodbye, Happy Sailing To Eternity (writer : Muhammad Adi Wibowo, M.Si)

48-53

National Defense in the 1000 ARMY NCO Program Special Autonomy in West Papua (writer :Colonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH)

54-60

The Role of the Navy in Assisted Accidents at Sea As A Part of Military Operations Other Than War (OMSP) (writer: Lieutenant Colonel (KH/W) Elyah Musarovah)

Lens Focus >>

61-63



THE INDONESIAN MINISTRY TO BUILD A STRONGER RELATIONSHIP WITH THE



Photo : Private Document of Minister of Defense of the Republic of Indonesia

The Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto, Thursday (8/4), conducted a working visit to South Korea to carry out a courtesy visit to South Korean Defense Minister YM Suh Wook and continued with a bilateral defense meeting. The Indonesian Defense Minister's Courtesy Call to South Korean Defense Minister Suh Wook was greeted with a military ceremony. In this very warm event, the two countries agreed to strengthen military cooperation which had been going well so far.

In the bilateral defense meeting, the two delegations discussed and exchanged views on several strategic matters in the defense and security sector, including; exchange of regional security views and bilateral cooperation. Discussions on the topic have resulted in a number of information updates and references. The Indonesian Ministry of Defense

is ready to build a stronger defense cooperation relationship with the Republic of Korea (RoK).

The Indonesian Minister of Defense hopes that the *Indonesia-RoK* bilateral relations in the defense sector can make a positive contribution, not only for the national interests of the two countries, but also for maintaining regional security, peace and stability. Defense Minister Prabowo also sees that there are still many opportunities for defense cooperation which need to be explored together, especially in the context of building mutual trust and enhancing cooperation in the defense industry.

On behalf of the Indonesian Government, the Indonesian Defense Minister also expressed his appreciation for the support and contribution of the Korean government and people in handling the COVID-19 pandemic in *Indonesia*. On April 27, 2020,

OF DEFENSE IS READY DEFENSE COOPERATION REPUBLIC OF KOREA

the South Korean Government has provided 10,000 PCR (Polymerase Chain Reaction) Diagnostic Test assistance to the Indonesian Ministry of Defense through the Republic of South Korea's Defense Industry.

This tool is very helpful and useful for *Indonesia* in dealing with Covid-19. The Indonesian Minister of Defense explained that South Korea is one of the most successful countries in the world in overcoming this problem, with policies that are fast, accurate and efficient, as well as support from the Korean people.***



Photo : Private Document of Minister of Defense of the Republic of Indonesia

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, took a group photo during a Courtesy Call to the Minister of Defense of South Korea, YM Suh Wook, Thursday (8/4) in South Korea.



The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, Friday (9/4), made a Courtesy Call to the Prime Minister of the Republic of Korea Chung Sye-Kyun, at the RoK Prime Minister's Office, Seoul, South Korea.

THE INDONESIAN DEFENSE THE PRESIDENT AND PRIME THE REPUBLIC

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto, Friday (9/4), carried out a courtesy call to the Prime Minister of the Republic of Korea Chung Sye-Kyun, at the RoK Prime Minister's Office, Seoul, South Korea. The Indonesian Minister of Defense explained that the purpose of his working visit to South Korea was in a series of The Roll-Out Ceremony of the KF-X/IF-X prototype. Previously, on Thursday (8/4) the Indonesian Minister of Defense also carried out a courtesy visit to the President of the Republic of Korea Moon Jae-In

In this meeting with Prime Minister Chung, the Indonesian Minister of Defense expressed his appreciation for the friendly relations between *Indonesia* and South Korea under a Special Strategic Partnership and realized the importance of South Korea as Indonesia's partner in its contribution to peace and prosperity at the national, regional and international levels. Furthermore, the Indonesian Ministry of Defense and related agencies in the defense sector are trying to build partnerships with the foreign defense industry that can have a positive influence on the development of *Indonesia's* defense industry, including South Korea.

The Indonesian Defense Minister also congratulated the South Korean government on achieving the ability to produce next-generation fighter jet prototypes, and expected PM Chung's support in efforts to strengthen relations and cooperation in the defense industry of the two countries.

Currently, the bilateral defense relations between *Indonesia* and South Korea have been running well under the umbrella of defense cooperation in the form of "Agreement between the Government of the Republic of *Indonesia* and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense" which was signed in Jakarta on 12 October 2013 by the two Ministers of Defense. Some of the ongoing defense / military cooperation between the two countries includes education, official visits, dialogue forums and the defense industry. ***

MINISTER MEETS MINISTER OF OF KOREA

DEFENSE MINISTER PRABOWO ATTENDS THE KF-X COMBAT AIRCRAFT ROLL-OUT CEREMONY



Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto on Friday (9/4), attended the Roll-Out Ceremony of the KF-X / IF-X next generation fighter jet prototype in South Korea

Photo : Private Document of Minister of Defense of the Republic of Indonesia



Photo : Private Document of Minister of Defense of the Republic of Indonesia

10 **T**he Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, on Friday (9/4), attended the Roll-Out Ceremony of the KF-X/IF-X next-generation fighter jet prototype in South Korea. The event was inaugurated by the President of the Republic of Korea Moon Jae-In, accompanied by the Minister of Defense of the Republic of Korea Suh Wook and the Minister of Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Kang Eun-Ho.

Defense Minister Prabowo attended this event at the invitation of the Government of the Republic of Korea on behalf of the Government of Indonesia.

In this KF-X/IF-X Roll-Out Ceremony , the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, also gave his speech in a virtual way where he congratulated the first launch of the KFX fighter prototype . In his remarks, President Jokowi explained that since 2010 Indonesia and the Republic of Korea have signed an MoU on cooperation in the development of KFX and IFX combat

Roll-Out Ceremony of the next generation KF-X / IF-X fighter jet prototype in South Korea.



aircraft to meet the needs of defense equipment in the form of combat aircraft of the two countries within the next 30 to 40 years.

Therefore, President Jokowi congratulated all entities in the Republic of Korea for the first launch of the KFX fighter prototype. President Jokowi hopes that this first prototype can become a "landmark moment" for the Korean state in general and in particular for the Korean aviation industry.

President Jokowi also hopes that the successful launch of the first KFX prototype will continue to provide positive benefits for defense cooperation between Indonesia and Korea. ***



DEFENSE MINISTER PRABOWO HANDED OVER THE AIRCRAFT MADE BY THE NATIONAL INDUSTRY CN235- 220 TO THE SENEGAL AIR FORCE

Minister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto with Chief of Air Force of Senegal BG Papa Souleymane SARR, in the cabin of the CN235-220 MPA aircraft, during the handover of the aircraft made by the national industry CN235-220 MPA to the Air Force of the Republic of Senegal, from the Hangar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia (PTDI) in Bandung, Thursday (18/3).

Minister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto handed over the aircraft made by the national industry CN235-220 MPA to the Air Force of the Republic of Senegal, from the Fixed Wing Hangar of PT Dirgantara Indonesia (PT.DI) in Bandung, Thursday (18/3). Also attending the event was Chief of Air Force of Senegal BG Papa Souleymane SARR, President Director (Managing Director) of PT. DI Elfien Goentoro, and Managing Director of PT NTP Tarmizi Kemal Fasya Lubis.

12 Defense Minister Prabowo said in his remarks that the handover of the CN235-220 MPA Airplane to the Republic of Senegal Air Force should be proud because this time the aircraft was the third aircraft purchased by the country. "PT.DI is a pride for Indonesia. PT.DI

is the hope of the Indonesian people, we really need aerospace technology, aerospace industry. This is the industry of the future, the industry that is the most difficult and the most sophisticated," said the Indonesian Minister of Defense.

Defense Minister Prabowo continued in his speech, PT. DI was actually a pioneer in the revival of Indonesian industry in the 90s but due to the dynamics of world politics, the direction of development of PT. DI experienced obstacles. However, we should be grateful, in the midst of challenges over the last 20 years, PT.DI has managed to survive and is still successful in selling its aircraft and helicopters. The Ministry of Defense is determined that PT.DI can bounce back to its original place.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

"The President has instructed the Ministry of Defense to encourage PT.DI and other defense industries. To really support PT.DI so that it can take a place as a pioneer again in Southeast Asia and even Asia," said the Minister of Defense Prabowo.

Meanwhile, the Chief of Air Force of Senegal, Papa Souleymane SARR, stated on the occasion that the Republic of Senegal had used aircraft produced by PT. DI for 10 years and this is the third plane. According to him, the CN235-220 MPA aircraft is a special one because it is used as an airplane patrol, different from the two previous aircraft. "We hope to get the same satisfaction as the previous two planes," explained the Senegal Chief of Air Force.

The Chief of Air Force of Senegal continued, the cooperation between Senegal and Indonesia had been very well established because of the similarities in culture between the two countries. Senegal continues to seek the best opportunities to share experiences and future cooperation with Indonesia.

DEFENSE MINISTER PRABOWO CHAIRED THE KKIP PLENARY MEETING IN 2021

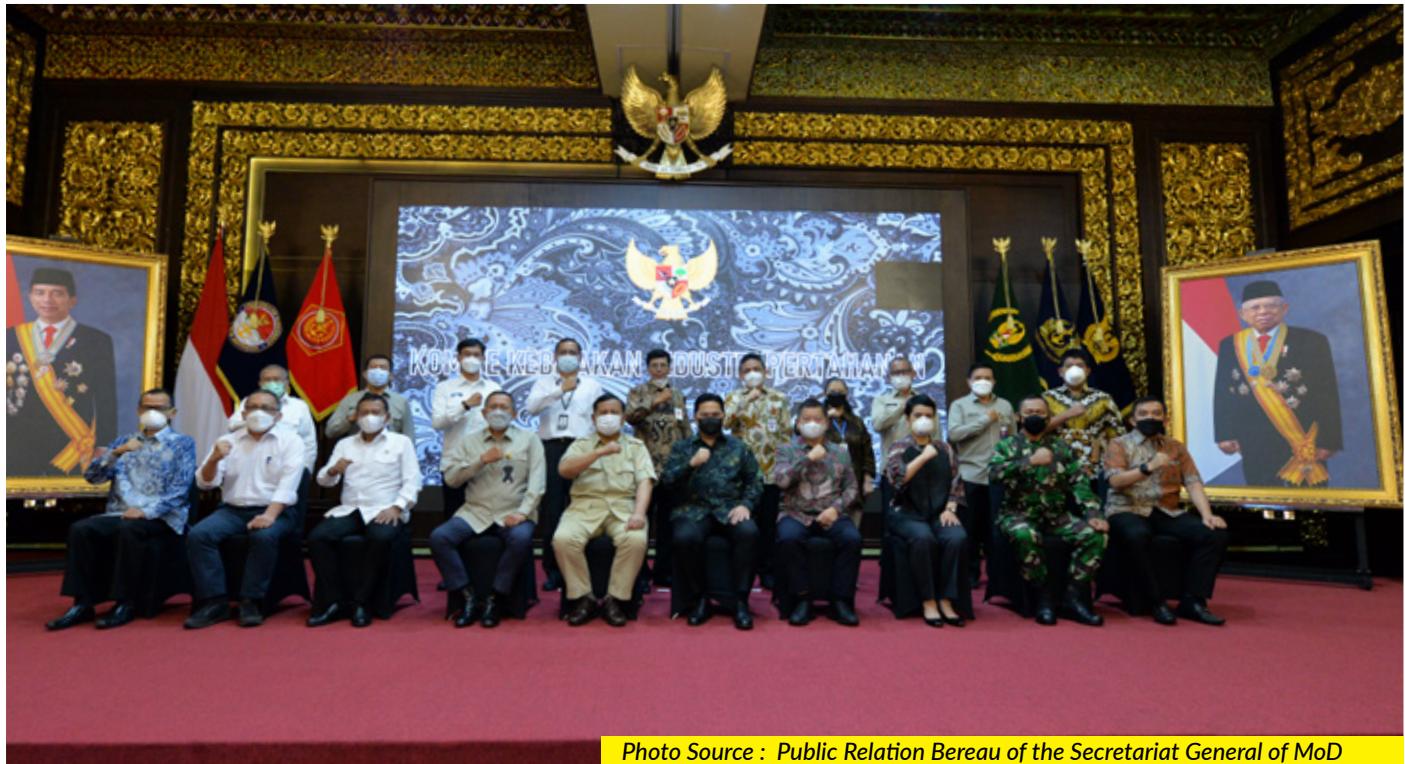


Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Minister of Defense Prabowo Subianto, Joint Photo with Minister of BUMN Erick Thohir, Minister of National Development Planning/Bappenas Suharso Manoarfa, Deputy Minister of Defense M. Herindra, and Katimlak KKIP Lt. Gen. TNI (Ret.) Suryo Prabowo and several officials from related ministries who are also members KKIP, Thursday (20/5) at the Ministry of Defense, Jakarta.

Defense Minister Prabowo Subianto as the Daily Chair of the Defense Industry Policy Committee (KKIP) chaired the KKIP Plenary Meeting in 2021, Thursday (20/5) at the Ministry of Defense, Jakarta. The agenda at the meeting included discussion of follow-up directions from the President of the Republic of Indonesia as the Head of KKIP at the KKIP Session at the Bogor Palace, April 13, 2021.

Present at the KKIP Plenary Meeting was Minister of BUMN Erick Thohir as Deputy Head of the KKIP Daily, Minister of PPN/Bappenas Suharso Manoarfa as a Member of KKIP, the Vice Minister M. Herindra as KKIP Secretary, and KKIP Katimlak Lt. Gen. TNI (Ret.) Suryo Prabowo.

Also attending were several officials from the relevant Ministries who were also KKIP Members,

including the Director General of Higher Education Ministry of Education and Culture, Research and Technology Taufik Bawazier who represented the Minister of Education and Technology-Research and Technology, the Secretary General of the Ministry of Communication and Information, Mira Tayyiba representing the Minister of Communication and Information, the Director General of Management, Financing and Risk of the Ministry of Finance Dwi Puji Astuti representing the Minister of Finance, Assistant for General Planning for the Commander in Chief TNI Rear Admiral TNI Heru Kusnanto representing the TNI Commander and Police Chief Assistant Inspector General Pol Firman Shantyabudi representing the National Police Chief.

To achieve the independence of the domestic defense industry, Minister of Defense Prabowo in his remarks conveyed several directions from the



Photo Source: Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Minister of Defense Prabowo Subianto as the Daily Chair of the Defense Industry Policy Committee (KKIP) chaired the 2021 KKIP Plenary Meeting, Thursday (20/5) at the Ministry of Defense, Jakarta KKIP Plenary Meeting.

President of the Republic of Indonesia which were conveyed at the KKIP Session last April, including the need for continuity in the procurement of Alpalhankam.

"To achieve independence also requires mastery of technology. For that, it needs the participation of all parties, especially higher education and experts in the field of electronics," explained the Minister of Defense Prabowo.

Next is the President's direction that the defense spending paradigm must be changed into a defense investment. The defense budget must be managed properly so that it can help increase the national economy.

"Therefore we have to find out how to implement trade returns, local content, offsets, transfer of

technology , and details of defense investment in every procurement of defense and security from abroad," said the Minister of Defense.

To achieve independence in the defense industry, the Minister of Defense added the need for a long-term Strategic Plan (Renstra) so that it could become a reference for building defense industry independence, namely by having a long-term master plan . "The President wants a long-term master plan. Not annually," said the Minister of Defense.

Meanwhile, Defense Minister Prabowo emphasized the need for recommendations and evaluation from KKIP in all purchases of defense equipment. This is to ensure that *Indonesia* benefits from all aspects of every purchase of defense equipment. ***

GOVERNMENT OF INDONESIA AND GOVERNMENT OF JAPAN SIGN AGREEMENT ON TRANSFER OF DEFENSE EQUIPMENT AND TECHNOLOGY



Photo : Private Document of Minister of Defense of the Republic of Indonesia

Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto together with Indonesian Foreign Minister Retno LP Marsudi, Tuesday (30/3), conducted a courtesy visit to Japanese Prime Minister YM Yoshihide Suga, in Tokyo, Japan. This courtesy visit to the Japanese Prime Minister was part of a series of visits by the Indonesian Minister of Defense to Japan. During this visit, the Indonesian Minister of Defense also held a 2 + 2 meeting, namely a joint meeting between the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defense of the Republic of Indonesia - Japan.

Prime Minister Suga welcomed the visit of Foreign Minister Retno and Minister of Defense Prabowo to Japan and expressed hope that the

Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of Indonesia on the Transfer of Defense Equipment and Technology signed on the same day, Tuesday (30/3), will be a foundation for deeper security cooperation between the two countries. In this meeting, the two sides agreed to promote security and defense cooperation including the transfer of defense tools and technology.

In addition, it also discussed capacity building and sharing experiences and knowledge about Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR. This topic is very important considering that both countries often face various natural disasters so that professional human resources are needed in dealing with disasters.



2+2 meeting between Defense Minister Prabowo Subianto and Foreign Minister Retno Marsudi with Japanese Defense Minister Nobuo Kishi and Foreign Minister Toshimitsu Motegi



At the 2 + 2 *Indonesia-Japan Minister of Foreign Affairs and Defense Meeting* this year, several topics in the defense sector have been discussed. One of the topics discussed was state policy regarding the modernization of Indonesian defense equipment and the development of the national defense industry. To support this mission, it is necessary to build a wider network and international cooperation with friendly countries such as Japan. In this 2 + 2 activity, the Indonesian Minister of Defense also signed a cooperation agreement for the transfer of defense equipment and technology which marked the start of cooperation between the Indonesian and Japanese defense industries.

Apart from carrying out talks on the defense industry, the 2 + 2 meeting also discussed military cooperation including; in the field of education,

official visits, as well as dialogue forums in accordance with the scope of the 2015 Defense Cooperation and Exchange Memorandum of Understanding. In addition, the Indonesian Minister of Defense also encourages the realization of joint training between the two armed forces. ***

THE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE EXPECTS THE DEFENSE INDUSTRY OF INDONESIA TO ACHIEVE THE TARGET OF THE WORLD'S TOP 50 COMPANIES



Deputy Minister of Defense (*Wamenhan*) M. Herindra attended the Indonesian Defense Industry (Indhan) BUMN Cluster Focus Group Discussion (FGD) virtually, at the Ministry of Defense, Jakarta, Wednesday (24/3). The holding of this FGD is a series of processes for the merger of the domestic Defense Industry (Indhan) in one container with the name *Indonesia Defense Club* (IDC).

In his virtual remarks, the Deputy Minister of Defense expressed his warm welcome to the holding of the FGD, which aims to inventory the aspirations of defense industry players, with the hope of achieving the target of becoming the world's top 50 companies in the defense sector by 2024.

Meanwhile, to support this target, the Deputy Minister of Defense further explained that the government has prepared a legal umbrella as a basis, which includes the Defense Industry, Defense Industry Trade Rewards, Defense Industry Development, Procurement of Defense and Security Equipment in the Ministry of Defense and the TNI and the Job Creation Law. "Everything must work together between defense stakeholders and Indhan BUMN, so that through this moment it is expected to become the locomotive of defense industry independence," said Deputy Minister of Defense M. Herindra.

Apart from the Ministry of Defense, the Indonesian Defense Club (IDC) FGD with the theme "Capability and Capacity of State-Owned Defense Industries in Supporting the Fulfillment of National Defense and Security Equipment (Alpalhankam) Equipment Procurement", was also followed by the Defense Industry cluster from the Ministry of BUMN, Ministry of Research and Technology, Ministry PPN/Bappenas, Ministry of Industry, Ministry of Finance, TNI Headquarters, and Police Headquarters. Meanwhile, the material discussed in the FGD revolved around the Defense and Security Policy and Planning, Technology and Research & Innovation, as well as the Commitment of the Defense Industry and the Improvement of Domestic Components (TKDN). ***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Focus Group Discussion (FGD) participants of the Indonesian Defense Industry (Indhan) BUMN Cluster virtually, at the Ministry of Defense, Jakarta, Wednesday (24/3).

INDONESIA INVITES ASEAN COUNTRIES AND ASEAN PARTNER COUNTRIES TO COLLABORATE TO HANDLE THE IMPACT OF THE PANDEMIC



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, MDS, Thursday (8/4) attended the ASEAN Defense Senior Officials' Meeting Plus virtually at the Ministry of Defense.

Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, MDS, Thursday (8/4) attended the ASEAN Defense Senior Officials' Meeting Plus in a virtual manner led by Brunei Darussalam host Brigadier General (Rtd) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah, Permanent Secretary of the Ministry of Defense, at Kemhan, Jakarta. This meeting was attended by each Chair of ADSOM and their delegates and the Deputy Secretary-General of the ASEAN Political-Security Community for 2021-2024 HE Robert Matheus Michael Tene, who recently took office. ADSOM-Plus continues the momentum of defense cooperation and further supports this work, which begins with the ADSOM-Plus WG on February 4, 2021.

ADSOM-Plus is the final preparatory meeting for the ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) which will be chaired by Brunei Darussalam for the 8th iteration which will be held online on June 16, 2021. In this meeting, Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan

Taufanto, MDS, explained Indonesia's views on current regional issues such as handling the impact of the Covid-19 Pandemic and Indonesia's efforts in dealing with non-traditional challenges of terrorism. The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of *Indonesia* invited all ASEAN countries and ASEAN partner countries to work hand in hand to overcome the impact of the Covid-19 Pandemic.

In facing non-traditional global security challenges such as terrorism, *Indonesia* has made several efforts in promoting international cooperation in counter-terrorism. *Indonesia* aims to promote comprehensive and sustainable measures. Under the ASEAN ADMM Our Eyes as a strategic information exchange program in counter-terrorism which is an Indonesian initiative, emphasizes *Indonesia*'s efforts in ASEAN's collective commitment to face the threat of terrorism in the region.

The meeting recorded a report from the ADSOM-Plus WG, where the co-chair of the 7 ADMM-Plus Expert Working Groups (ADMM-Plus EWGs) shared the progress of each EWG; and an extension of the current cycle to the first quarter of 2024. In addition, the meeting also provided an opportunity for the ADSOM-Plus Chair to exchange views on the regional and international security environment. ADSOM Plus this time was attended by delegations from ASEAN countries and ASEAN partner countries including Australia, the United States, South Korea, China, India, Japan, New Zealand, Russia. ***

INSPECTOR GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE LEADS THE SECRETARIAT AND INSPECTOR I OF THE INSPECTORATE GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE



Inspector General Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana, SIP, MM, Friday (7/5), led the Appointment of Oaths, Inauguration and Handover of the Positions of Secretary of the Inspectorate General of the Ministry of Defense and Inspector I of the Inspector General of the Ministry of Defense, at the Ministry of Defense, Jakarta.

Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Inspector General of the Ministry of Defense, Lieutenant General TNI Ida Bagus Purwalaksana, SIP, MM, Friday (7/5), led the Appointment of Oaths, Inauguration and Handover of Positions as Secretary of the Inspectorate General of the Ministry of Defense and Inspector I of Inspectorate General of the Ministry of Defense, at the Ministry of Defense, Jakarta. The position of Ses Inspector General of the Ministry of Defense was handed over from Brigadier General TNI Dwi Mastono, SE, MM, to Brigadier General TNI Rahmat Triyono, SE, and Inspector I Itjen Kemhan from Brigadier General TNI Rahmat Triyono, SE, to Col. Cba Gatot Murdiyantoro, SE. Furthermore, Brigadier General Dwi Mastono, SE, MM, will carry out his new assignment at the Defense University.

In his remarks, the Inspectorate General of the Ministry of Defense emphasized that the Inspectorate General of the Ministry of Defense was an element implementing the duties of the minister of defense in the field of internal supervision within the Ministry of Defense. This task can be realized if manned by human resources who have quality, integrity, loyalty and broad insight and are able to understand and follow the prevailing laws and regulations in carrying out their duties.

"For this reason, the positions of the Secretary and Inspector I of the Inspectorate General of the Ministry of Defense must be entrusted with personnel who have the best competence and quality to carry out these tasks," said the Inspector General.

In this simple handover ceremony, the Inspector General of the Ministry of Defense also explained that assignment rotation is a common thing in an organization and is one of the leadership's efforts to improve organizational performance. And the appointment of a position within the Inspectorate General of the Ministry of Defense is an implementation of personnel development to increase knowledge, experience and insight into thinking faced with the implementation of main tasks and the organization so that it continues to run dynamically.

Inspector General of the Ministry of Defense, Lieutenant General TNI Ida Bagus Purwalaksana, assessed that the tasks carried out by Brigadier General TNI Dwi Mastono and Brigadier General TNI Rahmat Triyono have been going well in terms of performance results so far and would like to thank the old officials for the dedication and hard work that has been given so far so as to be able to improve the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Defense. To Col. Cba Gatot Murdiyantoro, who received a promotion as the new official Inspector I of Inspectorate General of the Ministry of Defense, Inspector General of the Ministry of Defense hopes that the duties and positions that have been carried out so far can be used as initial capital in carrying out duties as Inspector I, so that it can create conditions for the Inspectorate General of the Ministry of Defense to be more developed and more advanced and can dynamize the ongoing development situation to be able to create a more conducive work atmosphere, but still in a family atmosphere for the advancement of the Inspectorate General of the Ministry of Defense. ***

The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Invites Media Crews to See PT Pindad's Alpalhankam Product Achievements

In the series of Defense Tour 2021 activities, The Head of the Public Relations Bureau of the Ministry of Defense's General Secretariat (Karo Humas Setjen Kemhan) Air Commodore TNI Penny Radjendra ST., M.Sc., M.Sc. and the Special Assistant to the Minister of Defense for Media and Institutional Relations Ghina Ghaliya Quddus, along with several National Mass Media Journalists had the opportunity to visit PT Pindad (Persero), Tuesday (30/3) in Bandung.

The 2021 Defense Tour activity is organized by the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense and is carried out while still being disciplined in implementing health protocols. Through this visit, The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense invited the media crew to see first hand the various achievements of the Defense and Security Equipment Tool (Alpalhankam) products that have been able to be produced by PT Pindad.

The arrival of the 2021 Defense Tour entourage was received directly by the President Director of PT Pindad (Persero) Abraham Mose and his staff. Starting with a brief presentation by the President Director of PT Pindad, the visit was continued with a review of the PT Pindad production facility and ended with a shooting activity. The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense said, through the 2021 Defense Tour , it is hoped that the products that have been successfully achieved by PT. Pindad, can be narrated and published by journalists to the public both nationally and internationally.

As frequently conveyed by the Minister of Defense, The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense said that basically national defense is not only the responsibility of the TNI, but also all components of the nation. And the defense industry is one of the main supporting components in the advancement of a national defense.



Photo Source : Public Relation Bereau of the Secretariat General of MoD

In the series of activities of the Defense Tour 2021, the Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Air Commodore TNI Penny Radjendra ST., M.Sc., M.Sc. and Special Assistant to the Minister of Defense for Media and Institutional Relations Ghina Ghaliya Quddus, together with several National Mass Media Journalists had the opportunity to visit PT Pindad (Persero), Tuesday (30/3) in Bandung.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

"On the other hand, journalists are also expected to be able to become extensions of our efforts independently so that this country is getting stronger in the field of national defense," added The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense.

Meanwhile , the President Director of PT Pindad said that he welcomed and felt proud to receive the visit of the 2021 Defense Tour group from the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense, which was expected to be able to help socialize how the progress and capabilities of the domestic defense industry, especially in this case PT Pindad.

Furthermore, the Managing Director of PT Pindad explained the various Alpalhankam products produced by PT Pindad, ranging from various variants of weapons, munitions, special function vehicles, combat vehicles, tactical vehicles to medium tanks. "In addition, Pindad also produces industrial products including heavy excavator production, known as the Excava 200 which has been sold quite a lot," added the Managing Director of PT Pindad.

PT Pindad also produces gas cylinders for Pertamina, generators and electric machines, agricultural machinery

to transportation infrastructure for trains and marine equipment as well as general mining services.

The President Director of PT Pindad revealed that the target direction for PT Pindad's transformation in the future is how to become one of the 100 best global defense industry companies by 2024.

Also accompanying the The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense in the 2021 Defense Tour activities included the Head of Rohumas Opinion Section, Secretariat General of the Ministry of Defense Col. Inf. Drs. Silvester AT, MA, Head of Infopublikata Rohumas, Secretariat General of the Ministry of Defense Col. Laut (P) Hadi Prayitno, Head of News Agency for Public Relations, Secretariat General MOD Col. Arm. Joko Riyanto, and the Head of Sub-Section of the Hubmedmas News Section of the Secretariat General of the Ministry of Defense. ***

PUBLIC RELATIONS BUREAU OF THE SECRETARIAT GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE LAUNCHES KEMHAN PODCAST “DEFENSE’S ADVOCATE”



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN

“Perubahan kemerdekaan sebutar-butiran. Sejengkal tunangan tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak sentar akan gerakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap-siap.”
- Jenderal Sudarmaditjo



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

The recording of the first podcast edition, Tuesday (13/4) at the Podcast studio of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense, which presented an observer on Politics and International Relations, Dr. Dinna Prapto Raharja, and Head of Public Relations Bureau Secretary General of the Ministry of Defense Rear Marshall TNI Penny Radjendra, ST, M.Sc., M.Sc.

The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Air Commodore TNI Penny Radjendra, ST, M.Sc., M.Sc., representing the Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, MDS, Tuesday (13/4), inaugurated the Kemhan Podcast in the Public Relations Bureau Hall AH Nasution Building, 9th Floor Kemhan, Jakarta.

Inauguration of Defense Podcast is characterized by the implementation of the recording Podcast first edition in studio Podcast Public Relations Bureau of the Ministry of Defense General Secretariat presenting Dr. Dinna Prapto Raharja, Political and International Relations observer, and The Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense Air Commodore TNI Penny Radjendra, ST, M.Sc., M.Sc.

In the mandate of the Secretary General of the Ministry of Defense which was read by the Public Relations Officer of the Secretariat General of the Ministry of Defense, it was explained that public relations activities in the middle of the development of Information Technology need to be packaged creatively and innovative, because these activities are the spearhead in building a positive image and increasing public trust. In the government sector, Podcast can be categorized as innovations or creative ideas in public service. Public service is a measure of government performance and a reflection of bureaucratic reform. This is one of the advantages of podcast.

The Secretary General of the Ministry of Defense continued, because of that, it would be right for the Ministry of Defense to take innovative steps in implementing public relations activities by adding digital information delivery channels in the form of podcast. This podcast will be a means of disseminating information and literacy on national defense, especially millennial. The Secretary General of the Ministry of Defense hopes that with the inauguration of this podcast, the Ministry of Defense's work programs such as a reserve component, state defense can be conveyed properly and appropriately to the public.

To all Kasatker/Subsatker, the Secretary General of the Ministry of Defense emphasized that this information delivery facility should be maximally utilized. Thus, it is hoped that it can increase public understanding of national defense which will later have an impact on public participation in the success of Kemhan's programs. This will also have an impact on improving the quality of public services.

Present at the inauguration of the Kemhan Podcast , the Head of the Ministry of Defense's Staffing Bureau Brigadier General TNI Aufit Chaniago, SIP, the Head of the Legal Bureau of the Ministry of Defense Air Commodore TNI Yuwono Agung N., SH, MH, and the Head of the Ortala Bureau of the Ministry of Defense Brigadier General TNI Antonius Bambang Budi Wibowo.***



DOMESTIC SUBMARINE KRI ALUGORO-405 STRENGTHENS INDONESIAN NAVY MAIN WEAPON SYSTEM



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

The Ministry of Defense (Kemhan) has completed the construction of the first submarine made by the domestic defense industry PT PAL Indonesia in collaboration with Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) South Korea.

The submarine, named Alugoro-405, was handed over by DSME to the Ministry of Defense, then handed over to the TNI Headquarters and successively to the Indonesian Navy Headquarters and Pangkoarmada II as users, Wednesday (17/3) at PT PAL Indonesia, Surabaya.

In the signing procession of the Submarine Handover, Minister of Defense Prabowo Subianto in his remarks appreciated this as a historical milestone in which for the first time a shipyard owned by a national company, PT. PAL successfully took part in submarine production.

"We realize together how important our defense is. We are building our defensive capabilities. Not because we want to be brave. Not because we want to threaten anyone. Not. Over and over again, it has

been passed down from the founder of our nation, we emphasize that the Indonesian nation loves peace but loves independence more," said Defense Minister Prabowo.

In front of all invited guests, the Minister of Defense said that *Indonesia* must have sufficient strength to maintain sovereignty, protect all bloodshed, territorial integrity and the threat of foreign troops. "Today is a step forward for all of us to build our army in an even stronger direction," he added.

Through strategic planning regarding the modernization of defense equipment, Defense Minister Prabowo Subianto in accordance with President Jokowi's mandate has ordered that the entire domestic defense industry must be included in the process of rejuvenating all state defense equipment.

Defense Minister Prabowo explained that many of the defense equipment were very old and it was time to be rejuvenated. For this reason, the role of the defense industry will be very prominent. "We hope for the participation, initiative, hard work of our



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

technologists, our scholars, our scholars, from our experts. We hope all will unite to work hard," he said.

The procurement of the Alugoro-405 Submarine is one of the defense force development programs, especially the Marine Matra. Before Alugoro-405, the Ministry of Defense handed over the first submarine KRI Nagapasa-403 and the second submarine KRI Ardadedali-404 built in Korea to the Indonesian Navy. With the handover of the Alugoro-405 Submarine, Defense Minister Prabowo is confident that the submarines, the three orders from the Ministry of Defense, can strengthen the TNI Alutsista, especially in the ranks of the Indonesian Navy.

This is also a proud achievement as well as increasing the deterrent effect for Indonesia's national defense which makes *Indonesia* the only country in the Southeast Asia region capable of building submarines. This submarine construction includes the Transfer of Technology process to PT. PAL Indonesia (Persero).

Present to witness the signing of the Minutes of Handover of the Submarine KRI Alugoro-405,

Minister of Defense, Minister for the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) South Korea Gang Eun-Ho, Chairman of Commission I DPR RI Meutya Hafid, Minister of BUMN represented, South Korean Ambassador to Indonesia Park Tae-sung, TNI Commander Marshal TNI Hadi Tjahjanto, Navy Chief of Staff Admiral TNI Yudo Margono, Inspector General of the Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwakarsana, Directorate of Defense Facilities of the Ministry of Defense Air Vice Marshal TNI Yusuf Jauhari as well as a number of Ministry of Defense officials, as well as several representative officials from other relevant agencies.***



28

THE ROLE OF THE MINISTRY OF DEFENSE'S FEASIBILITY CENTER IN NATIONAL DEFENSE (PUSLAIK KEMHAN)

By: Colonel. Tek Suparman S.T
Senior Feasibility Inspector of Air Mode of the Ministry of Defense

Preliminary

The Ministry of Defense Feasibility Center or often abbreviated as *Puslaik Kemhan* is the executing echelon of the Minister of Defense (Echelon II) which is under and responsible to the Minister through the Secretary General of the Ministry of Defense. The current head of the Ministry of Defense Feasibility Center (*Kapuslaik*) is TNI First Admiral Teguh Sugiono, SE, MM, an alumni of the Naval Military Academy of Indonesia in 1990, who has led Puslaik since mid-2019.

Talking about the feasibility of the state/defense/military, in general the Indonesian people are still limited to knowing the existence of the Ministry of Defense Feasibility Center in certification of the feasibility of non-civilian products, especially the Defense and Security Equipment (*Alpalhankam*) including the military, unlike the role of the Ministry of Transportation which is the single worthiness authority of the feasibility in certifying civilian transportation modes and their supporters in the country.

Puslaik Kemhan is an eligibility authority representing the government and the state, and is not the sole authority for certifying the eligibility of all the Defense and Security Equipment (*Alpalhankam*) in the country. There are other authorities within the TNI, namely the Army Feasibility Service (*Dislaikad*) for the Indonesian Army, the Navy Material Feasibility Service (*Dislaikmata*) for the Indonesian Navy and the Air Force Flight and Work Safety and Safety Center (*Puslaiklambangjaau*) for the Indonesian Air Force.

Although it has been around for a long time, currently the Strategic Role of *Puslaik Kemhan* as state authority has not been well published, and there are still major problems, including regulatory/standard issues, issues of Human Resources (HR), problems of synergy between stakeholders, and the need to consider validation of the organization to maximize the future duties and functions of the *Puslaik Kemhan*.

History of *Puslaik Kemhan*

In almost all countries, state eligibility or military eligibility (apart from civilian eligibility) always has its headquarters in the Ministry or Ministry of Defense, which in *Indonesia* after the independence of 17 August 1945 was known as the Ministry of Defense, which is one of the 12 Departments formed as part of the Presidential Cabinet at that time.

There is no definite information since what year the duties and functions of eligibility were under the Ministry of Defense, but it is estimated that the existence of military feasibility began in the early 1980's since the start of the defense industry in *Indonesia* such as *IPTN*, *PAL* and *Pindad*.

Within the Permenhan No. 1 of 2005 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Ministry of Defense; the Directorate General of Defense Facilities at the Ministry of Defense, which is called the Directorate General of Defense Facilities, has a Directorate of Standardization and Feasibility (*Ditstandlaik*). Under the Ministry of Defense organizational validation, based on the Ministerial Regulation Number. 16/2010, concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Defense, there was a change in nomenclature from the Director General of Defense Facilities to the Defense Facilities Agency (*Baranahan*), and the *Ditstandlaik* also changed to the *Baranahan* Ministry of Defense Feasibility Center. In 2019, based on Permenhan Number 14 of 2019, there was a change in the structure of the *Puslaik* organization, which was originally under Baranahan, moved to become the Feasibility Center directly under the Minister of Defense.

The Organization of *Puslaik*

Based on Permenhan 14 of 2019, *Puslaik Kemhan* is one of the 4 centers to support the Minister of Defense which is directly under the Minister of Defense. *Puslaik* is in charge of providing substantive support to all units in the Ministry of Defense/TNI in the fields of design certification, product feasibility, quality assurance/management systems for production and construction facilities as well as

maintenance/repair facilities for defense facilities in the land, sea and air dimensions as well as personnel certification. military eligibility organizer.

In carrying out its duties and functions, the Ministry of Defense Feasibility Center has 3 fields as the implementing authority for the feasibility certification, working according to the type of vehicle/mode of the object to be certified, not according to the Services within the TNI.

First, the Landworthiness Sector (*Bidlaikrat*), is tasked with carrying out the Alpalhankam eligibility certification and the land vehicle Alpalhankam facilities used to support national defense. *Bidlaikrat* is a landworthiness authority that represents the government and the state, which is internationally known as the *Indonesia Military Landworthiness Authority* (IMLA).

Second, the Marine Feasibility Sector (*Bidlaikla*), is tasked with implementing the *Alpalhankam* eligibility certification and the *Alpalhankam* facilities for marine modes/vehicles used to support national defense. *Bidlaikla* is a sea-worthiness authority representing the government and the state, which is internationally known as the *Indonesian Military Seaworthiness Authority* (IMSA).

Third, the Airworthiness Division (*Bidlaikud*), is tasked with implementing the *Alpalhankam* eligibility certification and the *Alpalhankam* facilities for air vehicles used to support national defense. *Bidlaikud* is an airworthiness authority that represents the government and the state, which is internationally known as the *Indonesian Military Airworthiness Authority* (IMAA).



Avibras MLRS eligibility certification

Photo Source : Puslaik Kemhan

Defense Feasibility Objects & Mechanisms

The object of feasibility will affect the method or mechanism of certification to be carried out. In general, the eligibility object is divided into two major groups, namely *Alpalhankam* or the product itself and the second is the various facilities that will support the *Alpalhankam*.

Alpalhankam is all equipment including supporting material to support national defense, which is the main object of eligibility certification. *Alpalhankam* is classified into new *Alpalhankam* as a result of modification/design, *Alpalhankam* as a result of production, and *Alpalhankam* as a result of maintenance.

Whereas the object of certification in the form of facilities is all facilities from an organization/institution/agency having a good Quality Management System (QMS), which can support the life cycle of *Alpalhankam*. These facilities can be in the form of *Alpalhankam* design facilities, *Alpalhankam* production facilities, *Alpalhankam* maintenance facilities, and *Alpalhankam* operational facilities which all have to meet certain standards in order to have the ability to maintain *Alpalhankam* in a proper condition.

The eligibility implementation mechanism really depends on the object to be certified, but in general the activities that are carried out start from the inspection or review of documents, conformity inspection or conformity inspection and testing. These three activities are carried out sequentially so that the certification process can be carried out effectively and efficiently.

Feasibility Inspector

The Puslaik Kemhan in carrying out certification tasks is supported by the Feasibility Inspectors who are formed and fostered by the Ministry of Defense's Puslaik. Currently, Puslaik has formed around 1747 military feasibility inspectors from the Ministry of Defense, consisting of 670 Ground-worthiness Inspectors, 544 Ocean-worthiness Inspectors, and

533 Airworthiness Inspectors. These inspectors are mostly scattered in the TNI/Services, and can be used as the Technical Implementation Team for the Military Feasibility Certification of the Ministry of Defense through the BKO mechanism (under the operational command) in accordance with their field of qualification.

In terms of numbers, the inspectors do look a lot, but maybe only about 40% of the effective ones are due, among others, because they are retired, have become Flag Officers/Colonel, are in strategic positions, are no longer working in the field of qualifications, do not get permission, etc. This number will also decrease again when faced with the large number of activities and the many types of qualifications required to certify an object of eligibility.

Since 2016, the Ministry of Defense military feasibility inspector coaching pattern has implemented an inspector level, where Level I Inspectors can certify series products, Level II Inspectors can certify series products and design or modification products, and Level III Inspectors will certify series products, design products or modification, and the Quality Management System (QMS) of an agency.

At the current conditions, due to budget priorities, the Ministry of Defense Feasibility Center is still limited to form Tk II Inspectors, and does not even have Level III Inspectors, so that many activities are carried out by Level I Inspectors, but with the selection of appropriate qualifications and consideration of work experience.

The Role of the Ministry of Defense Feasibility Center for National Defense

Discussing the role of Puslaik or Feasibility Center itself in national defense is closely related to the above regulations, especially the Defense Law and the Defense Industry Law, including several other related laws such as the Aviation Law and the Shipping Law.

Implementation of the certification of the feasibility of the shipyard facilities of PT. Batamec at Tanjung Uncang Batam Kep. Riau.

The National Defense

According to Defense Law No.3 of 2002, National Defense (*Hanneg*) is all efforts to defend the sovereignty of the country, the integrity of the Republic of Indonesia and the safety of the entire nation from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. The National Defense system is also universal, meaning that it can involve all citizens, territories and other national resources, be prepared early and be carried out in a total, integrated and sustainable manner. National defense consists of 3 main components, namely the main component (TNI), the reserve component (resources that have been prepared) and the supporting component (other national resources).

In the defense law, it is more specifically stated that one form of defense capability development is through research and development of the defense industry and defense technology, and this is reinforced by the Defense Industry Law Number 16 of 2012, where the defense industry management policy requires certification of its facilities and product feasibility.

If we look at the definitions above, there are two general conclusions. First, that the scope of national defense is quite broad, not only within the Ministry of Defense and the TNI, especially with the support and reserve components. Second, that Defense Industry and the technology produced by it must obtain a feasibility certification, so that they have the quality and capability, as well as safety in operation as required.

Feasibility Certification

There are quite a lot of references to the meaning of feasibility, according to the Indonesian Dictionary (KBBI), it is derived from the basic word feasible which means meeting the specified requirements, or which must exist; proper, eligible, suitable. From several references, feasibility is essentially a condition that states that safety regulations or requirements are fulfilled, is in accordance with its basic design and function, and is safe to operate.

32



Photo Source : Puslaik Kemhan

Meanwhile, according to KBBI; certification is authorization, and a certificate is a sign or statement; written or printed from an authorized person that can be used as proof of ownership or an incident. In the world of eligibility according to Permenhan 33/2014 on Military Feasibility, certification is an activity process that starts when the applicant submits an application until issued or issued a proof of pass (certificate of eligibility).

Engine Loading Activities inspection of the ship's foundation in order to install the ship's main engine on the stand.



Photo Source : Puslaik Kemhan

Civil Feasibility vs State Feasibility (Military)

After discussing State Defense and Feasibility Certification, it is necessary to clarify the eligibility position of the Ministry of Defense in the Republic of Indonesia. As previously explained, that in a country, in general there are only two eligibility authorities, namely the civilian eligibility authority and the state eligibility authority, which includes the military eligibility authority.

In Indonesia, the civilian eligibility authority for the mode of transportation and its supporters is generally under the Directorate General -Directorate General within the Ministry of Transportation. Meanwhile, non-civilian eligibility, especially military eligibility under the Ministry of Defense through the Ministry of Defense's Feasibility Center and under the TNI through the eligibility agencies in the Indonesian Armed Forces/Services, namely *Dislaikad* (TNI AD), *Dislaimatal* (TNI AL) and *Puslaiklambangjaau* (TNI AU). 33

The IMAA team carried out verification at AIROD Techno Power Malaysia in order to increase the capability of PT. Nusantara Turbine and Propulsion (NTP).



Photo Source : Puslaik Kemhan

Literally, airworthiness of civil and military ultimately have the same goal, namely safety, the fundamental difference between the two is, airworthiness military sometimes emphasizes functionality and performance and decreasing the level of safety in order that the basic function of Alpalhankam can be achieved. For example, the fighter plane sometimes must perform dangerous maneuvers to avoid enemy fighter plane, while in civilian feasibility this will never be done since there is a potential danger related to safety.

The authority of the Ministry of Defense and TNI's eligibility institutions

The Ministry of Defense's eligibility institution and the TNI/Service eligibility institution can both carry out military eligibility certificates and issue the certificates, but they have different levels of authority.

Puslaik Kemhan is authorized to carry out the initial airworthiness certification (initial airworthiness) of Alpalhankam in the form of certification/validation design approval, and certification of Alpalhankam production of Kemhan procurement series before being submitted to the TNI/Services or other users.

While the TNI/Service eligibility institution has the authority to carry out continuing airworthiness

certification, which is all efforts to maintain the condition of Alpalhankam as long as its life remains in accordance with the requirements, so it is safe to use, meaning that the on going airworthiness role will continue throughout the life of an Alpalhankam.

The Ministry of Defense Feasibility Institution represents the state or government, so naturally it has the authority to make strategic policies that will be derived by the TNI/Services Feasibility Institution in the form of technical policies. The Ministry of Defense's Feasibility Institution can represent the state in activities of an international nature such as feasibility cooperation between countries including state (military) eligibility validation activities to other countries, and can include TNI/Services eligibility institutions in these activities.

The certificate of eligibility issued by the Ministry of Defense Puslaik is more universal compared to that issued by the TNI/Services Feasibility Institution, this is because the Ministry of Defense Puslaik represents the state/government so that the Ministry of Defense's approval can actually be used by feasibility institutions in the TNI/Services and even other state eligibility institutions when conducting verification of eligibility. Meanwhile, the eligibility certificate issued by the TNI/Services eligibility institution is more valid internally because it only represents one of the Services.

Feasibility Stakeholder

Talking about eligibility certification, of course, will only discuss 3 (three) major stakeholders, namely regulators, manufacturers and operators .

Regulators, in this case the government or other appointed agencies, are in charge of making regulations, regulations, standards that will be used as references in the eligibility certification process, including being the executor (Institution/Feasibility Authority) that will implement and supervise their implementation.

Manufacturers, or we can also call them producers, are the parties who design, produce, and maintain from Alpalhankam, who will later use the regulations/specifications/standards made by the regulator, so that they are in accordance with the requirements when implementing the feasibility certification.

The last stakeholder is the Operator or User, is the owner, user or operator of Alpalhankam, so they must keep the Alpalhankam in a proper condition so that it is safe to operate.

Problems of communication, coordination and synergy between stakeholders and within one stakeholder are still problems that are constantly being sought for solutions. Good synergy makes the regulations/standards that have been made can be applied properly and always updated as needed. The role of the Feasibility Center as one of the Regulators and the Feasibility Institution will greatly determine how this synergy can be built.

The Feasibility of the Defense Industry (Indhan)

According to the Indhan Law no. 16 of 2012, Indhan is a national industry consisting of BUMN and BUMS, independently or in groups, which is determined by the government partly or wholly to produce Alpalhankam, maintenance services to fulfill the strategic interests of Defense and Security which are located in the territory of the Republic of Indonesia.

Indhan's development is closely related to a country's eligibility institution, both of them are like two sides of a coin that cannot be separated and



Certification of the Cal.155 mm Caesar cannon

Photo Source: Puslaik Kemhan

must support each other. Indhan's progress will also affect the progress of the feasibility institution, and vice versa.

The feasibility center acts as a guarantor for the quality of Indhan and Indhan products through the eligibility certification process, thereby providing a high level of confidence to users/buyers of Indhan products both domestically and especially users/buyers of other countries. This must be done continuously by Indhan to continue to provide improvements to Indhan products so that they will gradually make these products better and "battle proven" in the eyes of users.

Feasibility Regulations

Worthiness is closely related to regulations, standards, or references in work. The implementation of the feasibility certification requires the existence of regulations/standards/specifications that become the reference/basis in the process. The current Ministry of Defense Feasibility Regulation is still minimal, there is only one Ministerial Regulation (Permenhan) and each Sector (Land, Sea and Air) only has 9-10 Implementation Guidelines, this is still not comparable to the distribution of feasibility objects which are so complex, this is of course it can create a "gray" area in the certification process.

The regulations issued by the *Puslaik Kemhan* mostly regulate how the eligibility process is carried out, while military/Alpalhankam standards/specifications that can be used by stakeholders including the eligibility authority are not yet available, so that current implementation mostly uses existing national (civil) standards or standards in other countries that apply internationally, especially from America (Mil Std) and Europe/NATO (Stanag).

Puslaik's role as a regulator/eligibility authority, *Puslaik* must issue many regulations ranging from general to specific ones, so that they can cover all eligibility objects, and most importantly have a fast mechanism for updating these regulations, because of problems. the main thing at this time is the lack of budget for making regulations in addition to the *Puslaik* organization there is currently no department that specifically deals with the development of feasibility regulations.

Puslaik and the feasibility institution in the TNI must be the leading sector in disseminating existing regulations, because a good understanding of the feasibility mechanism will indirectly affect the process, which in turn will produce a quality product, and safe to operate, thereby increasing the level of confidence from the user.

Bibliography

- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry
- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 concerning State Defense
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning Aviation
- Regulation of the Minister of Defense Number 33 of 2014 concerning Military Eligibility to Support National Defense
- Filippo De Florio. 2016. " Airworthiness - An Introduction to Aircraft Certification and Operations ", Third Edition .
- Chappy Hakim. 2016. "Menjaga Ibu Pertiwi & Bapak Angkasa - Membangun Pertahanan Keamanan Negara".
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005 "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi Ketiga.

Website

- Brief History of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, 2020, , <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/SEJARAH-SINGKAT-KEMHAN.pdf>

By: Muhammad Adi Wibowo, M.Si

Head of Subsection publishing and promotion of public information and libraries Section of
Public Relations Bureau Secretariat General Ministry of Defense



**KRI NANGALA-402, WE LEAVE THE SOVEREIGNTY
OF THE INDONESIAN SEA TO YOU, GOODBYE, HAPPY
SAILING TO ETERNITY**

A number of Indonesian Navy soldiers crew members of the submarine KRI Nanggala 402 are on the hull of the ship.



38 **T**he entire Nation of *Indonesia* has recently been covered in deep sorrow and mournful over the loss of the nation's best son who joined the Navy as the vanguard of the Indonesian maritime sovereignty. In addition to feeling lost, the country is also indebted to the crew members of KRI

Nanggala-402 Submarines who died in carrying out their duties. KRI Nanggala-402 Submarine manned by 53 personnel with Marine Commander (P) Heri Oktavian, on April 24, 2021 was declared submerged 838 meters deep in Bali Waters while carrying out torpedo firing exercises.



Photo : Antara/ M Risyal Hidayat

A series of condolences also came from various circles, ranging from ordinary people to acting countries to the international community for the tragedy of the sinking of KRI Nanggala-402.

One of them came from a Minister of Defense, Prabowo Subianto. Through his official Instagram

account @prabowo, Sunday, April 25, 2021, the Minister of Defense expressed his condolences to the 53 best soldiers of KRI Nanggala-402 and their families who have been left behind.

"I am sure, their entire devotion will not be in vain. And to all the families left behind, may it always be given strength. This country is indebted to the loss you feel," Said Minister Prabowo Subianto in his condolences.

At the end of condolences, Minister Prabowo Subianto also gave a final salute to the soldiers of the Kencana Shark Unit. "KRI Nanggala-402, we leave the sovereignty of the Indonesian sea to you. goodbye. Happy sailing to eternity," wrote Minister Prabowo.

In addition, in his official Instagram account Menhan, it is also written that all the soldiers who have died are the sons of the nation's best sons :

1. Captain (N) Harry Setyawan,
2. Comander (N) Heri Oktavian,
3. Comander (N) Irfan Suri
4. Lieutenant Commander (N) Eko Firmanto,
5. Lieutenant Commander (N) Wisnu Subiyantoro,
6. Lieutenant Commander (N) Whilly,
7. Lieutenant (N) Yohanes Heri,
8. Lieutenant (N) I Gede Kartika,
9. Sub Lieutenant (N) Muhadi,
10. Sub Lieutenant (N) Ady Sonata,
11. Sub Lieutenant (N) Imam Adi,
12. Sub Lieutenant (N) Anang Sutriatno,
13. Ensign (N) Adhi Laksmono,
14. Ensign (N) Munawir,

15. Ensign (N) Rhesa Tri Sigar,
16. Ensign (N) Rintoni,
17. Ensign (N) M. Susanto,
18. Petty Officer Ruswanto,
19. Petty Officer Yoto Eki Setiawan,
20. Petty Officer Ardiansyah,
21. Petty Officer Achmad Faisal,
22. Petty Officer Willy Ridwan Santoso,
23. Petty Officer M. Rusdiyansyah,
24. Petty Officer Ryan Yogie Pratama,
25. Petty Officer Dedi Hari Susilo,
29. Petty Officer Harmanto,
30. Petty Officer Lutfi Anang,
31. Petty Officer Dwi Nugroho,
32. Petty Officer Pandu Yudha Kusuma,
33. Petty Officer Misnari,
34. Petty Officer Setyo Wawan,
35. Petty Officer Hendro Purwoto,
36. Petty Officer Guntur Ari Prasetyo,
37. Petty Officer Diyut Subandriyo,
38. Petty Officer Wawan Hermanto,
39. Petty Officer Syahwi Mapala,
40. Petty Officer Wahyu Adiyas,
41. Petty Officer Edi Wibowo,
42. Petty Officer Kharisma,
43. Petty Officer Nugroho Putranto,
44. Petty Officer Khoirul Faizin,
45. Petty Officer Maryono,
46. Seaman Roni Effendi,
47. Seaman Distriyan Andi,
48. Seaman Raditaka Margiansyah,
49. Seaman Gunadi Fajar,
50. Seaman Denny Richi Sambudi,
51. Seaman Muh Faqihudin Munir,
52. Seaman Edi Siswanto,
53. Civilian Suheri

A few days after the tragedy of the sinking of KRI Nanggala-402, Minister Prabowo Subianto accompanied President of The Republic of Indonesia Joko Widodo to hold a meeting with the extended family of KRI Nanggala-402 soldiers held Thursday (29/4) at Hangar 2 Juanda Airport, Surabaya.

On the occasion of the meeting, Minister Prabowo Subianto said that the families left behind should be proud and keep the good name of the soldiers of KRI Nanggala-402 crew for their sacrifice in safeguarding the sovereignty of the country that died in carrying out the duties of the Indonesian homeland.

"I hope that the families left behind are given strength, strong in facing this calamity. The government and our community institutions and many corporations have taken the decision to safeguard the future of the entire crew members' families. Said Minister Prabowo Subianto while giving moral spirit to the families of KRI Nanggala-402 soldiers. (kemhan.go.id, April, 29 2021)

On the occasion of the meeting, Minister Prabowo Subianto led the ceremony of awarding the Indonesian Honor and Extraordinary Promotion for KRI Nanggala-402 soldiers. The awarding of the honor and promotion is based on the Presidential Decree No. 26/TK/Year 2021 concerning the

awarding of the Star Of Jalasena Nararya, Presidential Decree No. 39/TNI/ Year 2021 on the extraordinary promotion of operations other than posthumous war, Kepmenhan RI No. 466/IV/2021 on the granting of posthumous promotion and Kep Panglima TNI No Kep 341/IV/2021 on the determination of extraordinary promotion of military operations other than posthumous warfare. After the ceremony, continued the awarding of honors and promotion skep to the crew family KRI Nanggala-402 as well as the granting memento from Kasal, Asabri and partners, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Sido Muncul and PLN.

On previous occasions, (Monday, April 26, 2021) The Minister of Defense has also instructed schools under the guidance of the Ministry of Defense, namely SMA Taruna Nusantara Magelang and the University of Defense of the Republic of Indonesia to allocate full places and scholarships for the sons

and daughters of the 53 crew members of KRI Nanggala-402 Submarines and Navy personnel who have died in the task of guarding the country as Heroes of the Nation. Furthermore, The Minister said, for children who received high school education, will be accepted at SMA Taruna Nusantara Magelang with a full scholarship. (kemhan.go.id, April 26, 2021).

As it is known that SMA Taruna Nusantara is a boarding high school located in Magelang Regency, Central Java. The school is also semi-military based, very well known to have a strict selection system and produces many outstanding graduates in various fields.

Meanwhile, for the sons and daughters of KRI Nanggala-402 crew who are currently going to college level, Minister prabowo Subianto has also instructed the Defense University (UNHAN) to allocate a place for them.



Minister of Defense Minister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto during a meeting with the families of Indonesian Navy soldiers ABK KRI Nanggala-402 at Hangar 2 Juanda Airport, Surabaya (Thursday, 29/04).

Photo Source: Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Then for children who are still studying at junior high school, Menhan said that his party is still preparing the education branch of Taruna Nusantara for junior high school level. Meanwhile, for those who are still educated in elementary and junior high schools, the government will provide a full scholarship through the Defense Resource Potential Development Foundation (YPPSDP). YPPSDP is a foundation under the Ministry of Defense that carries out activities to support housing welfare, soldier education and also conduct research on the development of potential defense resources.

By not waiting a long time, the Ministry of Defense through the Foundation for The Development of Potential Defense Resources (YPPSDP) carried out the signing of cooperation with PT Priamanaya Energi on The Provision of Compensation and Assistance for Education Costs of The Son of The Daughter of KRI Nanggala-402 Submarine Crew.

This cooperation agreement was signed between the Chairman of the YPPSDP Maj. Gen. (Ret) Musa Bangun and the President Director of PT Priamanaya Energi Raditya Priamanaya Djan, Monday (3/5) at the Ministry of Defense, Jakarta. On this occasion, Defense Minister Prabowo Subianto, Deputy Minister of Defense, M Herindra, President Commissioner of PT Priamanaya Energi Djan Faridz, as well as several officials in Kemhan also attended the ceremony to witness the signing of the cooperation.

Minister Prabowo Subianto expressed his appreciation to all ranks of PT Priamanaya Energi for his great attention to distribute compensation and assistance to the sons and daughters of the crew of KRI Nanggala-402 Submarines, through the foundation fostered by Kemhan. Furthermore, the Minister of Defense said, the Government in this case President Joko Widodo has given great attention to the entire family of KRI Nanggala-402 crew, starting from the provision of houses and also educational scholarship assistance.

42

Therefore, the Ministry of Defense also seeks to provide welfare concerns for all families who were left behind by KRI Nanggala-402 Submarine Crew Soldiers, who have sacrificed on the battlefield. "Recently we experienced a major disaster of the

loss of by KRI Nanggala-402 Submarine. Surely this disaster is a risk for the soldiers. Nevertheless, it is a call for leaders to think about the welfare and good for the families left by our soldiers, while our soldiers must sacrifice in the field of duty", said Minister Prabowo Subianto quoted from *Kemhan.go.id*, May 3, 2021. Therefore, Kemhan has taken steps through YPPSDP and institutions under the Ministry of Defense, to assist and take care of the educational needs of the children of the crew of KRI Nanggala-402.

Flashback to the sinking of the KRI Nanggala-402

KRI Nanggala-402 was a submarine built in Kiel, West Germany in 1977 by Howaldtswerke-Deutsche Werft, a German shipbuilder. The ship was handed over to the Indonesian government on July 6, 1981 and officially launched by the Minister of Defense Security / Commander of the Armed Forces General Mohammad Jusuf on October 21, 1981 at Ujung Surabaya Pier. (*detik flash/detik.com Sunday, April 25, 2021*).

The moment of sinking KRI Nanggala – 402 when it is estimated to be lost in the waters about 60 miles or about 95 kilometers from the northern island of Bali while conducting torpedo firing exercises warhead.

According to the explanation from the Chief of Naval Staff (KSAL) Admiral TNI Yudo Margono during a press conference with TNI Commander Marshal TNI Hadi Tjahjanto and Defense Minister Prabowo Subianto in Bali, Wednesday (4/21/2021), basically before starting torpedo firing exercises, it was mentioned that all procedures had been implemented. At 2:30 a.m. before the incident, a signal was issued to begin the exercise. About half an hour later, at 03:00, KRI Nanggala-402 requested permission to dive to periscope depth at a depth of 13 meters and make preparations for torpedo firing. (*kompas.com, April 22, 2021*).

Kasal said according to the procedure that in the shooting, the submarine will be accompanied by a tracking sea rider in which there are Kopaska troops as well as from the submarine itself, for later if the torpedo launches, they will follow.



At 03.00-03.30, the bow deck and conning tower of KRI Nanggala-402 are still visible to the sea rider tracking team within 50 meters. After that, at 03:30, the other KRI occupied the position to check the torpedo warning.

Then Admiral TNI Yudo Margono said at 3:46 a.m., the sea rider monitored the periscope and the identifying lights of KRI Nanggala-402 which slowly began to dive and were invisible. In accordance with its procedures in the implementation of torpedo firing, the ship must dive.

Meanwhile, at 03.46-04.46, the shooting point continuously called KRI Nanggala-402, but there was no response. "So it should have been at the time of the sinking, there was still a periscope, still visible, but this immediately sank there was no periscope and communication at that time was not established," said Kasal.

Supposedly, while carrying out torpedo firing, KRI Nanggala requested authorization. However, once authorized, the submarine with the motto "Steadfast To the End" has been called repeatedly, but has yet to respond. Seeing this condition, it was finally decided that a helicopter was flown from one of KRI to perform Visual detection, but the result was nil.

Furthermore, Kasal said, KRI Nanggala-402 is estimated to have arisen at 05:15, but did not appear and was not visible on the surface. Furthermore, the submarine procedure stage is lost contact. Therefore at 05.15 held a sublook procedure, which is carried out if the submarine loses contact and is suspected of having problems.

Then at 06.46, the Navy conducted Submiss procedure, this was applied when 3 hours after losing contact, and all security elements outside to carry out the search and training was delayed. Later

the last signal that will be implemented is Subsunk. This signal is done when the submarine has been confirmed to have sunk with authentic evidence.

In order to obtain the authentic evidence, the disbursement process continued through air monitoring, until finally on Saturday (April 24, 2021), The Commander of TNI Marshal TNI Hadi Tjahjanto in a press conference at Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, revealed that KRI Nanggala-402 Submarine that lost contact on Wednesday (21/4/2021) in the waters north of Bali, has been declared Subsunk (drowned).

The TNI commander said the Navy had found an oil spill around the KRI Nanggala-402 disappearance area and the debris was authentic evidence of the sinking phase of KRI Nanggala-402. "Elements of the Navy have found oil spills and debris that become authentic evidence towards the sinking phase of KRI Nanggala," said the TNI Commander.

On the same occasion the Chief of Staff of the Navy (KSAL) Admiral TNI Yudo Margono also said the evidence in the form of findings of these objects is not owned by public ships and no other ships pass around a radius of 10 miles, so the object is believed to be part of KRI Nanggala-402. The findings include prayer equipment, heat-retaining foam, torpedo tube straightening components, cooling pipe wrappers, oil to lubricate periscopes, and diesel. (Kompas.com, April 25, 2021).

Search and Evacuation Process

Although authentic evidence has been found and indicates KRI Naggala -402 was declared Subsunk, the TNI has not been able to ascertain the current condition of the 53 who manned the Submarine. Therefore, to follow up, all parties in the SAR Team deployed ships and equipment to support the livelihood process of KRI Nanggala-402.

In this search process, the TNI has deployed 21 warships, including KRI Alugoro-405 Submarines. Meanwhile, the police sent four ships, such as Gelatik-5016 Police Ship, ENGGANG-4016 KP, Westa-8004 KP, and Balan-4017 KP.

Several friendly countries also supported the search process by deploying several ships, such as Singapore sending a submarine MV Swift Rescue, Malaysia deployed assistance with the Rescue Mega Bakti ship scheduled to arrive on Monday (4/26/2021). Meanwhile Australia deployed two fleets, HMAS Ballarat (FFH 155) and HMAS Sirius (O 266), India sent one ship to assist with the search. Meanwhile, the United States provided assistance by sending Poseidon aircraft. (kompas.com April 24, 2021).

After three days of search and rescue efforts against KRI Nanggala-402, on Sunday, April 25, 2021 at 01.00 WITA finally through KRI Rigel which using a multibeam echo sounder around the search site at a depth of 800 meters and managed to find underwater contact. The results of this discovery were presented by Kasal, Admiral TNI yudo Margono at a press conference, Sunday (25/4). Kasal said because KRI Rigel which has a Remote Operated Vehicle (ROV) can only be depth of 800 meters, it was handed over to the MV Swift Rescue ship owned by the Singapore government. (tempo.co April 26, 2021).

Thanks to the help of the MV Swift Rescue, it managed to obtain the visual data of KRI Nanggala -402 that has been split. The visual contact was obtained at the position of 07 degrees 46' 56" South, and 114 degrees 51' 20" East, the place of fall KRI Nanggala-402 which is approximately 1,500 yards in the South, at a depth of 838 meters.

From around the location found a number of items that are suspected to be part of KRI Nanggala-402, such as the rear vertical steering wheel, anchor, the outside of the middle body, the steering wheel of the hose arises, other parts of the ship including the safety clothes of the crew MK 11. Based on the authentic evidence, it can be stated that KRI Nanggala-402 has sunk and the entire crew has been killed," said TNI Commander Marshal TNI Hadi Tjahjanto in the same press conference.

Until the time this paper was compiled, the Indonesian Navy (TNI AL) continued to deploy several troops who have the ability to dive. Among

other things, the Frog Force Command (Kopaska), Amphibious Reconnaissance (Taifib), Marines, and Underwater Diving Service (Dislambair) are still trying to evacuate the KRI Nanggala-402 Submarine that sank in Bali waters.

According to the explanation from the Assistant Planning and Budget (Asrena) KASAL Rear Admiral TNI Muhammad Ali in a press conference, Tuesday (27/4/2021), said a number of KRI are still on standby at the search site. Therefore, the evacuation in the Bali Sea remains carried out until now. Asrena Kasal also stated that the MV Swift Rescue ship that was brought in from Singapore was also still at the search site to assist with the evacuation. (kompas.com, April 27, 2021).

The process of evacuating the body of the sunken KRI Nanggala-402 was not as easy as previously thought. According to Asrena KSAL, during a press conference at Bendungan Hilir, quoted from Detik.

com, Tuesday (4/5/2021), said the evacuation of the ship's body should use a hook. Meanwhile, hooks cannot be automatically mounted from aboard a ship at sea level, but must be installed by divers or robots, and this is the problem. Therefore, the evacuation process of KRI Nanggala-402 can only reach the stage of lifting small parts only. Added Asrena KSAL for the time limit issue it could not be determined. Because given the terrain and situation, especially in the Sea of Bali, there is also an internal wave.

Meanwhile, several countries said they were ready to assist in the evacuation process, including the assistance of the People Liberation Army Navy (PLA Navy). The offer of assistance related to humanitarian assistance from China in handling KRI Nanggala-402 in the form of salvage vessels delivered by the Chinese Ambassador to Indonesia to the Minister of Defense of the Republic of Indonesia. "This offer of humanitarian assistance is welcomed by the Indonesian government," reads a press statement



Photo : Antara/Fikri Yusuf

TNI Commander in Chief, Marshal TNI Hadi Tjahyanto (right) and Navy Chief of Staff Admiral TNI Yudo Margono (left) show the safety clothes for the crew of the KRI Nanggala-402 ship which was found during a press conference at I Gusti Ngurah Rai Air Base, Badung, Bali, Sunday (25/04/2021). KRI Nanggala-402 is confirmed to have sunk and 53 crew members died in the waters north of Bali.



Photo Source : navaltechnology.com

The MV Swift Rescue ship unloads Remote Operated Vehicle (ROV) equipment.

from the Navy Information Service, Saturday (1/5). For the ship deployed by the Chinese Navy as many as three salvage ships to help lift the KRI Nanggala-402 ship that is on the seabed.

The ships that are assisted to Indonesia are Ocean Salvage and Rescue Yongxingdao-863, Ocean Tug Nantuo-185 and Scientific Salvage Tan Suo 2. The three ships are expected to arrive in Bali waters on April 30 or early May 2021. (detik.com, Tuesday, May 4, 2021).

From the series of real pictures, it is very understandable of how all parties stand shoulder to shoulder together to give the best efforts in the evacuation process KRI Nanggala-402 Submarines that still lean on the seabed. And it is clear that there will be no deadline for the evacuation process until the goal is reached.

46 The sinking of KRI Nanggala-402 in Bali's waters has shocked us all. Not only for the families of the 53 crew members, the Hiu Kencana family and the large family of the Navy but also the entire Indonesian people and the world community.

The Indonesian nation expressed deep sadness over this disaster, especially to the entire family of submarine crew. The Indonesian community's prayer sequence was accompanied by the 53 best patriots guarding the sovereignty of the country, and for all family members were given patience, fortitude and strength. For now and forever, KRI Nanggala-402 is now on eternal patrol or in perpetual patrol (duty forever/no return), Goodbye, Happy sailing to eternity.***

Website Reference :

- Official Instagram account of Minister Prabowo Subianto, @prabowo, April 25, 2021
- Arnania, Mela. 2021."KRI Nanggala-402 Flashback to The Sun. " <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/24/202859065/kilas-balik-kri-nanggala-402-hingga-dinyatakan-tenggelam>, accessed on May 20, 2021, at 15:08.
- Adyatama, Egi. 2021. "Here's the Chronology of KRI Nanggala-402 Found aboard Singapore's MV Swift", <https://nasional.tempo.co/read/1456292/>

begini-kronologi-kri-nanggala-402-ditemukan-kapal-mv-swift-milik-singapura/full&view=ok accessed on May 20, 2021, at 3:13 p.m.

- Aerospace, Adhyasta. 2021. "TNI AL Reveals Difficulty In Lifting KRI Nanggala-402", <https://news.detik.com/berita/d-5556986/tni-al-ungkap-kesulitan-angkat-badan-kri-nanggala-402>, accessed on May 20, 2021, at 15:13
- Maulana, Riezky. 2021. "Help Evacuate KRI Nanggala-402, China Navy Also Lowers 48 Mainstay Divers", <https://nasional.sindonews.com/read/417634/14/bantu-evakuasi-kri-nanggala-402-al-china-juga-turunkan-48-penyalam-andalan->, accessed on May 20, 2021, at 3:13 PM
- Ramadan, Ardito. 2021. "TNI AL Ensure Kri Naggala-402 Evacuation Efforts Continue", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11590671/tni-al-pastikan-upaya-evakuasi-kri-nanggala-402-tetap-berlanjut>, accessed on May 20, 2021, at 15:13
- Sari, Puspa, Haryanti. 2021. "KSAL :KRI Nanggala-402 Submarine Split Into 3 Parts", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/25/18443401/ksal-kapal-selam-kri-nanggala-402-terbelah-menjadi-3->, accessed on May 20, 2021, at 15:13.
- 2021. "KRI Nanggala-402 Declared Drowned, How Is the Crew Condition?", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/063445878/kri-nanggala-402-dinyatakan-tenggelam-bagaimana-kondisi-awaknya>, accessed on May 20, 2021, at 3:13 PM
- 2021. "KRI Nanggala-402 Lost Contact During Torpedo Firing Exercise", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/22/154900878/detik-detik-kri-nanggala-402-hilang-kontak-saat-latihan-menembak-torpedo>, accessed on May 20, 2021, at 3:08 PM
- 2021. "Regarding the Awarding of Scholarships for The Sons and Daughters of

KRI Nanggala-402 Personnel", <https://www.kemhan.go.id/2021/04/26/pernyataan-menteri-pertahanan-ri-prabowo-subianto-mengenai-pemberian-beasiswa-bagi-putra-putri-personel-kri-nanggala-402.html>, accessed on May 20, 2021, at 15:13

- 2021. "Menhan : Family Must Be Proud and Keep the Fragrant Name of KRI Nanggala-402 Soldiers", <https://www.kemhan.go.id/2021/04/29/menhan-keluarga-harus-bangga-dan-menjaga-nama-harum-prajurit-kri-nanggala-402.html>, accessed on May 20, 2021, at 15:13
- 2021. "Minister of Defense Witnessed the Signing of Cooperation on Compensation and Educational Assistance for The Sons and Daughters of KRI Nanggala-402 Crew", <https://www.kemhan.go.id/2021/05/03/menhan-saksikan-penandatanganan-kerjasama-pemberian-santuan-dan-bantuan-pendidikan-untuk-putra-putri-awak-kri-nanggala-402.html>, accessed on May 20, 2021, at 15:13

**Colonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH
Kakumdam XVIII Kasuari**

NATIONAL DEFENSE IN THE 1000 ARMY NCO PROGRAM SPECIAL AUTONOMY IN WEST PAPUA

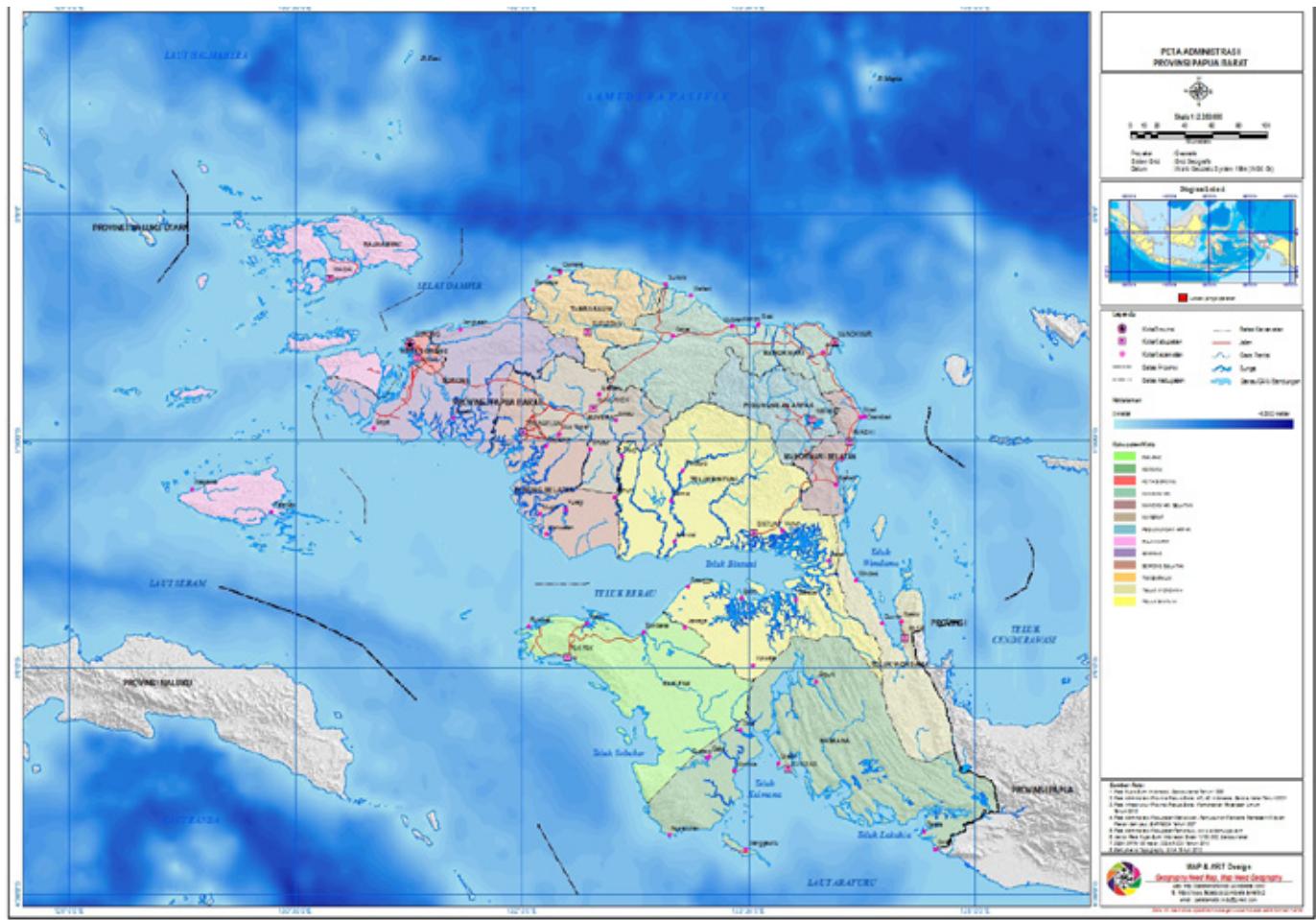


Photo Source: papuabarbat.bpk.go.id

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subiyanto, approved the recruitment program for 1.000 Army NCO Special Autonomy (Otsus) proposed by Kodam XVIII/Kasuari/West Papua. Pangdam XVIII Kasuari, Maj. Gen. I Nyoman Cantiasa, SE, M.Tr (Han) said that the challenge of the XVIII/Kasuari Military Command is not easy, because West Papua Province is an area prone to social and communal conflicts, and there is still a real threat of separatism; both from the Armed Separatist Criminal Group (KKS) and political separatists who always try to destabilize the security in the West Papua region, through actions from the political, clandestine and political fronts armed forces they have. "In line with the strategic plan for the organization of the XVIII/Kasuari Kodam for 2020-2024, a new unit at the Korem and Brigade level was inaugurated, namely Korem 182/Jazira Onim (JO) and Brigif 26/Gurana Piarawaimo (GP) to complement the strength of the territorial units and the XVIII/Kasuari Kodam maneuver unit.

This is based on Kasad Regulation number Kep/352/IV/2020 dated April 23, 2020 concerning the arrangement of units and the formation of new units of the Indonesian Army ranks. The operational inauguration of Korem 182/JO and Brigade 26/GP in response to organizational needs to support operational readiness of the XVIII/Kasuari Kodam in the context of developing the Kodam organization, both as a Guidance City and Operation City, faced with the geographical conditions of the West Papua Province which have vast and complex problems, so it requires an effective and efficient Control Command (Kodal).

After the inauguration of Korem 182/JO, several Kodal units were transferred from the ranks of Korem 181/Praja Vira Tama (PVT), namely 8 Kodim (3 Kodim new formation) in it, three of which were transferred to Korem 182/JO so that the unit composition was formed. The new Korem ranks, namely Korem 181/PVT, oversees 5 Kodim (Kodim 1802/Sorong, Kodim 1805/Raja Ampat, Kodim 1807/Sorong Selatan (Sorsel), Kodim 1809/Maybrat, Kodim 1810/Tambrauw). Meanwhile, Korem 182/JO will

supervise 4 Kodim, namely 3 Kodim Kodim Transfer from Korem 181/PVT (Kodim 1803/Fakfak, Kodim 1804/Kaimana, Kodim 1806/Teluk Bintuni) and 1 newly formed Kodim, namely Kodim 1808/South Manokwari (Mansel). On the other hand, with the formation of Brigif 26/GP, the Kodal was transferred to this unit, namely Yonif 764/Iamba Baua (from Kodam XVIII/Kasuari to Brigif 26/GP), Special Raider Infantry Battalion 762/Vira Yudha Sakti (from Korem 181/Praja Vira Tama to Brigif 26/GP), and a new unit formed by Infantry Battalion 763/Sanetia Buerama Amor (SBA) to Brigif 26/GP.

The main task of a TNI soldier is to maintain state sovereignty, security stability, especially in the land of Papua, in order to create a just and prosperous society, so as to avoid external threats that would disturb the unity and integrity of the country. This was revealed by the XVIII Kasuari Commander, Maj. Gen. I Nyoman Cantiasa, when giving directions to the TNI Soldier, Rifle Company D Yonif RK 762/VYS, during his visit to Bintuni Bay, Wednesday (21/10/2020). Pangdam XVIII Kasuari also advised that being a TNI soldier as a people's army must be able to protect his people, there should be no clashes among security forces, especially with the people.

A universal defense system (Sishanta) that involves all citizens, territories and other national resources which is carried out in a total, integrated, directed, sustainable and sustainable manner to uphold the sovereignty of the state, defend the territorial integrity of the state and protect the safety of the entire nation from any threats. Seeing the construction of Sishanta, the additional strength of the TNI AD units in the West Papua region will experience obstacles, one of which is the provision of human resources for the very large number of Army soldiers. Former Pangdam XVIII Kasuari, Lt. Gen. Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si. has met and discussed with all the Regents in the West Papua region and he initiated the provision of Indonesian Army soldiers who come from local youth who are Papuan Indigenous People (OAP) and the idea was welcomed and approved by Chief of Army, General TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc., M.Phil., Ph.D.



Photo Source : Istimewa

Uniquely, this policy is very out of the box because in Article 10 paragraph (1) Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government that absolute government affairs as referred to in Article 9 paragraph (2) include defense and security; managed by the Central Government, and strengthened by Article 4 paragraph (1) of Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, stated the Authority of Papua Province includes authority in all areas of government, except the authority in the fields of foreign politics, defense and security, monetary and fiscal, religion, and judiciary as well as certain authorities in other fields which are stipulated in accordance with statutory regulations.

50 This extraordinary policy has been in line with and supported by the rule in paragraph (8) that the Governor coordinates with the Government in matters of defense spatial planning policies in Papua

Province. In the elucidation chapter of paragraph (8), the coordination between the Governor and the Government is in the implementation of defense spatial planning policies for the defense of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the implementation of non-war military operations in Papua Province in accordance with statutory regulations. In the context of accelerating welfare development and improving human resources in West Papua, the discourse was very well received and welcomed by the Governor of West Papua Province, Drs Dominggus Mandacan, who was followed up by an initial coordination meeting on Monday (3/8/2020) at the Swisbell Hotel, Manokwari, West Papua. Kasuari XVIII Kodam has finished recruiting and selecting TNI AD personnel who come from indigenous Papuans or Natives/Orang Asli Papua (OAP).

Selection Session of Candidate for NCO (Caba) Career Soldier (PK) TNI AD Special Autonomy (Otsus) Indigenous Papuan (OAP) Male Central Committee (Panpus) Kodam XVIII Cassowary in Makodam XVIII Hall Kasuari Trikora Arfa 1 Manokwari West Papua, Tuesday (27/10/2020).



Photo Source : PENDAM XVIII/KASUARI

The selection for the recruitment of 1,000 TNI AD Special Autonomy Officers, which is the National Defense Policy in Special Autonomy in West Papua, has been carried out together with the West Papua Provincial Government and all districts/cities in the West Papua region. The recruitment of 1000 NCOs of the TNI uses the Special Autonomy budget, so the priority is the children of Indigenous West Papua.

Because this is from the Special Autonomy Fund, the priority is given to children from West Papua. So there are 13 City Districts, each of which contributes the best sons and daughters who meet the requirements. Even according to the XVIII Pangdam Kasuari Maj. Gen. Nyoman Cantiasa, SE, M.Tr (Han), in the recruitment there was also a quota for Kowad TNI AD (female soldiers), from West Papuan Indigenous Children. Regarding the Selection Committee, the Pangdam said that he had involved

an external selection committee, especially from traditional institutions.

The results of the recruitment of 1000 Special Autonomy NCO's will be "trained" in a number of Kodam Main Regiments (*Rindam*), including 330 people trained in Rindam III/Siliwangi, 240 people trained at Rindam IV/Diponegoro, Magelang, 130 people trained in Rindam Jaya, Jakarta, 260 people were educated at Rindam V/Brawijaya and 40 indigenous Papuan women at the Indonesian Army Corps Women Education Center (*Kowad*) in Lembang, Bandung to undergo the First Education of NCO (*Dikmaba*) for 20 weeks starting November 4, 2020 until March 23, 2021, with basic military education material.

According to the Regional Commander Regional Commander XVIII/Kasuari, Maj Gen I Nyoman

Candidates for NCO from Papua, a number of the Rindam Regional Military Parent Regiment on Java Island, underwent the First Education for NCO Dikmaba) TNI which is a special autonomy program in the area of Kodam XVIII Kasuari 2020.



Photo Source : Pendam Kogabwilhan III

Cantiasa, in the Army Youtube, Sunday (07/02/2021). The Army NCOs Candidate of Papuans origin are deployed in several Rindam on the island of Java, in order to have an insight into the archipelago and to get to know other regional cultures in Indonesia. (tni.mil.id, February 8, 2021).

Before attending education, you must pass a diagnostic test to find out your respective abilities, both academic, health and physical abilities. In further education, the Special Autonomy NCO's will be directed as Babinsa (Village Guidance NCO) in the West Papua region in the future.

It is hoped that this 'out of the box' policy is the estuary of accelerating the improvement of the welfare of West Papuans by increasing the human resources of indigenous youth from West Papua to be directly involved in State Defense activities which

are also a priority for the government to run smoothly with the existing of defense force which becomes the backbone of creating a peaceful and safe conditions in the West Papua region. ***



Photo Source : istimewa

Kodam XVIII/Kasuari stipulates graduation for participants of the Special Autonomy PK Education NCO Student Admission (Otsus) for Indigenous Papuans (OAP) Kodam XVIII/Casuari 2020.



Photo Source: Istimewa

KRI dr. Soeharso-990 arrived and docked at Soekarno Gudang 104 Port, Makassar City, and was greeted by the Merplug Lantamal VI Team.



The Role of the Navy in Assisted As A Part of Military Operations (OMSP)



Photo Source : tni.mil.id

Accidents at Sea Other Than War

As one of the largest island nations in the world, *Indonesia* has enormous potential as the World Maritime Axis (PMD), considering *Indonesia* is the largest island nation in the world consisting of more than 17-thousands of islands and is located in the equatorial region, between two continents (Asia and Australia), and two oceans (Pacific and Indian).

As an island nation (Archipelagic State), *Indonesia* as an island nation is legalized with the United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) which was ratified on December 10, 1982, and *Indonesia* has ratified it by Law No. 17 of 1985.

The recognition of *Indonesia* as an island nation is a great gift for the Indonesian nation because with the waters of jurisdiction 2/3 of the entire territory of the Republic of Indonesia. The area of the water becomes one with the mainland. *Indonesia* is an archipelago that stretches from Sabang to Merauke, from Miangas to Rote Island which becomes a unity with the boundary of Indonesia's sea area from the territorial sea that is measured 3 nautical miles from the coastline (Coastal Baseline) of each island at the beginning of the independence.

However, the determination of the territorial boundaries of the sea waters, which is a rule of Dutch heritage, is no longer appropriate to meet the safety and security interests of the Republic of Indonesia, therefore with the ratification of UNCLOS 1982 that the area of Indonesian jurisdiction up to 120 nautical miles from the island coastline is measured at low tide. With these conditions, *Indonesia* should be able to make the most of the sea wealth for the welfare of all Indonesian people in accordance with article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution reads "the earth and water and natural wealth contained therein are quasi-by the state and used for the greatest prosperity of the people" and ensure the security of the sea and utilization as stipulated in UNCLOS 1982.

If it is seen from the area owned by *Indonesia* then, from the Marine Geo Science aspect, the waters of the Indonesian National Jurisdiction contain marine resources derived from fisheries that are very potential as one of the biological natural resources with a very large amount.

With *Indonesia's* geographical location is very strategic and very wide coupled with all the marine resources contained in it, it is necessary to have a professional Navy force as the main component of defense at sea in order to protect and safeguard the sovereignty and potential wealth of the sea.

This is in accordance with article 14 paragraph (1) of law No. 5 of 1983 concerning ZEEI clearly formulated that law enforcement officials in the field of investigation in ZEEI is the Navy. Meanwhile, in Law No. 3 of 2002 on State Defense mentioned in this rule states, that the Navy is the main component of defense at sea.

On the other hand, the awareness of *Indonesia's* geographical constellation has brought awareness of the Government of *Indonesia* to emphasize *Indonesia's* development policy for the period 2019-2024 with the vision of realizing *Indonesia* as the World Maritime Axis (PMD).

Indonesia's strategic location resulted in *Indonesia* being at the cross of international trade and shipping routes, both from the Pacific and East Asia to the Middle East, Africa and Europe and vice versa, thus demanding *Indonesia* to divide the Indonesian Archipelago Sea Channel (ALKI) into three parts in support of the International trade and shipping routes.

This strategic position becomes the territory of *Indonesia* as a transit point for various interests of countries with shipping lanes both from continental Europe, the Middle East, the Pacific and South Asia. The frequency of foreign ships crossing the Indonesian sea area, mainly the Strait of Malacca, is currently increasing as the center of world economic activity shifts to Asia, about 70% of freight transport

through Indonesian waters and vice versa. With the increasing number of Indonesian waters as the World Maritime Axis (PMD), there needs to be guarantee of international shipping and the right of other countries to still be able to sail in Indonesian waters. Therefore, the Government of *Indonesia* issued Government Regulation No. 8 of 1962 which serves to guarantee the right of peaceful sea traffic (innocent passage) of foreign water vehicles in inland waters (internal waters) which has the intention to:

1. Support in guaranteeing international shipping so that voyages with peaceful intentions can be fulfilled by heeding all the provisions outlined by the Government of *Indonesia*.
2. Protecting and fulfilling the rights and obligations in Indonesian waters so that clearly and unequivocally in its implementation will not cause savage (sic) which spread misunderstanding so as not to support international approval.
3. Eliminating and reducing sea misappropriations committed by foreign vehicles in their operations across Indonesian territorial waters.

With the increasing frequency of foreign ships and local ships passing through the crowded Indonesian waterways is not impossible in the event of a shipwreck. The high case of sea accident is a concern of all parties, not only ship owners, but also the government, related agencies, and the community. A shipwreck caused hundreds of people's lives to drift. The causes of accidents range from failure to function transportation navigation systems, fires, overloading to the age of manipulated vessels.

During 2020 there were several marine transportation accidents in *Indonesia*, among others are accident hit the Motor Ship (KM) Selgebadan Kamar Jaya which sank in the waters of Trangan Island, Aru Islands, Maluku, on May 22, 2020. The ship, which was carrying 19 passengers, was allegedly blown by strong winds and hit by high waves. The

passengers departed from Dabo area and were about to go to their hometown in Batugoyang Village, Aru Islands. In the accident, 10 people survived by swimming to shore, 6 others were killed, and 3 others were declared missing.

KM Harapan Ku and KM Sea Gulls drowned in Nias Waters, North Sumatra, on June 22, 2020, allegedly due to being hit by high waves and engine failure. Each ship carries 8 and 6 crew members (ABK). From the accident, 13 abk people were declared missing and there was 1 ABK found safe. This data is based on the search results of the combined team on June 24, 2020. Based on the initial report received by nias National Search and Rescue Agency (BNPP) Office, there is only 1 ship that has not returned to the dock, but it turns out that there are 2 more units of ships that have not returned and are known to have sunk. Initially, the two ships planned to sea in the waters around Simuk Island, Batu Islands, Nias Regency. (compass.com,16 December 2020).

As a logical consequence of the breadth of the geographical area of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is an island nation, it is not only the waterways that increase, but the aspects of the flight path are increasing over the years. This indicates the increasing need for air transportation from one island to another, by increasing the flow of commercial flights, it will also not escape the occurrence of air accidents.

During the year 2000 there have been eight (8) plane accidents in Indonesia, history records the most severe accident was Adam Air Plane that crashed in the Makassar Strait with a depth of more than 2,000 meters, all 102 passengers and crew were killed.

Not to mention other terrible accidents, such as Lion Air Flight JT-610 crashed in the waters of Karawang, West Java, which left 189 people consisting of 179 adult passengers, 1 child passenger, 2 infants, 2 pilots, 5 crew members killed.



Photo : Antara/M. Risyal Hidayat

The search team found the wreckage of the Sriwijaya Air SJ 182 that crashed in the waters of Pulau Seribu, Jakarta.

Until the beginning of 2021, the Sriwijaya Air crash SJY182 Jakarta-Pontianak route lost contact and crashed in the waters of Thousand Islands on Saturday, January 9, 2021. Based on manifest data, Sriwijaya Air aircraft produced in 1994 was carrying 62 people consisting of 50 passengers and 12 crew members. Of these, 40 were adults, seven children, three infants. While the 12 crew consists of six active crews and six extra crews. (cnnindonesia.com, January 10, 2021).

Recorded with the number of accidents that occur in the sea area, it has become a demand for the Navy to be able to provide excellent assistance in the search for victims and carry out rescues against ships both ships on water and submarines and aircraft that have suffered disasters in accordance with Law No. 34 of 2004 Article 7, namely carrying out Military Operations Other than War (OMSP) in assisting search and rescue in accidents.

For example, the Sriwijaya Air crash SJY182 was coordinated and systematic, the Navy immediately responded and acted to provide assistance. A number of KRI were deployed, including KRI Kurau-856 and KRI Teluk Gilimanuk-531 and dropped divers from Jalamangkara detachment team (*Denjaka*), Frog Force Commando Unit (*Kopaska*), and Ambibi Reconnaissance Battalion (*Yontaifib*) Marine as well as Koarmada Underwater Rescue Service (*Dislambair*) and rubber boats in search of casualties and aircraft debris.

Combined personnel from the Navy dive team were deployed to the crash site of Sriwijaya Air SJ 182. The search location is focused on the coordinates of the crash of Sriwijaya Air SJ 182 in the waters of Laki Island, Thousand Islands. Two rubber boats and a diving device were prepared to facilitate the search process with SAR patterns, both circular and area sweeping. The search process was conducted by a team of divers at a depth of 16 to 25 meters. (cnnindonesia.com, January 10, 2021).

The investigation in carrying out relief actions from navy personnel is not only done against accidents

that occur among civilians, but also carry out relief assistance, especially fellow Navy.

Not long ago the Navy has been grieving, because of an accident on KRI Nanggala 402 submarine that was wrecked in the waters north of Bali. The shipwreck is also not the first time in the world.

After three days of livelihood and rescue efforts against KRI Nanggala 402, finally the Combined SAR Team obtained a livelihood from the results of multibeam echo sounder data around the search site. At a depth of 800 meters below sea level, KRI Rigel managed to detect an underwater image of the suspected submarine skeleton.

Thanks to the help of the MV Swift Rescue ship from Singapore, it also managed to obtain visual data. By lowering the underwater robot commonly called ROV (Remotely Operated Vehicle) finally get visual contact at the position of 07 degrees 46' 56" South, and 114 degrees 51' 20" East, the crash site KRI Nanggala 402 which is approximately 1,500 yards in the South, at a depth of 838. The ROV with cameras on each side will emit sonar to detect the presence of underwater objects. When sonar detects the presence of solid objects, it makes a sound. Based on the visual data obtained from the ROV, it is illustrated that the condition of Nanggala 402 Submarine split into three parts, and with that condition finally 53 all abk / crew were declared dead.

Until the time this paper was made, the Indonesian Navy (TNI AL) was still trying to evacuate the KRI Nanggala-402 submarine that sank in Bali waters. According to the explanation from the Assistant Planning and Budget The Chief of Staff of The Navy (Asrena Kasal) Rear Admiral TNI Muhammad Ali in a press conference, Tuesday (27/4/2021), said a number of KRI are still on standby at the search site. Therefore, the evacuation in the Bali Sea remains carried out until now. Asrena Kasal also stated that the MV Swift Rescue ship that was brought in from Singapore was also still at the search site to assist with the evacuation. (kompas.com, April 27, 2021).

The series of responsive actions carried out by the Navy against the accidents illustrates that the Navy as one of the main components of Indonesia's national strength cannot be separated from the dynamics of the evolving and complex strategic environment.

Similarly, in carrying out accident assistance at sea, in accordance with article 10 number (3) letter c of the State Defense Law, the Indonesian National Army is tasked with carrying out the country's defense policy to carry out Military Operations Other than War (OMSP).

The role of reliable Navy soldiers and equipped with infrastructure is parachuted directly in the assistance of all types and varieties of accidents that occur at sea. Starting from the deployment of KRI Frigate class and KRI BHO (Hydro-Oceanographic Assistance) in tracking the whereabouts of victims to involve elite troops in the navy body both from

Denjaka, Kopaska, Taifib and Divers shoulder to shoulder in the rescue mission of shipwrecks and aircraft.

This is in accordance with the mandate in Law No. 34 on TNI in addition to overcoming armed insurgencies, the TNI also assists the government in securing shipping and aviation against piracy, piracy and smuggling, as well as assisted accidents at sea.

With the increasingly heavy and complex role of the Navy in the future, the demands to make the Navy professional, superior and reliable, must be equipped with alutsita modernization program owned by the Navy both KRI, Submarines, Pesut to Amphibious Tanks and strengthening the SSAT (Integrated Fleet Weapon System), then the Navy will be more respected in the Southeast Asian region.



Photo : Antara/M. Risyal Hidayat

A number of soldiers from the Fleet 1 Fleet Command (Satkopaska) tried to lift the wreckage of the Sriwijaya Air SJ plane 182 from the bottom of the waters of the Thousand Islands, Jakarta, Monday (11/1/2021).

References

- Law No. 34 of 2004 on TNI;
- State Defense Act;
- Defense Security Service (United States Department of Defense), "Special Focus Area: Marine;
- House of Commons, London. U.K. Security Journal. July 2007, Volume 20, Issue 3, pp 158–170;
- Dahuri, Rochmin, 2020. "Indonesia's Maritime Giant: Still Asleep", <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap>, June 3, 2014, downloaded on December 25, 2020
- 2021. "Two KRI Collect Sriwijaya SJ 182 Aircraft Debris" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210110122729-20-591765/dua-kri-kumpulkan-serpihan-pesawat-sriwijaya-sj-182>, January 10, 2021.
- 2021. "Video : Navy Dive Team Search for SJ 182 To Depth 25 M". www.cnnindonesia.com/tv/20210110145030-407-591834/video-tim-penyelam-tni-al-cari-sj182-hingga-kedalaman-25-m, January 10, 2021.
- 2021. "Kaleidoscope 2020: 5 Water Transportation Accidents in Indonesia". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/16/140400965/kaleidoskop-2020--5-kecelakaan-transportasi-air-di-indonesia?page=all>, December 16, 2020.
- 2021. "the Navy Ensures the Evacuation Efforts of KRI Nanggala-402 Continue". <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11590671/tni-al-pastikan-upaya-evakuasi-kri-nanggala-402-tetap-berlanjut>, April 27, 2021.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense (Sekjen Kemhan) Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, MDS, participated in the National Championship (Kejurnas) Shooting The Chief of Air Force (Kasau) Cup 2021, which took place from March 28 to 2021 at the Shooting Field (Lapbak) Wing I Paskhas, followed by 683 athletes from 16 Provincial administrators (Pengprov) of the Indonesian Shooting and Hunting Association (Perbakin) and 80 shooting clubs from all over Indonesia.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Director General of Defense Potential of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia Maj. Gen. TNI Dadang Hendrayudha held a State Defense Online Coffee activity with the theme "Ramadan and Its Story" which was attended by well-known artists in the capital including Teuku Zacky, Sinyorita, Iqbal Khusaini, SE, Indra Bekti, Mpok Bhabay and Habib Ja'far, Tuesday (27/4) at the State Defense Studio of the Defense Potential Jakarta. Director General of Defense Potential expressed the view that the Indonesian state with its diversity and togetherness, the Indonesian people can overcome the Covid-19 pandemic that is currently hitting the world together. Because the covid-19 pandemic is our collective responsibility.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Head of Rehabilitation Center of the Ministry of Defense (Kapusrehab Kemhan), Brigadier General TNI, dr. Nana Sarnadi, Sp.Og., MMRS, Wednesday (28/4), chaired the Ministry of Defense's Rehabilitation Center Coordination Meeting for Fiscal Year 2021 which was held virtually and directly at the Ministry of Defense's Pusrehab, Bintaro Jakarta.

This time, the coordination meeting of the Center for the Ministry of Defense of the Ministry of Defense has the theme "Efforts to Increase Synergy in the Personnel and Health Sector as an Implementation of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities for TNI and Civilian Defense Personnel".***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Indonesia encourages ASEAN together with eight partner countries that are members of the ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM)-Plus cooperation framework which has advanced technology in disaster early warning systems to share experiences and best practices, in order to prevent or be better prepared to face future disasters and can explore cooperation in the field of disaster early warning systems.***



Photo Source: Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Deputy Minister of Defense M. Herindra Leads the Inauguration, Oath-taking and Handover of Position (Sertijab) Expert Staff for Security of the Ministry of Defense from Maj. Gen. TNI Sunaryo, SE to Rear Admiral TNI Bambang Irawanto, M.Tr (Han), CHRMP, Wednesday (5 / 5) at the Ministry of Defense, Jakarta.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

The Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto attended the awarding of the Honorary Doctorate Degree (Honoris Causa) of Defense Science in the field of Universal War to General (ret) TNI Ryamizard Ryacudu by the Indonesian Defense University at the Defense University, Bogor, Thursday (20/5). Rector of the Indonesian Defense University, Vice Admiral TNI Dr. Amarulla Octavian., ST, M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU as Chair of the Indonesian Defense University Senate who said that General TNI (Purn) Dr. (HC) Ryamizard Ryacudu is the first Honoris Causa Doctor at the Indonesian Defense University who has shown achievements as a professional military as well as academic achievements.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

After the Eid Al-Fitr holiday, Ministry of Defense employees on Wednesday (19/5) conducted an Antigen Rapid Test at the Urip Sumohardjo Hall, Kemhan, Jakarta. The Rapid Antigen Test will take place gradually over 5 working days, from 19 May to 25 May 2021 in accordance with health protocols. The implementation of this rapid antigen test is carried out as an effort to anticipate detection and break the chain of transmission of the Covid-19 virus in the Ministry of Defense's work environment.***



Photo Source: Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Inspector General of the Indonesian Ministry of Defense Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana, SIP, MM, chaired the internal monitoring evaluation meeting in April and May 2021, Wednesday (19/5), at the Ministry of Defense, Jakarta. In the meeting that was attended by the Secretary of the Inspectorate General of the Ministry of Defense and the Inspectors, the Inspector General of the Ministry of Defense emphasized several things which emphasized the duties and responsibilities of the Inspectorate General of the Ministry of Defense.***



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

The Ministry of Defense and the TNI have 110 hospitals in a number of areas that handle Covid-19 sufferers to date, and have increased their capabilities and capacities from adding ICUs to other supporting facilities so that their services are better. This was stated by the Health Director of the Directorate General of Defense Forces, Ministry of Defense (*Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan*) Rear Admiral TNI dr. Arie Zakaria, Sp.OT, Sp.KL., as a resource person in the Kemhan Podcast interview , Thursday (6/5) at the Podcast Studio of the Public Relations Bureau of the Ministry of Defense General Secretariat Jakarta.***

